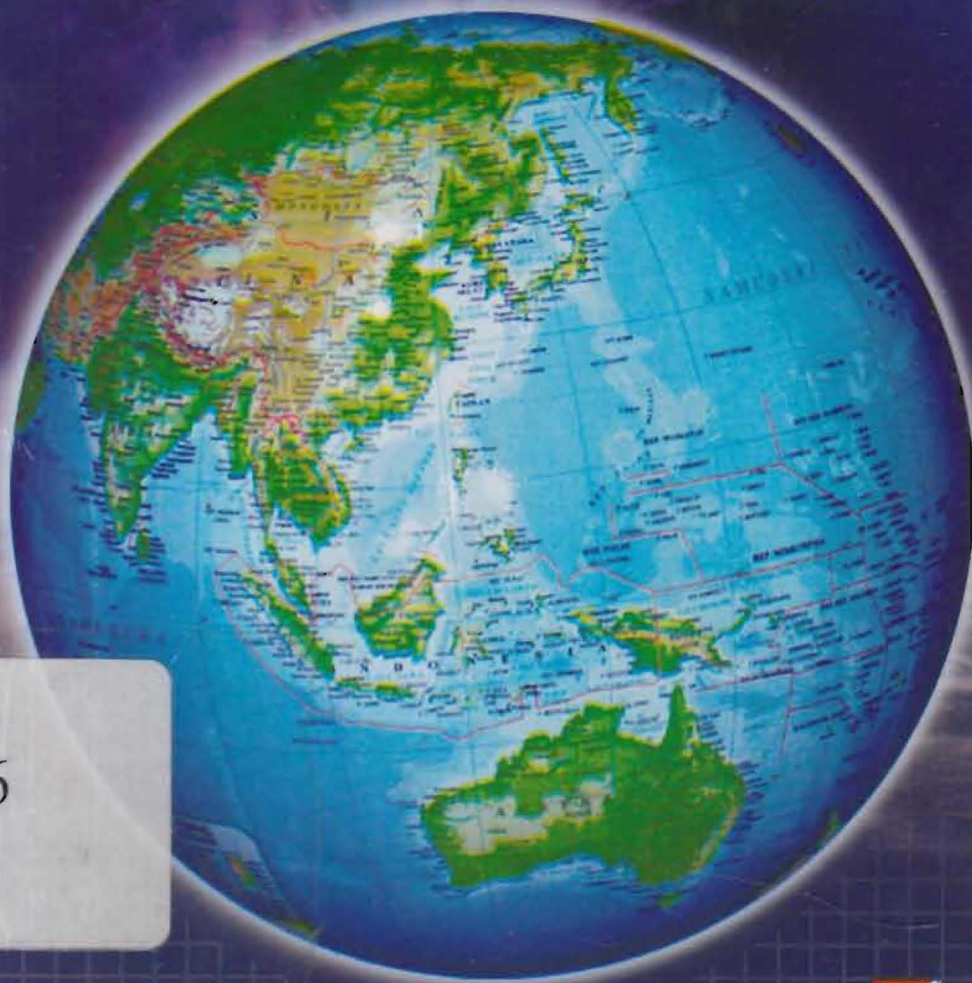




MERETAS BATAS MENJEMPUT MASA



B
90 6
R



Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional



**MERETAS BATAS MENJEMPUT MASA:
TIGA PULUH LIMA TAHUN MABBIM**

Penyunting Penyelia:

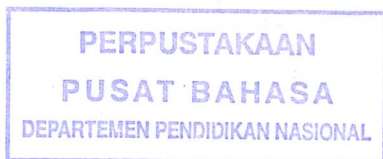
Dr. H. Dendy Sugono

Penyunting Pelaksana:

Awang Mohd. Azurin Othman (Brunei Darussalam)

Dr. Dedi Puryadi (Indonesia)

Puan Sa'dah Abdullah (Malaysia)



**PUSAT BAHASA
JAKARTA
2008**

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
PB Klasifikasi 499.290 6 MER m	No. Induk : 267 Tgl. 10/6/2008 Ttd. : _____

MERETAS BATAS MENJEMPUT MASA:
Tiga Puluh Lima Tahun Mabbim
 ISBN 978-979-685-711-1

Diterbitkan oleh Mabbim Indonesia
Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun
Jakarta, Indonesia 13220
Pos-el: pakersa@yahoo.com

Desain Sampul : Dad Murniah
 Pengatakan dan : Azhari Dasman Darnis
 Perwajahan : Sukadi
 Jenis Huruf : Georgia 11 poin



00002162

KATA PENGANTAR

Semula kerja sama kebahasaan dilakukan antara Indonesia dan Malaysia dengan nama Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Pada tahun 1985 Brunei Darussalam menjadi anggota resmi MBIM sehingga forum kerja sama tersebut berubah menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim).

Tahun 2007 Mabbim genap berusia 35 tahun. Selama kurun waktu itu Mabbim telah menghasilkan antara lain *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia/Melayu*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Pedoman Penyusunan Kamus Bidang Ilmu*, *Jurnal Rampak Serantau*, *Glosarium Istilah Asing-Indonesia*, berbagai kamus bidang ilmu, serta prosiding seminar bahasa dan sastra.

Adanya Komunitas Bersama Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, Menteri Pelajaran Malaysia, dan Menteri Perhubungan Brunei Darussalam (sebagai penanggung jawab Mabbim) yang ditandatangani di Jakarta 31 Juli 2006 semakin mengukuhkan tekad bersama untuk terus menjayakan dan memartabatkan bahasa kebangsaan. Keinginan tersebut direfleksikan pada saat ulang tahun Mabbim ke-35 tahun ini dalam bentuk buku *Meretas Batas Menjemput Masa: 35 Tahun Mabbim*.

Buku ini memuat sembilan tulisan pakar dari ketiga negara anggota Mabbim. Buku ini sangat menarik karena tidak hanya memuat tulisan pakar yang terlibat langsung Mabbim, tetapi memuat pula pendapat pakar yang tidak terlibat dengan aktivitas Mabbim selama ini. Meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak memahami apa dan bagaimana serta apa yang telah dihasilkan Mabbim. Justru dalam tulisan mereka dapat dilihat keobjektifan pandangan terhadap apa yang dilakukan Mabbim, terutama hubungannya dengan glosarium istilah berbagai bidang ilmu. Untuk itu, kepada para penulis, saya mengucapkan penghargaan dan ucapkan terima kasih yang tulus.

Buku ini terbit atas kerja keras tim yang telah menyiapkan penerbitan buku ini. Berkenaan dengan itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Sugiyono beserta anggota timnya dan Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. beserta stafnya.

Mudah-mudahan buku ini memberikan informasi berharga bagi pembaca dan sebagai bentuk dokumentasi Mabbim pada usia 35 tahun.

Jakarta, April 2008
Kepala Pusat Bahasa

Dr. H. Dendy Sugono

DAFTAR ISI

MABBIM MENGEMBANGKAN BAHASA MEMAJUKAN PERADABAN

Dr. H. Dendy Sugono (Indonesia)
(halaman 1)

MBIM/MABBIM 35 TAHUN

Prof. Emeritus Dato' Dr. Asmah Hj. Omar (Malaysia)
(halaman 13)

MABBIM MAKIN DEWASA DENGAN RENUNGAN DAN AGENDA MASA DEPAN

Prof. Dr. Amrin Saragih (Indonesia)
(halaman 57)

PERANCANGAN STATUS

Prof. Madya Jaludin bin Hj. Chuchu (Brunei Darussalam)
(halaman 73)

PERANCANGAN KORPUS BAHASA: REALITI DAN PRAKTISNYA

Dr. Dayang Aini binti Haji Awang Karim (Brunei Darussalam)
(halaman 95)

PENYELARASAN ISTILAH MABBIM: TERCAPAIKAN IMPIAN

Puan Junaini Kasdan (Malaysia)
(halaman 109)

EVALUASI DAN HARAPAN: SEMALAM, HARI INI DAN ESOK

Dr. Mataim bin Bakar (Brunei Darussalam)
(halaman 133)

MELESTARIKAN KESEPAKATAN SERUMPUN

Dato' Dr. Firdaus Abdullah (Malaysia)
(halaman 153)

PERSEBARAN ISTILAH ILMIAH DALAM BERKALA ILMIAH

Ir. Agustin Wydia Gunawan (Indonesia)
(halaman 161)

MABBIM MENGEMBANGKAN BAHASA MEMAJUKAN PERADABAN

Dr. H. Dendy Sugono
Kepala Pusat Bahasa
Indonesia

1. Pendahuluan

Perintisan kerja sama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia sudah dilakukan tahun 1959. Para pakar bahasa kedua negara berpandangan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia berasal dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Masuknya penjajah Belanda dan Inggris di Indonesia dan di Malaysia berawal dari perdagangan lalu berganti dengan penjajahan. Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda dan Malaysia dalam kekuasaan pemerintahan Inggris Belanda masuk ke Indonesia dan Inggris ke Malaysia yang membawa gaya penjajahan yang berbeda. Hal itu menjadikan jurang mental yang berbeda antara rakyat Indonesia dan Malaysia. Sistem pemerintahan kedua pemerintahan berbeda, terutama dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pemerintah Belanda melarang rakyat Indonesia bersekolah, kecuali golongan bangsawan.

Sementara itu, pemerintah Inggris membolehkan rakyat Malaysia untuk bersekolah. Pemerintahan Belanda mengutamakan bahasa Belanda di Indonesia dan pemerintahan Inggris mengutamakan bahasa Inggris di Malaysia. Kondisi itu membawa pengaruh yang berbeda dalam perkembangan bahasa di Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Bahasa Indonesia diwarnai bahasa Belanda di bidang kosakata dan bahasa Melayu di Malaysia dipengaruhi bahasa Inggris. Selain itu, sistem penyerapan pun berbeda. Atas pengalaman masing-masing, bahasa Indonesia menyerap berdasarkan lafal dari bahasa Belanda, sedangkan Malaysia menyerap berdasarkan lafal dari bahasa Inggris.

Berdasarkan pengalaman itu pakar bahasa bersepakat untuk mempertemukan kembali kedua bahasa yang serum-pun itu agar jurang perbedaan makin tidak menjauh. Hal itu disadari oleh para pakar bahasa kedua negara mengingat bahasa Melayu sudah menjadi bahasa *lingua franca* di Nusantara sejak abad ke-7. Di Indonesia diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan pada tahun 1928 merupakan keberhasilan dalam mengangkat status bahasa Melayu dari bahasa rakyat menjadi bahasa persatuan. Begitu juga dengan bahasa Melayu di Malaysia diangkat menjadi bahasa kebangsaan dalam konteks yang sama. Bahasa Indonesia di Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia menjadi bahasa resmi untuk semua urusan kenegaraan dan pengembangan bahasa ilmu dan teknologi.

Berawal dari sejarah tersebut, pada tahun 1959 dilakukan kerja sama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia yang pembahasan awalnya difokuskan pada penyamaan ejaan bersama. Hal itu sangat penting dilakukan agar perbedaan

mendasar sistem tulis bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia tidak makin jauh. Kerja sama tersebut melahirkan konsep *Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia)*. Konsep ejaan yang dibahas berulang-ulang terkendala oleh perbedaan dalam sistem penyerapan istilah asing. Bahasa Indonesia lebih mengutamakan penulisan. Sementara itu, Malaysia mengutamakan pengucapan. Selain itu, konfrontasi yang terjadi pada tahun 1965 menyebabkan kerja sama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia terhenti.

Kerja sama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia yang sempat terhenti kemudian dilanjutkan pada tahun 1966. Di Indonesia terjadi perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden Soeharto memulihkan kembali hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan yang membaik itu berdampak pada kerja sama dalam bidang bahasa. Untuk itu, pemerintah Indonesia menunjuk tim Komando Tertinggi (KOTI) melakukan perjalanan ke Malaysia untuk memulai perundingan pemulihan hubungan antara Indonesia dan Malaysia.

Setelah kunjungan itu, pada awal tahun 1966 pemerintahan Tun Abdul Razak Hussein, Timbalan Perdana Menteri, menugasi pakar bahasa Malaysia melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menghidupkan kembali kerja sama kebahasaan khususnya dalam bidang ejaan. Rombongan Malaysia diketuai oleh Tuan Syed Nasir Ismail, yang ketika itu Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, disertai Encik Muhammad Yunus Maris, pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Tuan Hassan Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka, berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan kerja sama kebahasaan yang sempat terhenti.

Di Jakarta rombongan Malaysia telah disambut dengan mesra oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Prijono, beserta dengan Tim Ahli Bahasa KOTI (Komite Tertinggi Indonesia), yang diketuai oleh Kolonel Wahyu. Anggota-anggota Tim Ahli Bahasa KOTI, antara lain, terdiri atas H.B. Jassin, Anton Moeliono, dan Rudjiati Muljadi. Kunjungan selama tiga hari di Jakarta itu merupakan kunjungan permulaan dalam kerangka kerja sama kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia.

Kunjungan tersebut menjadi titik awal pembicaraan kerja sama kebahasaan selanjutnya. Pada bulan Juni 1967, pihak Indonesia berkunjung ke Malaysia. Setelah tiga hari bersidang, pada tanggal 27 Juni 1967 diperoleh kesepakatan dalam bidang ejaan. Kedua negara bersepakat merevisi Ejaan Melindo menjadi Ejaan 1967 yang lebih sederhana dan dapat diterapkan pada kedua negara karena Ejaan 1967 dianggap lebih praktis, ekonomis, dan ilmiah. Walaupun demikian, kedua negara menamai kedua pedoman masing-masing *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu Malaysia*. Di Indonesia pedoman itu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972.

Setelah keadaan politik makin membaik, kerja sama kebahasaan diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pembentukan suatu wadah yang dapat menaungi kegiatan kebahasaan antara Indonesia dan Malaysia khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk itu, pada tanggal 23 Mei 1972 di Jakarta ditandatangani Komunike Bersama oleh Mashuri, S.H.,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Hussein Onn, Menteri Pelajaran Malaysia. Komunike tersebut menjadi acuan kerja sama dalam bidang kebahasaan.

2. Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia

Sebagai tindak lanjut komunike tersebut, pada tanggal 29 Desember 1972 dibentuk suatu wadah yang menaungi kegiatan kebahasaan dengan nama Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Untuk pedoman kerja dibuat Piagam MBIM yang ditandatangani oleh Dr. Amran Halim, selaku wakil dari Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, dan Datuk Sujak bin Rahiman, selaku wakil dari Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Untuk itu, pembahasan istilah mendapat prioritas untuk dibicarakan agar masalah peristilahan yang berskala nasional untuk masing-masing negara menjadi bertaraf internasional. Keanggotaan majelis ini di Indonesia bernama Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia (PPBI) dan di Malaysia bernama Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM) di bawah naungan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pada awal-awal sidang pembahasan difokuskan pada pedoman pembentukan istilah yang menjadi panduan dalam kerja-kerja majelis. Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia diganti oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa) pada tahun 1975. Pusat Bahasa membentuk Panitia Kerja Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia (PKSIM) sebagai pengelola MBIM di Indonesia. Untuk meluaskan

jangkauan kerjanya, MBIM setiap sidang mengundang negara pemerhati, yang berbahasa Melayu, dalam setiap sidang-sidangnya.

3. Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia

Kerja sama kebahasaan ini selanjutnya menjadi perhatian Brunei Darussalam dan Singapura. Brunei Darussalam dan Singapura menjadi pemerhati resmi MBIM. Brunei Darussalam mulai hadir sebagai pemerhati Sidang MBIM pada Sidang ke-18 yang diadakan di Palembang, 28 Maret—3 April 1982 dan resmi menjadi anggota MBIM pada Sidang ke-24 MBIM 25—29 Maret 1985 di Jakarta. Setelah Brunei Darussalam masuk menjadi anggota resmi, nama MBIM diubah menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim). Selanjutnya, pada 11 Juni 1987 Piagam Mabbim ditandatangani dengan tujuan dan fungsi Mabbim sebagai berikut:

- (1) meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota;
- (2) meningkatkan peran bahasa kebangsaan/resmi negara anggota sebagai sarana perhubungan yang lebih luas;
- (3) mengusahakan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa modern yang lain;
- (4) mengusahakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif, pedoman, dan panduan;
- (5) mengadakan pertemuan kebahasaan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan/resmi negara anggota.

Mabbim Mengembangkan Bahasa Memajukan Peradaban

Seiring perkembangan permasalahan yang dihadapi, ketiga negara bersepakat untuk memperbaiki organisasi dan tata kerja Mabbim. Sidang majelis dijadikan dua macam, yaitu Sidang Pakar dan Sidang Eksekutif. Sidang Pakar diperuntukkan bagi pembahasan istilah bidang ilmu yang makin besar jumlah istilah yang harus ditangani. Setiap tahun sekitar 9 bidang/subbidang ilmu digarap dengan jumlah sekurang-kurangnya 9.000 istilah. Sidang Eksekutif diperuntukkan bagi penyusunan perencanaan pengembangan dan pembinaan bahasa kebangsaan serta penentuan kebijakan arah Mabbim yang berupa program kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi Mabbim.

4. Pemasyarakatan Hasil Mabbim

Selama kurun waktu 35 tahun, Mabbim telah menghasilkan 405.000 ribu istilah dari 37 bidang ilmu. Di samping itu, Mabbim pun telah menghasilkan Pedoman Umum Ejaan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Jurnal Rampak Serantau, Prosiding Seminar Bahasa dan Sastra, Pedoman Umum Penyusunan Kamus Bidang Ilmu, dan terbitan lain yang berkaitan dengan bahasa. Mabbim telah berupaya memasyarakatkan hasil kerjanya melalui berbagai bidang, baik melalui terbitan, seminar maupun jurnal, yang dilakukan melalui media cetak atau elektronik. Istilah Mabbim pun telah dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat terutama perguruan tinggi. Kini Mabbim telah dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya ke depan Mabbim dituntut

untuk lebih proaktif dalam perencanaan peristilahan khususnya dan perencanaan bahasa umumnya. Untuk itu, perlu ditempuh strategi pemasyarakatan hasil Mabbim yang dapat menjangkau seluruh masyarakat secara efisien dan efektif.

5. Pandangan Tokoh terhadap Mabbim

Bagaimana Mabbim berkiprah, berikut pandangan para pakar dan ahli Mabbim.

Asmah Hj. Omar (Malaysia) mengungkapkan perjalanan Mabbim dari awal pendiriannya, Mabbim yang bermula dari MBIM merupakan badan pembina bahasa yang tidak mempunyai kesamaan di mana pun di muka bumi ini. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Mabbim banyak memanfaatkan pemikiran dan pertimbangan dari segi linguistik, bidang ilmu, hubungan antarnegara yang memerlukan kemahiran dalam perundingan, hubungan antarindividu, pengurusan, dan logistik. Tidak ada model dari mana pun yang dapat dirujuk karena semua itu dibangun dengan pemikiran dan cara kerja sendiri, Mabbim dapat dikatakan sudah menghasilkan model perancangan bahasa bagi satu alam peradaban yang mempunyai satu bahasa bersama.

Sebagai wakil kalangan pengguna istilah, Amrin Saragih (Indonesia) melihat Mabbim telah berkarya untuk memenuhi tugas dan fungsinya selama 35 tahun. Karya dan kegiatannya telah dirasakan di ketiga negara anggota, khususnya kalangan menengah ke atas dan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi di negara anggota Mabbim. Re-

Mabbim Mengembangkan Bahasa Memajukan Peradaban

nungan ke masa lalu dan antisipasi ke depan merupakan strategi yang baik dan perlu dilakukan oleh Mabbim. Dengan memperhatikan konteks sosial masa lalu dan saat ini serta antisipasi ke depan, globalisasi, sejumlah agenda baru atau kebijakan yang cerdas perlu dicanangkan demi kejayaan Mabbim merentas batas untuk mewujudkan misinya. Sementara itu, tokoh linguistik Brunei Darussalam yang terlibat dalam Mabbim, Jaludin bin H. Chuchu, menyatakan bahwa perancangan bahasa bagi setiap negara itu mempunyai tujuan dan sasaran tersendiri. Misalnya, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, tujuan perancangan bahasa itu ialah semata-mata untuk mengekalkan jati diri masyarakat yang bersangkutan. Bahasa berfungsi sebagai wahana ekspresi budaya, baik sebagai sarana pengembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan maupun inventori ciri-ciri kebudayaan. Walaupun bahasa Melayu menghadapi kekangan dan tantangan dalam era globalisasi, atas semangat dan kesadaran masyarakatnya, bahasa Melayu di Brunei akan tetap didaulatkan sebagai bahasa resmi negara.

Dalam kaitan dengan pencanaan bahasa, Dayang Aini binti H. Awang Karim (Brunei Darussalam) menyatakan bahawa perancangan bahasa, hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan atau bahasa resmi satu negara, memainkan peranan penting dalam membangun negara, pemikiran dan jati diri bangsa serta kemajuan bangsa dan negara. Pendidikan dan perancangan bahasa memiliki hubungan erat karena sekolah berfungsi sebagai agen perubahan bahasa. Dasar pendidikan sebuah negara memainkan peran penting dalam merealisasi wadah yang dihasratkan dalam sesuatu perancangan bahasa. Berhasil atau tidak suatu

perancangan bahasa itu berkaitan dengan dasar pendidikan di negara tersebut, di samping peran agensi-agensi yang lain.

Dalam perjalanan Mabbim mengembangkan istilah, terdapat perbedaan-perbedaan. Menurut Puan Junaini Kasdan (Malaysia), setiap perbedaan perlu dihormati karena hal itu merupakan satu keunikan bahasa masing-masing. Penerimaan istilah bahasa sumber, khususnya bahasa Inggris, merupakan alternatif untuk merapatkan jurang ketidakseragaman yang berlaku. Namun, pada masa yang sama, Mabbim juga harus bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan kata asli bahasa Melayu/Indonesia tidak terus terpinggir. Walau bagaimanapun bahasa Melayu/Indonesia masih dianggap sebagai lambang jati diri bangsa Melayu/Indonesia. Putusan dan tindakan apapun yang akan dilakukan oleh Mabbim, semangat dan kerja sama serantau harus diutamakan demi kepentingan bahasa Melayu/Indonesia.

Tokoh muda Mabbim dari Brunei Darussalam, Mataim bin Bakar, memiliki pandangan yang bersemangat dalam mengelola Mabbim. Menurutnya, Mabbim sebenarnya membawa semangat jauh lebih besar dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu/Indonesia. Melalui Mabbim, pengemblengan kepakaran ketiga-tiga negara anggota membolehkan pengayaan bahan dan korpus bahasa tidak berjalan sendiri-sendiri. Kesepakatan dan kebersamaan adalah jauh lebih baik daripada bergerak sendiri-sendiri, apalagi dalam konteks memperkasakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Kita dapat melihat bagaimana ruang geografi itu diikat dengan satu bahasa yang menyatukan ketiga-tiga negara serumpun. Sementara itu, tokoh Mabbim Malaysia, Firdaus Abdullah menyatakan bahwa segala-galanya boleh saja diatasi melalui strategi diplomasi budaya yang dapat

dimanfaatkan sebagai suatu sarana yang dapat mewujudkan persepahaman dan rasa saling menghormati budaya yang akhirnya akan menjayakan usaha untuk saling bekerja sama, sekaligus merealisasikan kesepakatan dan kesetiakawanan dalam mencapai tujuan bersama Mabbim. Dia berkeyakinan bahwa, sekiranya kita berani untuk melakukan perubahan demi kesinambungan (*change for continuity*), baik dalam tata cara kerja maupun dari aspek orientasi, niscaya Mabbim akan menjadi badan pembina bahasa dan pemuka gerakan diplomasi budaya akan dapat kita lestarikan.

Dalam kaitan dengan persebaran istilah Mabbim, Agustin Widya Gunawan (Indonesia) menyatakan perlunya kepercayaan pengguna bahasa terhadap istilah hasil Mabbim. Persebaran istilah yang disajikan dalam *Glosarium Istilah Asing-Indonesia* dapat dilakukan melalui terbitan berkala ilmiah. Istilah yang tepat dalam pengungkapan apa yang ingin disampaikan dalam artikel ilmiah dan ketaatasaan penggunaannya akan mempermudah pembaca untuk mengikuti ungkapan jalan pikiran penulisnya dan memantapkan persebarannya. Demikian pemikiran para tokoh dan ilmuwan. Demikian pandangan para tokoh yang dimuat dalam buku ini.

Pertanyaan yang timbul ialah bagaimana Mabbim ke depan? Mabbim yang telah berhasil membakukan sistem tulis/ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu kini telah menghasilkan 410.000 istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Istilah itu telah dipublikasikan dalam bentuk *Glosarium Istilah Asing-Indonesia* (cetak dan CD). Apakah ratusan ribu istilah itu telah memenuhi keperluan masyarakat, khususnya kalangan ilmuwan/cendekiawan dalam mengungkapkan perasaan, gagasan, dan pikiran tentang

ilmu, teknologi, dan seni? Untuk itu, perlu dilakukan penelitian keperluan masyarakat akan istilah dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Selain itu, penelitian juga perlu dilakukan terhadap hasil pengembangan istilah Mabbim yang telah dimasyarakatkan di kalangan pengguna bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Penelitian itu juga harus menangani sikap bahasa masyarakat terhadap istilah berbagai bidang ilmu yang telah dihasilkan Mabbim. Maka, pengembangan istilah harus terus dilakukan secara berkelanjutan demi meningkatkan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dan bahasa Melayu.

Selain terus memutakhirkan hasil pengembangan istilah, Mabbim harus terus menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di berbagai kalangan, khususnya di kalangan ilmuwan, sastrawan, penulis, penerjemah, pendidik (guru/dosen), dan media massa cetak/elektronik. Penggalakan penggunaan istilah yang telah diciptakan juga harus menjangkau tempat-tempat umum atau ruang publik. Penggunaan kata/istilah asing pada ranah seperti itu menjadi lambang pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sudah waktunya penggunaan bahasa pada ranah seperti itu ditertibkan agar mencerminkan budaya masyarakat Indonesia/Melayu yang menunjukkan identitas bangsa.

MBIM/MABBIM 35 TAHUN

Prof. Emeritus Dato' Dr. Asmah Haji Omar

Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu, Malaysia

1. Pengantar

Akhir tahun 2007 cukuplah usia MABBIM 35 tahun. Sejarahanya bermula pada penghujung tahun 1972, selepas tercapainya kata sepakat dalam hal ejaan bersama yang dilancarkan serentak di Kuala Lumpur dan Jakarta pada 16 Ogos 1972. Ketika itu tidak ada satu badan yang tetap yang mewakili bentuk kerjasama kebahasaan antara Malaysia dengan Indonesia. Yang ada hanya jawatankuasa dan panitia yang dengan penuh dedikasi bekerja mencapai satu sistem ejaan yang akhirnya boleh dikatakan milik bersama Malaysia dan Indonesia.

Kewujudan ejaan bersama 1972 itu telah mendorong dan mewajarkan satu badan yang dapat menaungi segala usaha yang membawa kepada kerjasama kebahasaan antara kedua-dua buah negara berdaulat yang mempunyai banyak persamaan, dari segi bahasa dan budaya. Bahkan satu hal yang tidak dapat dinafikan ialah silsilah kekeluargaan yang tindih bertindih antara peribumi kedua-dua buah negara dalam kawasan geolinguistik dan geobudaya yang sama. Sebelum pembahagian kawasan ini kepada kawasan takluk Belanda dan British dalam abad ke-19, tidak ada sempadan antara pulau-pulau dan Semenanjung Tanah Melayu. Konsep imigrasi tidak wujud, dan peribumi bebas antara pulau-pulau dan Semenanjung.

2. Perjuangan Kedaulatan Sebagai Benih Penyatuan Bahasa

Seperti yang disebutkan di atas, penyeragaman ejaan antara Malaysia dan Indonesia membawa kepada kerjasama yang lebih terarah dan bersistem antara kedua-dua buah negara berkenaan. Tetapi adakah itu yang menjadi matlamat utamanya?

Penyatuan ejaan dan kemudiannya penyeragaman pedoman pembentukan istilah dan hasil kerjasama kebahasaan seterusnya, walaupun mempunyai tujuan tersendiri, sebenarnya merupakan jalan ke arah matlamat yang lebih ulung, iaitu matlamat merapatkan semula alam Melayu yang dahulunya tidak ada sempadan politik. Bukan itu sahaja, bahkan berkurun-kurun lamanya sudah terjalin pertalian darah antara keluarga sebelah menyebelah Selat Melaka dan Selat Jawa. Dan jalinan muhibah tidak pernah putus-putus melalui kunjung mengunjung antara sahabat sama ada dengan tujuan perniagaan, pelancongan, memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan, atau semata-mata bertamu untuk bersama-sama ahli keluarga.

Pembahagian alam Melayu oleh dua kuasa Eropah, British dan Belanda, dalam abad ke-19, yang masing-masingnya dengan gaya penjajahan yang tersendiri, telah mewujudkan satu jurang mental antara rakyat di bumi Indonesia dengan rakyat di bumi Malaysia. Dengan sistem pemerintahan, khususnya dari segi pendidikan yang diperolehi daripada penjajah masing-masing, penglihatan dunia (*world-view*) rakyat kedua-dua buah negara itu memperlihatkan titik-titik perbezaan yang sangat jelas di sana sini, walaupun tidak pada keseluruhannya.

urang mental ini tidak begitu ketara antara orang-orang Brunei dengan orang-orang Malaysia. Sistem penjajahan yang sama yang dilalui oleh kedua-dua buah negara berkenaan sebenarnya telah mendekatkan rakyat negara-negara yang berjiranan itu, khususnya melalui sistem pendidikan yang menggunakan acuan yang sama, serta juga perjalanan ulang-alik antara sempadan negeri yang dipermudahkan oleh pemerintah Inggeris semasa mereka berkuasa.

Bahkan setelah Malaya sudah merdeka dalam tahun 1957, dan Brunei masih menunggu 28 tahun lagi untuk mendapat kemerdekaannya, hubungan akrab antara Malaya/Malaysia dan Brunei dapat diteruskan secara rasmi dan tidak rasmi, sungguhpun ada kalanya tali persahabatan menjadi lemah akibat keadaan politik semasa.

Perjuangan rakyat Indonesia melepaskan diri mereka dari belenggu penjajahan yang berakhir dengan kemenangan dalam bentuk negara Indonesia yang berdaulat telah meninggalkan kesan mental yang mendalam bagi orang Melayu Malaya dan Singapura, sehingga mereka bukan sahaja mengagumi saudara-saudara di Indonesia, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai model perjuangan mereka mencapai kemerdekaan. Dalam konteks memperdekatan rakyat Malaysia dengan Indonesia, yang penting ialah persamaan dalam perjuangan yang berasaskan bahasa dan budaya. Kekaguman rakyat Malaya terhadap Indonesia ialah berhasilnya Indonesia mengambil bahasa Melayu yang bertaraf *lingua franca* sebagai bahasa persatuan, dan menaikkan tarafnya menjadi bahasa negara, yang kemudian menjadi bahasa rasmi dalam semua urusan kenegaraan, dan serentak dengan itu sebagai bahasa ilmu.

Tetapi, terdapat juga perbezaan dalam perjuangan antara kedua-dua buah negara, yang membawa sikap yang berbeza terhadap bahasa kuasa yang menjajah mereka. Seperti yang diperlihatkan oleh sejarah, persamaan dalam perjuangan di Malaysia dan Indonesia tidak sama dari segi fizikalnya, kerana rakyat Malaya dalam keadaan sosiopolitik yang berbeza dengan rakyat Indonesia, telah dapat memperjuangkan kemerdekaan melalui rundingan dan diplomasi, tanpa adanya pertentangan bersenjata. Perbezaan ini serba sedikit membawa kepada perbezaan antara sikap masing-masing terhadap bahasa yang dahulunya merupakan bahasa penjajah. Sikap orang Malaysia terhadap bahasa Inggeris jauh bezanya dengan sikap orang Indonesia terhadap bahasa Belanda. Keadaan ini mahu tidak mahu mempengaruhi arah perkembangan bahasa di

Malaysia, bahkan hingga sekarang ini apabila bahasa Inggeris sudah berkembang menjadi bahasa utama dunia.

3. Sejarah Awal Perjuangan Bahasa di Malaysia

Semasa masih dalam pemerintahan British, pendidikan persekolahan yang menggunakan bahasa Melayu di Malaya, dibataskan kepada sekolah rendah (sekolah dasar) sahaja. Pada peringkat menengah, pendidikan yang mungkin ditempuhi oleh rakyat Malaya adalah di sekolah Inggeris, dan bahasa Melayu diajar sebagai satu mata pelajaran sahaja. Walaupun dalam keadaan demikian, orang Melayu tidak lupa pada tradisi budaya tinggi yang sudah ada dalam peradabannya sebelum datangnya penjajah. Cara mengingat tradisi ini dan mengingatkan masyarakat akan adanya tradisi itu, antara lain, adalah dengan mengadakan kumpulan-kumpulan seminat (*interest group*). Dari kumpulan-kumpulan yang seperti ini, maka timbullah persatuan-persatuan di negeri-negeri Melayu, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura, yang mengadakan berbagai-bagai kegiatan yang berteraskan bahasa, sastera dan budaya.

Proses-proses politik di seluruh dunia yang membawa kebebasan kepada wilayah-wilayah penjajahan selepas Perang Dunia Kedua dengan kebangkitan nasionalisme di negeri-negeri yang dijajah di Timur dan di Barat, telah memberi kesedaran kepada persatuan-persatuan yang disebut di atas itu dan juga kepada rakyat Malaya bahawa kemerdekaan tanah air mereka juga menjelang tiba. Maka persatuan-persatuan ini bersepakat mendirikan satu badan atau majlis yang dapat mengetengahkan aspirasi kebangsaan mereka melalui bahasa dan budaya, agar aspirasi ini menjadi dasar bahasa dan budaya apabila Malaya merdeka kelak.

Dengan kesedaran itu, mereka mula memikirkan satu ikatan yang bersepadu dalam perjuangan mereka, kerana bersatu teguh, bercerai roboh. Maka pada 12 dan 13 April 1952, dengan sokongan dan bimbingan dari ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50), persatuan-persatuan berkenaan telah mengadakan pertemuan di Singa-

pura, pertemuan yang kemudiannya dikenal sebagai Kongres Bahasa Pertama. Kongres pertama ini disusuli oleh Kongres Bahasa Ke-2 yang diadakan di Seremban dalam tahun 1954, dan kemudiannya kongres ketiga yang diadakan di Singapura dalam tahun 1956. Perwakilan dari Indonesia hadir dalam ketiga-tiga kongres berkenaan. Bahkan kongres ketiga dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ketika itu, iaitu Profesor Dr. Prijono.

Kongres pertama memperkatakan juga hal-hal seni dan budaya Melayu, tetapi yang lebih banyak diperkatakan ialah soal bahasa. Oleh kerana itu, tidak hairanlah jika kongres kedua dan ketiga khusus memperkatakan soal bahasa. Oleh kerana Malaya belum lagi merdeka, perbincangan dan keputusan mengenai bahasa lebih bertumpu pada hal-hal korpus bahasa, seperti memilih sistem tulisan utama, iaitu tulisan Rumi (sedangkan bahasa Melayu ketika itu ditulis dalam dua jenis aksara, tulisan Jawi dan Rumi). Tulisan Rumi dalam pandangan Kongres dapat menjadi asas pembinaan sistem ejaan yang dianggap lebih "ilmiah", berbanding dengan sistem ejaan yang sedia ada, iaitu ejaan sekolah atau dikenal juga sebagai ejaan Za'ba. Dari sistem ejaan yang lebih ilmiah itu dapatlah dibina istilah-istilah yang dapat memenuhi keperluan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh ketiga-tiga kongres berkenaan menggambarkan keinginan menjadikan perkembangan kebahasaan yang berlaku di Indonesia sebagai model pembinaan bahasa yang akan berlaku di Malaya. Kongres, dengan bermodelkan Indonesia, memilih tulisan Rumi sebagai sistem tulisan utama, sungguhpun pada masa itu tulisan Jawi lebih banyak digunakan untuk menulis bahasa Melayu berbanding dengan tulisan Rumi. Pemilihan tulisan Rumi di atas tulisan Jawi dianggap sebagai satu proses pemodenan bahasa, yang dapat memenuhi keperluan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa moden, khususnya bahasa yang menjadi pengantar wacana ilmiah, dan Indonesia telah membuktikan hakikat ini.

Satu lagi model yang diambil dari Indonesia ialah model Balai Pustaka di Jakarta, sebagai badan penerbitan bahasa dan sastera dalam bahasa Indonesia. Balai Pustaka telah dikagumi para pejuang bahasa dan sastera Melayu, termasuk tokoh bahasa Melayu yang ulung, iaitu Zainal Abidin Ahmad, atau lebih dikenal sebagai Za'ba. Kongres telah mencita-citakan sebuah badan seperti itu dan nama yang dicadangkan adalah juga Balai Pustaka. Badan ini telah ditubuhkan dalam tahun 1956, satu tahun sebelum kemerdekaan Malaya, dengan nama Dewan Bahasa dan Pustaka, untuk menjalankan dua jenis tugas, iaitu sebagai penerbit dan juga sebagai badan pembina bahasa dan sastera. Di Indonesia, kedua-dua tugas ini dijalankan oleh dua badan secara berasingan, iaitu Balai Pustaka sebagai penerbit, sedangkan tugas pembinaan bahasa dijalankan oleh Lembaga Bahasa Nasional, yang sekarang ini dikenal sebagai Pusat Bahasa Indonesia.

4. Diplomasi Bahasa

Yang dimaksudkan dengan diplomasi bahasa di sini ialah hubungan muhibah antara negara yang menjadikan bahasa sebagai peranti dalam mencapai matlamat-matlamat budaya, bahkan juga matlamat kebajikan politik dan ekonomi. Kita sudah melihat bahawa benih-benih diplomasi sudah pun disemai sebelum Malaya merdeka, tetapi hubungan diplomasi yang rasmi tidak dapat diadakan antara bangsa yang berbeza taraf, yakni antara yang sudah merdeka dengan yang masih dijajah. Hubungan diplomasi antara dua badan yang tidak setaraf itu hanya dapat diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan yang bersifat ilmiah atau separuh ilmiah. Keadaan yang seperti ini juga berlaku ketika Brunei Darussalam masih merupakan tanah jajahan British, tetapi ingin menyertai majlis bahasa, yang ketika itu dikenal sebagai Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Diplomasi yang ditunjukkan oleh badan ini hanya setakat mengundang Brunei sebagai pemerhati pada awal tahun 1980-an

dan ini berterusan sehingga tahun 1985, apabila Brunei sudah merdeka, dan diterima masuk sebagai anggota penuh badan ini. Kemasukan Brunei itu mewajarkan pemberian nama baru kepada badan berkenaan, iaitu Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM).

Diplomasi bahasa khususnya antara Malaysia dengan Indonesia mempunyai beberapa pewujudan, seperti yang dibincangkan di bawah ini.

Menanam Etos Mendekatkan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia

Apabila Malaya mencapai kemerdekaan, diplomasi bahasa yang sudah disemai sebelum ini mulai bertunas. Sebagai menyambut kemerdekaan Malaya, Indonesia telah menghadiahkan lima biasiswa kepada pelajar Malaysia untuk mengikuti program ijazah dalam bahasa dan kesusasteraan Indonesia di Universitas Indonesia dalam tahun 1958 (dan saya salah seorang yang menerima biasiswa itu). Ini menggambarkan keprihatinan Indonesia terhadap cita-cita rakyat Malaysia memartabatkan bahasa Melayu, dan mungkin juga di sebalik itu sudah tersemai harapan mendekatkan bahasa kedua-dua buah negara berkenaan.

Inilah permulaan pengajian rakyat Malaya di universiti-universiti pemerintah di Indonesia, khususnya dalam bahasa dan sastera Indonesia, dan mereka kemudian disusuli oleh kumpulan-kumpulan pelajar lain bukan sahaja untuk pengajian bahasa dan sastera tetapi juga untuk bidang-bidang ilmu yang lain. Sebelum itu pun sudah ada pelajar-pelajar Malaya yang belajar secara bersendirian di institusi-institusi agama Islam di Pulau Jawa dan Sumatera, dan pulang ke tanah air sebagai guru dan pemimpin agama.

Mesyuarat Ejaan

Hubungan dua hala antara Malaya dan Indonesia mengenai penyatuan ejaan sudah bermula pada awal kemerdekaan Malaya. Perjanjian Persahabatan antara kedua-dua buah negara berkenaan ditandatangani pada 17 April 1959 oleh Dato' Abdul Razak bagi pihak Malaya dan Ir. Djuanda bagi pihak Indonesia. Perkara/Pasal 6 dalam perjanjian berkenaan khusus memperkatakan kerjasama kebahasaan antara Malaya dan Indonesia. Oleh kerana ejaan dan juga gaya wacana berbeza, maka masing-masing negara mempunyai versinya sendiri yang sama dari segi kandungannya.

Versi Malaya: (Perkara 6)

Kedua Pihak Tertinggi yang Mengikat Perjanjian sadar akan hal bahawa bahasa Melayu dan Indonesia ialah berasal sama, akan berusaha dengan jalan kerjasama, bantu membantu dan perundingan untuk menchapai persamaan saberepa luas yang boleh dalam perkembangan dan penggunaannya.

Versi Indonesia: (Pasal 6)

Kedua Pihak Agung yang Berdjandji, sadar akan kenyataan bahwa Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia berasal sama, akan berusaha dengan tjara kerjasama, bantu-membantu dan perundingan-perundingan, untuk mentjapai persamaan seluas-luasnja dalam pemakaian dan perkembangannya.

Oleh kerana dalam tahun 1959 bahasa Melayu di Malaya belum mantap sebagai bahasa rasmi, dan bahasa Inggeris masih merupakan salah satu dari dua bahasa rasminya, maka terdapat juga versi bahasa Inggeris bagi perjanjian berkenaan di bawah *Treaty of Friendship Between the Federation of Malaya and the Republic of Indonesia*, dalam Article 6, yang berbunyi seperti berikut:

The two High Contracting Parties, conscious of the fact that Malay and Indonesian languages have a common origin, shall strive through co-operation, collaboration and consultation to achieve the greatest possible uniformity in their use and development.

Berikutan dengan perjanjian persahabatan ini, maka dalam bulan Disember 1959, berlangsunglah perundingan yang dimaksudkan dalam perjanjian itu, di Jakarta, untuk menyelaraskan ejaan bahasa Melayu di Malaya dengan bahasa Indonesia. Jawatankuasa pihak Malaysia diketuai oleh Tuan Syed Nasir Ismail, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka ketika itu, dan ketua bagi pihak Indonesia ialah Profesor Dr. Slametmuljana. (Untuk perbincangan lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Asmah Haji Omar, *Muafakat Bahasa: Sejarah MBIM/MABBIM Sebagai Pembina Bahasa*, DBP, Kuala Lumpur, 2004: Bab 5).

Mesyuarat selama empat hari di Gedung Proklamasi, Jakarta, bersepakat mengenai satu sistem ejaan bersama, yang dikenal sebagai Ejaan Melindo. Bahkan keseluruhan sistem ejaan berkenaan siap digubal, dan menunggu masa dan ketika yang baik untuk diumumkan kepada rakyat, dan terus digunakan sebagai ejaan rasmi. Tetapi, sebelum sebarang langkah diambil ke arah itu, keadaan politik alam Melayu sudah menjadi tidak menentu dengan tersemayunya bibit-bibit konflik pada awal dekad 1960-an, apabila munculnya gagasan penubuhan negara Malaysia yang menyatukan Malaya, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak, yang semuanya pernah merupakan tanah jajahan British. Pertentangan hebat dari Indonesia yang ketika itu di bawah pemerintahan Presiden Soekarno terhadap gagasan itu telah menjejaskan hubungan muhibah antara Malaysia dan Indonesia. Maka berlakulah konflik antara kedua-dua buah negara itu dalam tahun 1963, satu konflik yang lebih dikenal sebagai *Konfrantasi*. Maka cita-cita penyatuan ejaan terkubur, yak-

ni semasa berlangsungnya Konfrantasi, dari September 1963 hinggalah awal tahun 1966.

Ejaan Sebagai Acara Penyelesaian Konflik

Konfrantasi berakhir apabila Indonesia mendapat pemerintahan baru di bawah Presiden Soeharto dalam bulan September 1965. Maka bermulalah proses ke arah memulihkan semula hubungan diplomasi antara kedua-dua buah negara berkenaan. Yang menarik ialah sebelum adanya sebarang rundingan dalam bidang apa pun juga, langkah “pemula bicara perdamaian” berupa “bicara ejaan”.

Dato’ Dr. Haji Hassan Ahmad, yang kemudiannya Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dan anggota MBIM/MABBIM, merupakan salah seorang dari tiga anggota rombongan yang membawa “pemula bicara kebahasaan”, sebagai salah satu acara ke arah penyelesaian konflik. Menurut beliau, pada awal tahun 1966, rombongan itu telah ditugaskan oleh Tun Abdul Razak Hussein yang ketika itu Timbalan Perdana Menteri Malaysia, untuk pergi ke Jakarta dalam usaha menghidupkan semula rundingan ejaan bersama yang telah terbengkalai akibat konfrantasi. Rombongan Malaysia itu diketuai oleh Tuan Syed Nasir Ismail (yang kemudiannya Tun Syed Nasir Ismail), yang ketika itu Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Anggota ketiga dalam rombongan ini adalah Encik Muhammad Yunus Maris, pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Tun Abdul Razak telah mendapat kerjasama Tun Adam Malik, Menteri Luar Indonesia ketika itu, untuk memudahkan perjalanan rombongan ini ke Jakarta.

Di Jakarta, rombongan Malaysia telah disambut dengan mesra oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Profesor Dr. Prijono, berserta dengan Tim Ahli Bahasa KOTI (Komando Tertinggi Indonesia), yang diketuai oleh Kolonel Wahyu. Anggota-anggota Tim Ahli Bahasa KOTI antara lain terdiri daripada Bapak H.B. Jassin, Bapak Anton Moeliono, dan Ibu Rudjiati Muljadi.

Menurut Dato' Hassan, kunjungan selama tiga hari ke Jakarta itu merupakan kunjungan "bersapa-sapaan", tidak banyak yang dibincangkan mengenai sistem ejaan bersama. Menurut beliau lagi, pihak Malaysia memang tidak selesa dengan Ejaan Melindo, khususnya berhubung dengan lambang-lambang fonetik yang diambil dari *International Phonetics Alphabet (IPA)*. Ini tidak bermakna bahawa Malaysia mencuci tangan dalam hal ini kerana dalam tahun 1959 ketika sistem ini dipersetujui di Jakarta, Malaya juga bertanggungjawab dalam penggubalannya. Kebetulan ada ahli-ahli dalam jawatankuasa pihak Malaysia ketika itu yang menyokong penggunaan lambang-lambang berkenaan atas alasan lambang-lambang itu "saintifik". Kegelisahan Malaysia terlerai dengan pendirian anggota-anggota Tim Ahli Bahasa Indonesia yang juga sependapat dengan mereka.

5. Lahirnya Prototaip Ejaan Bersama

Kata orang tua-tua, lulus jarum lulus kelindan. Pemula bicara sudah berjalan dengan lancar, dan berlakulah pula kunjungan balas dari pihak Indonesia ke Malaysia pada bulan Jun 1967. Pihak Indonesia diwakili oleh panitia yang lebih besar daripada yang bermesyuarat di Jakarta pada tahun 1966, dan demikian juga halnya dengan pihak Malaysia. Setelah bermesyuarat selama tiga hari di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, maka pada 27 Jun 1967 tercapailah satu persefahaman mengenai ejaan bersama Malaysia-Indonesia. Jika diteliti sistem ejaan yang disepakati, yang boleh kita rujuk sebagai Ejaan 1967, maka sistem itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan Ejaan Melindo, dan dengan itu lebih mudah diterapkan. Menurut para penggubalnya, ejaan ini praktis, ekonomis dan ilmiah.

Berdasarkan Persefahaman 1967 itu, terdapat lima faktor yang mendasari sistem berkenaan, iaitu:

- (1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan
Perkembangan wasasan ilmiah, terutama dalam
bidang ilmu bahasa yang memberikan patokan-
patokan
- (2) Kekurangan-kekurangan yang masih terdapat
dalam ejaan sekarang dalam mencerminkan
bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.
- (3) Perlunya kodifikasi dalam pemakaian huruf dan
tanda baca, yang dapat berlaku untuk kedua-
dua buah negara Malaysia dan Indonesia.
- (4) Peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu
dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara dan di
seluruh dunia.
- (5) Pentingnya pengajaran membaca dan menulis.

Sungguhpun hubungan diplomatik sudah pulih dan sistem ejaan bersama yang praktis sudah ada, tetapi masing-masing negara masih tetap dengan ejaan yang sedia ada tanpa sebarang perubahan. Pada mulanya, kelihatan seolah-olah ejaan ini juga akan terpendam begitu sahaja. Sebenarnya, pelaksanaannya tidak dapat dijalankan disebabkan adanya bantahan pihak penerbit Indonesia, yang diketuai oleh Ikatan Penerbit Indonesia. Secara objektif, kita dapat melihat kegelisahan mereka, disebabkan mereka harus mengalami satu keadaan perubahan kepada sistem ejaan baru, sedangkan ejaan di Indonesia secara relatif boleh dikatakan sudah mantap.

Lain halnya di Malaysia yang sedang mengalami wujudnya berbagai-bagai sistem ejaan yang masing-masing muncul sebagai alternatif kepada ejaan sekolah. Sungguhpun di sekolah, ejaannya sudah mantap sekian lama, tetapi di luar pekarangan sekolah terutama sekali dalam percetakan dan media, banyak perubahan berlaku berdasarkan cita rasa penulis atau penerbitnya. Dengan pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan di sekolah dan universiti, yang mewajibkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

untuk semua mata pelajaran, termasuk Matematik dan Sains, maka ejaan sekolah dianggap tidak dapat memenuhi keperluan menulis dan mengeja istilah-istilah ilmu yang diserapkan daripada bahasa Inggeris. Jangka masa menanti itu terlalu lama sehingga masing-masing institusi yang berkepentingan melakarkan ejaan sendiri. Dari situ terbitlah ejaan Dewan Bahasa, ejaan Universiti Malaya, ejaan Universiti Kebangsaan Malaysia, ejaan OUP (Oxford University Press), dan gabungan ejaan-ejaan ini.

6. Ejaan Bersama Menjadi Realiti

Pada awal tahun 1972, Dewan Bahasa dan Pustaka yang diketuai oleh Pengarahnya ketika itu, iaitu Tuan Haji Sujak bin Rahiman, telah membentuk satu jawatankuasa *ad hoc* dengan tugas khusus mengkaji dan menilai ejaan yang disepakati dalam tahun 1967. Jawatankuasa ini terdiri daripada Tuan Haji Sujak sendiri sebagai pengerusi, Timbalannya, iaitu Tuan Haji Hassan Ahmad (sekarang Dato' Dr.), Encik Alias Shamsuddin dari Institut Teknologi Malaysia (ITM), Dr. Abdullah Hassan dari Universiti Sains Malaysia (USM), Encik Kamaluddin Muhammad (Keris Mas) dari Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya sendiri dari Uinversiti Malaya. Kami bermesyuarat selama dua hari dua malam di salah sebuah hotel di Genting Highlands. Hasil penilaian dan cadangan jawatankuasa berkenaan telah dihantar ke Jakarta untuk makluman dan penilaian panitia di sana. Tidak banyak pindaan yang dikemukakan, dan dengan itu dapatlah teks ejaan bersama yang disepakati sepenuhnya oleh kedua-dua belah pihak diterima untuk diumumkan kepada masyarakat.

Saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Satu tarikh yang baik telah disetujui untuk pengumuman serentak, di Jakarta dan di Kuala Lumpur. Tarikh itu adalah 16 Ogos 1972, dan 16 Ogos dipilih kerana tarikh itu adalah sehari sebelum ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ketika itu tidak ada perbezaan waktu antara Jakarta

dengan Kuala Lumpur kerana perbezaan waktu baru berlaku dalam tahun 1982 apabila Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu menganjak jarum jam Semenanjung Malaysia ke belakang selama satu jam supaya sesuai dengan waktu Sabah dan Sarawak. Oleh kerana itu, tepat pukul 12.00 tengah hari di Jakarta dan juga di Kuala Lumpur, pada 16 Ogos 1972, ejaan bersama bagi Malaysia dan Indonesia diisytiharkan: di Jakarta oleh Presiden Soeharto, dan di Malaysia oleh Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Di Malaysia, ejaan itu dikenal sebagai Ejaan Rumi Baru Bahasa Malaysia, dan di Indonesia sebagai Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.

Seperti yang telah terbukti dalam sejarah sistem ejaan bersama ini, dari semasa ke semasa telah berlaku tinjauan semula dan hasil daripada itu ialah pindaan-pindaan tertentu. Tetapi pindaan itu tidak melibatkan hal-hal yang dasar, yang tetap bertahan dari dahulu hingga sekarang. Yang dimaksudkan dengan hal-hal yang dasar ialah yang berupa lambang-lambang grafem, kerana dalam penyeragaman ejaan antara dua buah negara itu terdapat pewujudan beberapa grafem baru dan serentak dengannya pula ialah pengguguran grafem-grafem lama. Hal-hal dasar juga merujuk kepada pemantapan penggambaran sistem fonologi dalam penulisan suku kata dan kata, terutama sekali bagi kata-kata yang memang asal Melayu. Hal-hal yang bukan dasar merupakan cara menulis kata-kata asing apabila kata-kata itu hendak diserap ke dalam bahasa Melayu/ Indonesia, serta juga cara menulis singkatan dan akronim.

Serentak dengan perisytiharan ejaan bersama itu, dimaklumkan kepada orang ramai bahawa kedua-dua buah negara memberi masa peralihan lima tahun dari tarikh perisytiharan itu. Dengan masa peralihan, dimaksudkan bahawa dalam lima tahun ke hadapan pengguna bahasa hendaklah berusaha membiasakan diri dengan sistem ejaan baru, dan institusi pendidikan dan pentadbiran serta pihak media hendaklah mula melaksanakan sistem ejaan berkenaan. Sebarang kesilapan ejaan yang berlaku dalam proses

pembiasaan itu boleh dimaafkan. Dasar ini diterjemahkan sebagai kelenturan dalam menegakkan sesuatu panduan baru. Tidaklah mungkin rakyat yang sudah biasa dengan sesuatu sistem ejaan berdekad-dekad lamanya dapat dalam sekelip mata bertukar kepada sistem yang lain, yang baru sama sekali bagi mereka, tanpa melakukan kesilapan. Jangka masa lima tahun itu dianggap memadai sebagai jangka masa membiasakan diri dengan sistem ejaan baru itu.

Ungkapan Inggeris *grace period* tepat menggambarkan masa peralihan yang disebut itu, kerana dalam sesuatu *grace period*, sesuatu kesilapan segera dimaafkan. Jika sebelum adanya ejaan Rumi baru, keadaan ejaan di Malaysia memperlihatkan penggunaan ejaan yang bercampur aduk, maka demikianlah juga halnya dalam keadaan peralihan. Cuma kekacauan dalam *grace period* itu akhirnya membawa kepada ketertiban. Dan jelaslah bahawa pada akhir tahun kelima, para pengguna bahasa Melayu di Malaysia sudah menjadi biasa dengan pembaharuan yang berlaku dalam cara mereka menulis bahasa mereka. Tentu sahaja keadaannya tidak sempurna seperti yang diinginkan, dan majlis-majlis taklimat berhubung dengan ejaan baru itu tidak putus-putus diadakan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka, serta juga universiti-universiti tempatan.

7. Lahirnya MBIM

Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia atau MBIM lahir selepas pelaksanaan ejaan bersama. Mungkin gagasannya sudah sedia ada beberapa lama sebelum itu atau ketika menyediakan ejaan bersama, tetapi pewujudannya dijadikan realiti pada 27 Disember 1972, apabila panitia kebahasaan dari Indonesia yang diketuai oleh Ibu Rudjiati Muljadi mengunjungi Malaysia. Mesyuarat yang berlangsung selama tiga hari itu diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, khusus dengan tujuan memberi pemaujudan kepada

da badan ini. Selain daripada mengesahkan penerimaan badan berkenaan, mesyuarat dalam bulan Disember 1972 yang seterusnya dikenal sebagai Sidang I MBIM juga melakarkan tatacara kerja seterusnya.

Dato' Hussein Onn yang ketika itu Menteri Pelajaran Malaysia telah merasmikan mesyuarat berkenaan. Jawatankuasa pihak Malaysia terdiri daripada ahli-ahli yang ikut serta dalam penyediaan ejaan di Genting Highlands awal tahun berkenaan, diketuai oleh Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Tuan Haji Sujak Rahiman. Jawatankuasa ini kemudian diberi nama Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia (JKTBM), yang mempunyai urus setia di Dewan Bahasa dan Pustaka, tetapi yang secara langsung bertanggungjawab kepada Menteri Pelajaran Malaysia. Semua ahli dilantik oleh Menteri Pelajaran (dengan cadangan dari Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka), selama tiga tahun bagi tiap satu pelantikan. Pihak Indonesia juga membentuk jawatankuasanya sendiri yang diberi nama sesuai dengan kebiasaan di Indonesia, iaitu Panitia Kerjasama Kebahasaan (PAKERSA). Ini bermakna bahawa tiap-tiap negara mempunyai jawatankuasanya sendiri, dan majlis baru wujud dalam erti kata yang sebenarnya apabila kedua-dua jawatankuasa itu bersidang.

Dari awal lagi sudah dipersetujui bahawa sidang majlis akan diadakan dua kali dalam satu tahun, yakni sekali di Malaysia dan sekali di Indonesia. Oleh kerana sidang pertama sudah diadakan dalam bulan Disember tahun 1972 di Malaysia, maka tahun 1973 bermula dengan sidang kedua di Indonesia. Berhubung dengan tarikh bagi sidang-sidang itu, telah dicapai kata sepakat bahawa sidang di Indonesia diadakan sekitar bulan Mac setiap tahun, dan di Malaysia sekitar bulan Sepetember hingga November, yakni dengan memberi jarak sekurang-kurangnya enam bulan di antara kedua-duanya. Indonesia telah mensyaratkan tarikh sebelum akhir Mac disebabkan tahun kewangan Indonesia ialah dari bulan April hingga Mac, sedangkan di Malaysia tahun kewangannya ialah Januari-

Disember. Kepatuhan kepada tarikh-tarikh itu memudahkan perancangan belanjawaan.

8. Lahirnya MABBIM

Seperti yang sudah disebut di atas, MBIM berubah wajah menjadi MABBIM dalam tahun 1985. Kemasukan Brunei ke dalam majlis bahasa ini bersumber pada permintaan pihak Brunei sendiri, kerana minat untuk bersama dengan Malaysia dan Indonesia sudah pun tertanam di sanubari pejuang bahasa di Brunei bahkan sebelum tercapainya kemerdekaan Negara Brunei Darussalam. Risik-risik pertama berlaku dalam tahun 1978, apabila saya sebagai Pengarah Pusat Bahasa Universiti Malaya sedang mengelolakan Seminar Penterjemahan di Rumah Universiti, Universiti Malaya. Ketika itu saya dikunjungi oleh Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato' Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri (sekarang Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja) berserta dengan Tuan Haji Ahmad Kadi, yang kemudiannya Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan ahli MABBIM. Mereka meminta jasa baik saya menyampaikan hasrat Brunei menyertai badan yang dikenal sebagai MBIM, memandangkan bahawa Brunei juga akan melaksanakan dasar bahasa kebangsaan apabila merdeka nanti. Mereka memilih saya sebagai orang yang "melobi" ahli-ahli lain, kerana secara kebetulan saya sudah pun berkenalan dengan Pehin yang sering datang ke Universiti Malaya untuk berbagaibagai urusan.

Sebenarnya MBIM sudah pun mengambil sikap terbuka dalam mengikutsertakan "Negara-negara berbahasa Melayu di Asia Tenggara" sebagai pemerhati (Keputusan Sidang Ke-10 MABBIM pada 2-8 Oktober 1977). Hasrat Brunei itu dibincangkan dalam Sidang MBIM dengan teliti disebabkan status Brunei ketika itu yang masih di bawah pemerintahan British. Akhirnya tercapailah kata sepakat antara Malaysia dengan Indonesia supaya Brunei diundang menghadiri sidang-sidang MBIM sebagai pemerhati. Ini bermakna

bahawa setiap kali diadakan Sidang MBIM, maka pihak negara yang menjadi tuan rumah harus menghantar undangan kepada Brunei melalui Kementerian Luar Negeri masing-masing. Surat dihantar kepada pemerintah kolonial British ketika itu, dan jawapan yang didapati adalah juga daripada pemerintah berkenaan melalui saluran yang sama. Brunei mulai hadir sebagai pemerhati Sidang MBIM pada Sidang Ke-18 yang diadakan di Palembang, 28 Mac–3 April 1982.

Brunei mendapat kemerdekaan dari British dalam bulan Januari 1984, dan diundang menjadi anggota penuh badan kebahasaan antara negara-negara Melayu itu. Dalam pada itu, Malaysia dan Indonesia berbincang mengenai nama baru bagi badan tersebut dengan masuknya Brunei. Dan nama berkenaan hendaklah dapat menjadi asas pembentukan akronim bagi badan yang mewakili ketiga-tiga buah negara itu. Maka lahirlah nama Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, dan akronimnya ialah MABBIM. Sidang MABBIM pertama, yang juga bermakna kehadiran Brunei untuk kali pertama sebagai anggota penuh, ialah Sidang Ke-24 yang diadakan di Jakarta.

Untuk memberi satu kewujudan yang jelas bagi badan ini, maka telah dihasilkan satu piagam dalam tahun 1986 yang menetapkan dasar dan objektif serta fungsi badan berkenaan. (Asmah Haji Omar 2004, hlm. 153–155).

9. Organisasi MBIM/MABBIM

Oleh kerana MABBIM merupakan entiti yang berbeza sedikit dengan MBIM, maka organisasi kerjanya memerlukan sedikit pinjaan. Sebelum penyertaan Brunei dalam MABBIM, Malaysia dan Indonesia sudah pun memikirkan untuk mengadakan sidang majlis sekali setahun sahaja memandang bahawa pedoman pembentukan istilah sudah pun mantap dan sudah diterapkan dengan baik. Pakarpakar boleh mengerjakan pencarian padanan istilah dan ber-

utus-utusan antara kedua-dua buah negara. Bahkan dalam tahun 1983 diadakan satu sidang majlis sahaja dalam pertengahan tahun di Jakarta.

Apabila Brunei menyertai MABBIM dalam tahun 1985, rancangan sidang sekali setahun kian menjadi kenyataan. Cuma, atas sebab-sebab tertentu rancangan ini baru dijalankan dalam tahun 1987. Brunei Darussalam menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya dalam tahun 1988 bagi Sidang Ke-27, dan bermulalah pusingan giliran seperti yang ada sekarang. Jawatankuasa pihak Brunei yang berperanan dalam Sidang MABBIM ialah Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam (JKTBMBD).

Pindaan pada tatacara organisasi ini terus berlaku demi mewujudkan cara kerja yang lebih efisien. Ketika masih dalam MBIM hingga kepada tahun-tahun awal MABBIM, tiap-tiap sidang majlis disertai oleh kelompok eksekutif dan juga pakar-pakar bidang dalam kelompok pengkhususannya. Dengan itu, jumlah peserta bagi setiap negara adalah paling sedikit sekitar 13 orang, yakni dua orang bagi setiap kelompok kepakaran (dan tidak lebih daripada lima bidang yang diikutsertakan), dan dua orang bagi kelompok eksekutif, serta setiausaha/sekretaris bagi tiap-tiap negara. Di samping itu, mesyuarat kelompok dihadiri juga oleh pakar bahasa yang dikenal sebagai nara sumber, dan nara sumber ini diambil dari kalangan pakar bahasa tuan rumah, sungguhpun negara tamu tidak dihalang membawa nara sumbernya sendiri.

Sidang selama lima hari itu menghasilkan senarai istilah yang dinamakan Senarai Istilah MBIM/MABBIM, yang serentak dibawa kepada kelompok eksekutif untuk persetujuannya. Kelompok inilah yang menentukan dasar MBIM/MABBIM dan menerima atau menolak usul/cadangan kelompok-kelompok pakar berhubung dengan istilah dan ejaan. Senarai istilah MABBIM tidak bermakna senarai yang menggambarkan senarai yang semuanya sama bagi semua negara MABBIM. Persetujuan bersama bermakna persetujuan untuk sama-sama menerima bentuk istilah yang sama, atau

juga sama-sama menyetujui supaya masing-masing negara memilih alternatif yang lebih lazim bagi pengguna bahasa di negaranya. Dalam hal alternatif kedua, persetujuan bersama bermakna bersetuju untuk tidak bersetuju, satu strategi yang memberi penghormatan kepada kelaziman dan tradisi, dan dengan itu mengelak konflik yang berlanjutan.

Sidang selama lima hari yang dihadiri satu kumpulan yang agak besar merupakan satu program yang meletihkan di samping merupakan beban bagi pihak yang mengurusnya. Beban ini tidak begitu terasa ketika badan ini masih berada dalam bentuk MBIM. Apabila badan ini sudah berubah menjadi MABBIM, maka bahangnya dapat dirasakan, khususnya dari segi belanjawan. Oleh kerana itu dalam sidang yang diadakan di Kuching dalam tahun 1985, disepakati satu cara kerja yang dianggap lebih memudahkan pengelolaan sidang. Berdasarkan cara kerja ini, mesyuarat kembali diadakan dua kali setahun, tetapi dengan status yang berbeza dengan yang dahulu: satu mesyuarat bagi kelompok-kelompok pakar yang akan mengerjakan hal-hal peristilahan, dan satu lagi mesyuarat yang khusus merupakan mesyuarat kelompok eksekutif. Mesyuarat kelompok eksekutif inilah yang sebenarnya dinamakan Sidang MABBIM, dan diadakan dalam bulan Mac setiap tahun. Sidang Kelompok Pakar diadakan dalam bulan September di negara yang akan menjadi tuan rumah dalam Sidang MABBIM berikutnya.

Di luar semua sidang itu, sekretariat ketiga-tiga buah negara terus berhubung satu sama lain supaya urusan-urusan majlis pada peringkat eksekutif dan kelompok pakar tetap licin, melalui telefon, emel dan surat-menyurat. Maka untuk lebih efisiennya komunikasi antara mereka, majlis bersetuju supaya diadakan juga mesyuarat sekretariat bagi tujuan ini, dan sebagai tradisinya, mesyuarat sekretariat diadakan di Indonesia.

10. Kedudukan Pemerhati

Piagam yang dipersetujui dalam tahun 1986 juga melakarkan dengan jelas kedudukan pihak pemerhati bagi sidang-sidang MABBIM. MBIM sudah mengamalkan dasar pintu terbuka bagi negara pemerhati dengan menghantar jemputan kepada Brunei dan Singapura untuk mengikuti sidang-sidangnya. Walau bagaimanapun, tidak pernah ada satu dasar dalam manamana dokumen rasmi MBIM berhubung dengan undangan dan jemputan kepada negara yang bukan anggota majlis bahasa ini.

Piagam 1986 telah dengan jelas memasukkan perkara/pasal berhubung dengan penyertaan pemerhati. Antaranya mereka boleh diundang bagi setiap kali sidang eksekutif, dan ini membawa makna bahawa status pemerhati hanya sah bagi sidang mereka diundang sahaja. Dan pemerhati boleh mengemukakan pendapat dalam sidang majlis tetapi tidak mempunyai hak bersuara. Singapura mula hadir sebagai pemerhati pada Sidang Ke-24 yang diadakan di Jakarta dalam bulan November 1985.

Setakat ini, selain daripada Singapura, tidak ada lagi negara pemerhati. Ini bermakna MABBIM tidak membuka pintunya kepada sebarang negara atau institusi luar MABBIM yang ingin menjadi pemerhati hanya sekadar mendapat maklumat tentang aktiviti MABBIM. Singapura adalah negara yang termasuk dalam lingkungan geolinguistik Melayu dan mempunyai sejarah sebagai kawasan inti budaya Melayu. Sungguhpun keadaan sosiopolitik Singapura tidak memungkinkan negara berkenaan menjadi anggota MABBIM, tetapi pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu di negara berkenaan cukup besar untuk MABBIM mempelawa ahli-ahli dari negara berkenaan ikut serta dalam sidang-sidangnya. Bahkan tanpa menjadi anggota MBIM ketika sistem ejaan Rumi baru antara Malaysia dan Indonesia disetujui, pengguna-pengguna bahasa Melayu di Singapura dengan sukarela beralih menggunakan sistem ejaan berkenaan dan meninggalkan sistem ejaan yang sedia ada.

11. Matlamat dan Cara Kerja

Matlamat mencapai kata sepakat dalam hal-hal kebahasaan merupakan satu matlamat yang mempunyai ruang lingkup yang sungguh luas, dan dengan itu perlu diwujudkan program yang menunjukkan satu rangkaian tindakan yang rapi. Dalam perkataan lain, ini memerlukan satu pendekatan pengurusan dalam memanfaatkan persumberan-persumberan yang ada.

Permulaan tindakan dengan mengadakan penyelarasan ejaan dengan sendirinya membawa kepada kelicinan pelaksanaan langkah kedua dalam rangkaian tindakan ini, iaitu penghasilan pedoman pembentukan istilah yang memungkinkan kerja-kerja pembentukan dan penyelarasan istilah dilakukan. Andai kata tidak ada keselarasan dalam ejaan, maka tidak mungkin usaha-usaha peristilahan dapat dijalankan dengan mencapai hasil seperti yang ada sekarang. Langkah ketiga dalam rangkaian tindakan ini adalah menghasilkan kamus istilah, dan dengan itu perlu diadakan panduan penyusunan kamus istilah supaya istilah-istilah MABBIM tidak hanya tinggal dalam bentuk daftar atau glosari sahaja, tetapi diberi definisi yang boleh menjadi rujukan yang lebih memanfaatkan bagi pengguna bagi berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan.

Sesudah hampir 35 tahun usia MABBIM, maka sudah sampai masanya badan ini mengambil tindakan yang lebih lanjut dalam memperkasakan bahasa bersama, iaitu dengan memberi perhatian kepada pembinaan ilmu yang memanfaatkan istilah-istilah yang sudah disepakati. Ini bermakna menghasilkan teks dan wacana dalam bahasa Melayu/ Indonesia dalam berbagai-bagai bidang ilmu sebagai bukti bahawa bahasa berkenaan bukan hanya mempunyai unsur pembinaan fikiran, tetapi juga yang dapat menggerakkan daya fikir penggunaanya membentuk perbendaharaan ilmu sebagai lambang peradaban tinggi. Sidang Ke-46 MABBIM yang diadakan di Kuala Lumpur dalam bulan Mac 2007 telah bersetuju mewujudkan program-program ke arah pencapaian matlamat ini. Pener-

bitan dalam bahasa Melayu/Indonesia, baik yang merupakan hasil tulisan asal dari pengarang sendiri mahupun yang merupakan terjemahan, serta juga kamus bidang-bidang ilmu, akan menjadi tumpuan utama dalam usaha-usaha MABBIM untuk tahun-tahun mendatang. Ini juga memerlukan satu program penyelarasan yang rapi supaya tidak berlaku pembaziran dari segi tenaga dan perbelanjaan.

Skema di bawah ini menunjukkan rantaian tindakan MBIM/MABBIM dalam mencapai matlamatnya.

Skema Rantaian Program MBIM/MABBIM

(1)	(2)	(3)	(4)
Ejaan →	<== Istilah →	<== Kamus Istilah →	<== Korpus Ilmu

Sebenarnya tidak ada sekatan yang nyata dari satu langkah ke satu langkah dalam empat langkah yang ditunjukkan dalam skema di atas itu. Tiap-tiap satu langkah itu tidak pernah ada garis penamatnya.

Dalam jadual di atas itu, langkah terdahulu membawa kepada langkah berikutnya (seperti yang diperlihatkan oleh anak panah ke kanan), dan pedoman/panduan dalam langkah itu diterapkan dalam langkah berikutnya. Tetapi dalam menerapkan pedoman/panduan, berlaku penilaian semula berdasarkan efisien tidaknya sesuatu keputusan yang ada. Jika didapati adanya keputusan yang tidak begitu baik atau sesuai apabila diterapkan dalam keadaan yang sebenarnya, maka ini menjadi maklum balas yang dibawa balik ke langkah terdahulu supaya ditinjau semula keputusan yang diambil (seperti yang ditunjukkan oleh anak panah ke kiri).

Sebagai contoh, ejaan bersama yang dicapai dalam tahun 1972 bukanlah satu keputusan yang mutlak, sungguhpun muk-tamad bagi objektif awal dalam mencapai kata sepakat antara Malaysia dan Indonesia. Penerapan keputusan-keputusan dalam Pedo-

man Ejaan apabila menggubal istilah telah mendorong perubahan-perubahan khusus dalam pengejaan kata. Di sini dikatakan perubahan khusus kerana pedoman-pedoman asas tetap seperti yang dipersetujui.

Perubahan khusus menyangkut penulisan kata-kata serapan dari bahasa-bahasa asing khususnya dalam bidang ilmu, serta juga penulisan lambang-lambang yang merupakan ciri khusus bagi bidang ilmu tertentu. Misalnya, penulisan akhiran dalam istilah-istilah bidang kimia, yang membawa ke bidang farmasi dan farmakologi, mengalami peninjauan semula beberapa kali supaya istilah yang akhirnya dihasilkan membawa konsep yang sesuai dengan pengertian yang didukungnya secara universal dan juga mematuhi peraturan sistem dan struktur bahasa Melayu/ Indonesia. Bahkan ketika ini, pihak Malaysia sedang menyemak semula pedoman ejaan yang bersifat umum, bukan sengaja mengadakan perubahan, tetapi untuk memastikan bahawa pedoman itu sesuai dengan perkembangan bahasa Melayu menurut zamannya.

Satu lagi contoh ialah pemindaan pada *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Pedoman asal ialah yang dipersetujui dalam tahun 1975, dan terus digunakan dalam pembentukan istilah antara negara-negara yang terlibat. Berikutan dengan itu, terdapat pindaan-pindaan kecil yang merupakan pengejaan kata-kata serapan tertentu, terutama sekali kata-kata yang menggunakan akhiran-akhiran khusus dalam peristilahan antarabangsa, seperti dalam bidang Kimia, Fizik, Matematik dan Geologi. Tetapi pindaan yang paling besar berlaku dalam tahun 2004 apabila panduan-panduan dalam penentuan sumber istilah dirombak dari yang sedia ada dalam pedoman asal, dan perubahan yang berlaku itu boleh dianggap sebagai langkah penting dalam perkembangan MBIM/MABBIM yang akan dibincangkan berikut ini.

Dalam pedoman asal, pencarian istilah untuk dipadankan kepada istilah asing/antarabangsa memberi keutamaan kepada sumber Melayu/ Indonesia, dan kemudian kepada sumber-sumber dari bahasa-bahasa yang serumpun. Jika sumber-sumber ini tidak

dapat memberi hasil yang memuaskan, maka hendaklah diusahakan penterjemahan kata istilah berkenaan. Jika ini juga gagal dalam hal memberi bentuk istilah yang diinginkan, maka istilah asing itu hendaklah diserapkan menurut sistem fonologi dan morfologi bahasa Melayu/Indonesia seperti yang diberi dalam *Pedoman Umum Ejaan*.

Pakar-pakar bidang yang diberi tugas menggubal istilah patuh kepada panduan yang terdapat dalam pedoman berkenaan, yakni versi 1975, sepanjang usaha mereka membina korpus istilah bahasa Melayu/ Indonesia. Hasil kerjasama peristilahan dalam bentuk senarai-senarai istilah pelbagai bidang itu menunjukkan bahawa kira-kira lebih daripada 75% istilah yang dipersetujui itu terdiri daripada istilah yang diserapkan dari bahasa asing/antarabangsa, yakni bahasa Inggeris. Ini menimbulkan pemikiran semula di kalangan tokoh-tokoh asal yang menggubal Pedoman 1975 itu. Satu kertas perbincangan telah dihasilkan oleh Profesor Anton Moeliono dan Profesor Mien Rifai untuk ditanggapi oleh pihak Malaysia dan Brunei Darussalam. Kertas ini mencadangkan supaya panduan menyerapkan istilah-istilah antarabangsa itu diutamakan, mengingat bahawa sememangnya konsep-konsep dalam ilmu-ilmu moden tentu sahaja sukar dicari dalam perbendaharaan kata asli Melayu. Cadangan ini telah diterima sepenuhnya oleh Malaysia dan juga Brunei. Ini merupakan satu titik perkembangan dalam pemikiran mengenai istilah dalam sejarah MBIM/ MABBIM.

12. Memasyarakatkan Hasil MABBIM

Selama 35 tahun hayat MBIM/MABBIM, segala usaha sama menjurus kepada hal-hal yang berhubung dengan peristilahan, mulai dari penyusunan daftar awal, disambung dengan mencari padanan dan menghasilkan glosari istilah dwibahasa Inggeris-Melayu/Indonesia, dan akhirnya penerbitan kamus subbidang. Ini bukanlah usaha yang ringan tetapi memerlukan kepakaran yang mendalam

dari segi ilmu dan juga kepakaran dalam sistem bahasa, serta juga kepekaan dalam penyesuaian kepakaran ini dengan konteks sosio-budaya masyarakat. Dengan itu, mendekati masyarakat pengguna amatlah penting, dan majlis telah mengatur acara-acara ke arah itu, antaranya seminar kebahasaan dan penerbitan jurnal MABBIM, *Rampak Serantau*.

Seminar Kebahasaan

Seminar kebahasaan pada mulanya diadakan dalam rangka merayakan ulang tahun ke-20 MBIM/MABBIM, dan ini diselenggarakan dalam Sidang Ke-32 MABBIM yang diadakan di Cisarua, Indonesia, pada 8–9 Februari 1993. Berikutan dengan itu, satu keputusan diambil dalam sidang di Cisarua supaya seminar kebahasaan diadakan setiap tahun, yakni setiap kali diadakan Sidang MABBIM.

Seminar kebahasaan MABBIM bertujuan mengajak pakar-pakar membentangkan kertas kerja yang berkaitan dengan bahasa serta kepakaran mereka dalam latar masyarakat negara masing-masing. Seminar ini boleh dilihat sebagai salah satu kaedah memperkenalkan hasil usaha MABBIM kepada masyarakat, dan pada masa yang sama mendapat maklum balas dari peserta seminar berhubung dengan program-program pembinaan bahasa yang dijalankan. Resolusi-resolusi yang telah diambil oleh seminar-seminar itu telah memberi banyak pemikiran kepada MABBIM dalam merancang program-programnya.

Seminar pertama yang diadakan di Cisarua itu mempunyai tema yang agak umum, yakni melihat keupayaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa ilmu. Dalam seminar ini, terdapat juga beberapa kertas kerja yang melihat aspek-aspek bahasa dari segi teori-teori linguistik tertentu. Penentuan tema seminar pertama ini diserahkan kepada pihak tuan rumah, dan bukanlah berdasarkan rundingan, kerana ketika itu tidak muncul wawasan menjadikan seminar sebagai kegiatan MABBIM yang nalar. Cuma ke-

tika di Cisarua baru timbul wawasan yang seperti itu. Mulai tarikh itu disepakati supaya tema-tema seminar juga disepakati bersama, seperti yang diperlihatkan oleh Seminar Kebahasaan Kedua dan seterusnya.

Dalam seminar kebahasaan pertama yang diadakan di Cisarua itu tidak ditentukan jumlah kertas kerja yang dibentangkan berdasarkan jatah negara. Sidang MABBIM selepas itu menetapkan kerangka kerjasama yang lebih rapi dari segi sumbangan negara-negara yang terlibat. Maka disepakati satu sistem jatah negara dari segi jumlah kertas kerja: iaitu dua kertas kerja bagi setiap negara MABBIM, dan lebihan satu bagi negara tuan rumah yang menyelenggarakan seminar itu. Singapura yang menjadi pemerhati juga mendapat bahagiannya, iaitu satu kertas kerja. Jadi, jumlah kertas kerja semuanya ialah lapan.

Seminar ini terbuka kepada orang ramai sebagai peserta, dan diadakan sebelum mesyuarat eksekutif MABBIM. Tentu sahaja peserta yang paling ramai adalah dari negara tuan rumah. Tetapi ada juga peserta dari pusat-pusat pengajian Melayu di negara-negara luar MABBIM yang ikut dalam seminar ini didorong oleh minat mereka mengikuti perkembangan yang berlaku dalam bahasa Melayu di kawasan inti penyebaran bahasa berkenaan. Segala pandangan dan rumusan daripada seminar itu menjadi salah satu acara mesyuarat eksekutif MABBIM yang bersidang langsung selepas seminar berkenaan.

Apabila MASTERA ditubuhkan dalam tahun 1996, dan Sidang MASTERA diadakan serentak dengan Sidang MABBIM, maka Seminar Kebahasaan terpaksa dipanjangkan waktunya kepada dua hari untuk dapat menampung lapan lagi kertas kerja yang pembahagian jatahnya diadakan menurut prinsip yang sama dengan MABBIM. Tema seminar tetap berasaskan hal-hal kebahasaan dan menyeluruh sifatnya dari segi ilmu pengetahuan, dan tidak ada pengkhususan kepada hal-hal kesusasteraan. Ini disebabkan matlamat asal seminar ini adalah untuk memasyarakatkan perkem-

bangun-perkembangan terbaru dalam bahasa Melayu/Indonesia serta juga meneroka fikiran masyarakat berhubung dengan perkembangan itu. Pandangan dan rumusan dari seminar gabungan MABBIM-MASTERA ini dimasukkan ke dalam agenda MABBIM khususnya, dan tidak dalam agenda MASTERA.

Rampak Serantau

Satu lagi usaha mendekatkan MABBIM kepada masyarakat, khususnya para ilmuwan, ialah dengan menerbitkan jurnal *Rampak Serantau*, terbitan tahunan tiga buah negara yang mengusahakan pencetakannya secara bergilir-gilir. Artikel-artikel dalam jurnal itu terdiri daripada artikel-artikel saintifik yang ditulis oleh pakar-pakar serantau, berdasarkan penyelidikan mereka sendiri.

13. Peningkatan Pembinaan Korpus

Jurnal *Rampak Serantau* dapat memperlihatkan keupayaan pembinaan korpus dan wacana dalam bahasa Melayu/Indonesia yang memperkatakan tajuk-tajuk yang dahulunya jarang diperkatakan melalui bahasa Melayu. Tetapi sekadar jurnal dengan beberapa artikel dalam setahun tidak memadai sebagai satu program yang terarah dalam membina korpus ilmu pengetahuan dalam bahasa Melayu/Indonesia.

MBIM/MABBIM sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam mengatur program pembinaan bahasa dengan cukup teliti. Dan buktinya dapat dilihat pada persetujuan ejaan bersama serta usaha-usaha peristilahan. Tentu sahaja MABBIM dapat mengorak langkah menuju program yang lebih besar daripada hanya kerja-kerja peristilahan.

Tidak dapat dinafikan bahawa istilah merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan korpus ilmu. Sungguhpun demi-

kian, adanya kamus-kamus istilah yang lengkap bagi berbagai-bagai ilmu dalam sesuatu bahasa tertentu itu tidak bermakna bahawa bahasa berkenaan sudah menjadi alat yang efisien dalam penyajian dan pengolahan idea-idea saintifik. Kamus seperti juga halnya dengan glosari hanya merupakan satu sistem perakam dan penstoran istilah yang ada. Cuma kamus melebihi glosari dari segi nilai akademiknya dengan adanya definisi bagi satu-satu istilah, satu ciri yang tidak ada pada glosari.

Sekumpulan barang yang hanya disimpan di dalam stor mungkin jumud begitu sahaja, dan akhirnya hanya akan menjadi bahan tontonan dan kajian sejarah sahaja. Dengan itu, istilah yang digubal dan dimasukkan ke dalam kamus itu perlu digerakkan supaya sentiasa bertenaga. Dan pergerakan istilah itu adalah dengan cara menggunakannya dalam teks. Sesuatu teks memberi konteks dan situasi yang menghidupkan bahasa, dan istilah sebagai unsur bahasa hanya akan hidup jika diletakkan dalam konteks dan situasi, yakni apabila digunakan dalam wacana bidangnya.

Adalah diakui bahawa sarjana-sarjana di negara-negara MABBIM telah memanfaatkan istilah-istilah yang dihasilkan oleh MABBIM sepanjang tiga dekad itu, tetapi penghasilan korpus ilmu dalam bahasa Melayu/Indonesia, lebih-lebih lagi di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia, tidaklah meningkat seperti yang diharapkan. Ini merupakan bukti bahawa adanya istilah bukanlah jaminan kuat bagi pembinaan korpus ilmu. Tentu sekali ada banyak faktor lain yang diperlukan dalam usaha mencapai matlamat ini.

MABBIM tidak dapat memberi penawar yang sepenuhnya dalam memperbaiki keadaan kekurangan korpus ilmu dalam bahasa Melayu, tetapi dapat membantu dalam menggerakkan aktiviti ke arah itu. Dengan kesedaran ini, maka dalam Sidang Ke-46 MABBIM yang berlangsung di Kuala Lumpur pada awal Mac 2007, Kelompok Eksekutif telah mengambil keputusan yang memberi corak baru kepada usaha MABBIM, iaitu memberi tumpuan kepada pembinaan dan penerbitan korpus ilmu. Ini bermakna bahawa tahun

2007 merupakan tahun terakhir perbincangan peristilahan dalam mesyuarat-mesyuarat MABBIM. Jika selama ini, setiap tahun para pakar ilmu bersidang dalam Sidang Pakar MABBIM (Istilah) yang mengumpulkan lima bidang melalui subbidang tertentu bagi perbincangan tiga negara, maka mulai tahun 2008 Sidang Pakar yang mendapat nama baru sebagai Sidang Pakar MABBIM (Pembinaan Ilmu) akan membincangkan hal-hal yang berhubung dengan pembinaan dan penerbitan korpus ilmu.

Perubahan dalam program MABBIM ini tidak bermakna bahawa istilah tidak lagi dianggap tidak penting, kerana kerja-kerja membina istilah akan terus dijalankan oleh masing-masing negara yang masih akan merujuk kepada negara-negara rakan berhubung dengan bidang dan subbidang yang akan digarap supaya keselarasan yang menjadi panduan cara bekerja selama ini akan terus menjadi rujukan bagi jawatankuasa/komisi yang terlibat. Dalam cara kerja ini daftar istilah yang akan digarap itu akan dipersetujui bersama, dan akan diberi padanan oleh masing-masing negara, dan hasilnya akan dipertukarkan. Jika perlu diadakan perbincangan bersemuka, maka para pakar yang berkenaan akan dipertemukan dalam mesyuarat yang diselenggarakan oleh sekretariat negara masing-masing. Bezanya dengan cara kerja masa lampau ialah peristilahan tidak lagi dibawa ke dalam acara pertemuan Sidang Pakar MABBIM.

14. Program Pembinaan Ilmu

Pembinaan korpus ilmu sebagai program MABBIM terangkum dalam empat kumpulan aktiviti yang dinaungi dan dirancang oleh empat jawatankuasa atau komisi, iaitu Kegiatan, Peristilahan, Penyelidikan, dan Penerbitan. Berdasarkan pola kerja dalam Sidang Pakar MABBIM sebelum ini, setiap jawatankuasa/komisi ketiga-tiga buah negara akan bekerjasama merangka aktiviti bagi jangka masa tiga atau lima tahun, dan bertukartukar bahan serta berme-

syuarat membincangkan hasil kerja yang akhirnya akan menjadi hasil kerja bersama.

Seperti yang sudah disebut di atas, jadual pertemuan antara negara, yang terdiri daripada Sidang Majlis yang sebenarnya Sidang Eksekutif dan Sidang Pakar akan kekal. Tetapi Sidang Pakar yang dahulunya dipenuhi oleh perbincangan mengenai padanan istilah, mulai 2008 diambil alih oleh perbincangan empat jawatankuasa yang disebut di atas.

15. Program Kegiatan

Program kegiatan merupakan program terbuka yang merancang kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menyumbang ke arah penghasilan wacana ilmiah. Salah satu acara dalam program ini ialah mengadakan syarahan di negara-negara MABBIM. Dan tokoh bahasa atau tokoh bidang ilmu tertentu dipilih dari salah satu negara MABBIM untuk memberi syarahan di negara MABBIM yang lain.

Wacana syarahan ini merupakan wacana bersemuka antara tokoh atau pakar dengan ahli masyarakat. Dalam acara yang seperti ini, MABBIM boleh dikatakan “turun padang”, bertemu dengan masyarakat. Sejak zaman MBIM lagi, acara turun padang sudah dijalankan dan didapati mempunyai kesan dalam menyampaikan keputusan dan tindakan MBIM/MABBIM kepada masyarakat. Di Malaysia, acara turun padang MBIM yang paling berkesan ialah dalam memasyarakatkan Ejaan Baru 1972.

Acara memasyarakatkan ejaan diikuti pula oleh acara memasyarakatkan istilah. Dari segi pelaksanaannya, acara ini tidaklah sehebat acara memasyarakatkan ejaan dilihat dari segi kawasan yang mengalami penyebaran sistem berkenaan, kerana istilah merupakan domain pakar ilmu, sedangkan ejaan merangkumi semua pengguna bahasa yang celik huruf dalam negara.

Wacana ilmu jauh lebih banyak dan lebih kekal sifatnya dalam bentuk penghasilan karangan asal daripada para pakar. Dengan kesedaran ini, MABBIM telah memasukkan program penataran penulisan, di bawah jawatankuasa/komisi kegiatan. Dalam program ini, masing-masing negara menjalankan kegiatan sendiri dalam negeri dan negara-negara rakan boleh ikut serta dengan menghantar calon-calon yang ingin ikut serta dalam penataran itu. Malaysia telah menjalankan bengkel penataran yang pertama dalam bulan Ogos 2007, dengan memberi tumpuan kepada penulisan buku ilmu untuk pembaca umum. Dengan memberi tumpuan kepada pembaca umum, maka gambaran yang diperolehi ialah sesebuah buku ilmu tidaklah semata-mata untuk orang-orang yang pakar dalam ilmu berkenaan dan dapat mengaitkan ilmu itu dengan berbagai-bagai teori yang ada. Bahkan pembaca biasa juga yang mempunyai minat dalam sesuatu gejala atau kejadian alam memerlukan bahan bacaan mengenai gejala atau kejadian berkenaan, dalam bentuk teks yang sesuai dengannya sebagai pembaca biasa yang menginginkan pengetahuan sebagai orang yang bukan pakar atau sebagai *layman* sahaja.

Kegiatan selanjutnya tentulah berupa penataran pada peringkat menghasilkan penerbitan ilmiah yang menggambarkan kepakaran, yakni penerbitan pakar untuk pakar. Matlamat ini sudah lama berada dalam program MABBIM. Oleh kerana itu, dalam Sidang MABBIM Ke-43 yang diadakan di Kuala Lumpur pada 10–12 Mac 2004, telah diputuskan bahawa MABBIM menghasilkan Pedoman Penulisan Akademik yang boleh menjadi rujukan para ilmuwan ketiga-tiga negara MABBIM menulis makalah dan buku akademik. Tugas itu jatuh ke atas bahu Malaysia, dan saya telah ditugaskan oleh pihak negara menghasilkan pedoman berkenaan. Pedoman ini, yang diberi judul *Panduan Wacana Akademik: Teori dan Amali*, telah siap diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur pada tahun 2006.

16. Penterjemahan

Dalam pemikiran MABBIM seterusnya, penerbitan dalam bahasa Melayu/ Indonesia boleh diberi tenaga melalui penterjemahan. Jawatankuasa/ komisi kegiatan diberi tanggungjawab memenuhi program ini dengan bengkel-bengkel latihan, yang akhirnya akan membawa kepada penghasilan penerbitan buku-buku terjemahan dari bahasa asing yang dapat menambah kepada perbendaharaan pustaka ilmu bahasa Melayu/ Indonesia.

Adalah diakui bahawa ketiga-tiga negara MABBIM mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang penterjemahan. Misalnya, Malaysia telah memulakan program terjemahan secara teratur dan terarah mulai tahun 1922 dengan ditubuhkan Pejabat Karang Mengarang sebagai bahagian khas di bawah Pejabat Pelajaran Malaya, tetapi diletakkan di bawah bumbung Maktab Perguruan Sultan Idris (*Sultan Idris Training College* atau lebih dikenal dengan singkatannya *SITC*), di Tanjong Malim, Perak. Sesuai dengan suasana politik ketika itu, yang mempengaruhi pembinaan korpus pustakanya, penterjemahan terancang yang dijalankan oleh Pejabat Karang Mengarang itu memberi tumpuan kepada penterjemahan buku-buku kesusasteraan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu untuk bacaan sekolah dan umum. Tidak ada usaha menterjemahkan buku-buku ilmu kerana dalam dasar pemerintahan kolonial Inggeris di Malaya ketika itu pemerolehan ilmu bagi rakyat Malaya adalah melalui bahasa Inggeris.

Penterjemahan buku-buku ilmu dari bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu mulai dijalankan oleh individu, penerbit serta institusi tertentu secara berasingan selepas merdeka. Tidak ada program yang terancang dan terarah. Program penterjemahan MABBIM tentunya akan lebih terarah dan akan memperlihatkan pemilihan judul dan ilmu secara lebih rapi.

17. Peristilahan

Seperti yang sudah dikatakan lebih awal, istilah merupakan unsur yang penting dalam bahasa ilmu. Istilah membawa konsep khusus yang diperlukan oleh sesuatu bidang atau subbidang ilmu, dan konsep ini merupakan konsep yang universal tidak kira di mana sahaja di muka bumi ini istilah itu digunakan. Pakar dalam sesuatu bidang ilmu tertentu dari sesuatu bahagian dunia dapat berbincang dengan pakar dari bidang ilmu yang sama dan saling memahami dalam perbincangan tersebut kerana mereka menggunakan konsep yang sama.

Dalam zaman dunia makin menyempit, dan dengan begitu lajunya perkembangan ilmu pengetahuan, persefahaman dalam konsep-konsep dalam bidang yang menjadi pengkhususan bersama sangat penting. Juga, hasil dari globalisasi, yang juga membawa kepada sikap kompetitif dalam penonjolan kemajuan kelompok atau negara masing-masing, sesuatu penemuan yang baru itu disebarluaskan bukan sahaja untuk memberitahu tentang kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai, tetapi juga dengan tujuan meletakkan kaveat atau hak milik kepada penemuan itu. Cara yang berkesan ialah dengan menghebahkan penemuan itu dalam bahasa Inggeris.

Panduan yang diberi oleh MBIM/MABBIM dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPH)* 1975 mempunyai tujuan murni, iaitu mengakui dan menghormati warisan alam Melayu. Tetapi ilmu pengetahuan terus berkembang dan dunia terus berubah. Kepesatan ilmu pengetahuan tidak akan tercapai jika kita sentiasa menoleh ke belakang. Oleh itu, pindaan kepada pedoman berkenaan yang menghasilkan versi 2004, yang sudah disebut di atas tadi, menggambarkan pencerminan kesedaran yang seperti ini, setelah melihat bahawa dalam realitinya inilah yang berlaku apabila pakar-pakar ilmu negara-negara MABBIM memilih padanan-padanan Melayu/Indonesia bagi istilah-istilah Inggeris yang merupakan daftar induk mereka.

Keputusan menggantikan Sidang Pakar Istilah yang diadakan setiap tahun dengan Sidang Pakar Pembinaan Ilmu tidak bermakna minat dalam hal-hal peristilahan sudah lupus dalam pertimbangan

MABBIM. Jika MABBIM dikatakan menganggap kerja-kerja peristilahan tidak diperlukan lagi dalam pembinaan bahasa Melayu/Indonesia, ini tidak benar. Ilmu pengetahuan terus berkembang, tidak pernah putus-putus, dan pasti akan timbul konsep-konsep baru yang didukung oleh istilah antarabangsa, khususnya istilah dalam bahasa Inggeris. Dengan pengalaman 35 tahun dan dengan adanya pedoman peristilahan yang telah dipinda itu, pasti pakar-pakar ilmu kita dapat mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam pengambilan atau penyesuaian istilah itu.

Dengan itu, dalam kerangka kerja pembinaan ilmu, kerja-kerja peristilahan akan terus dijalankan di negara masing-masing. Penyelarasan antara negara boleh dilakukan dalam program yang diatur di luar sidang. Dalam hal ini, tentunya akan ada komunikasi antara sekretariat negara-negara MABBIM.

Kerja-kerja peristilahan tidak juga akan berkurangan kerana masih banyak subbidang istilah yang masih belum ada kamusnya. Senarai istilah yang disepakati sudah ada, dan menunggu diberi definisi. Ini memerlukan kerja yang cukup berat dan teliti.

Di samping itu, kamus-kamus istilah yang sedia ada tidak boleh dibiarkan sebagai dokumen yang sudah sempurna sehingga tidak perlu disemak semula. Penyemakan semula kamus-kamus itu perlu dilakukan selang beberapa tahun sesuatu kamus itu diterbitkan, melihat bahawa ilmu pengetahuan bertambah maju dengan idea-idea serta juga pendekatan dan teori baru. Misalnya, *Kamus Sociolinguistik* yang diterbitkan dalam tahun 2003 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, mungkin perlu ditinjau semula setelah 10 tahun penerbitannya. Konsep yang betul-betul baru yang digunakan dalam subbidang ini mungkin tidak banyak, tetapi apa yang berlaku ialah pindahan konsep dari cabang-cabang linguistik yang lain dan juga dari sosiologi dan juga antropologi ke dalam subbidang ini.

Pemindahan istilah dari subbidang ke subbidang dalam bidang yang sama, atau dari bidang yang berbeza sama sekali ke se-

suatu subbidang tertentu, ada kalanya melibatkan perubahan makna kepada istilah berkenaan. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian para pakar peristilahan dan juga penyusun kamus istilah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Sejak tahun 1982 dengan adanya *Panduan Penyusunan Kamus Istilah*, kerja-kerja penyusunan kamus dalam kategori ini dapat memperlihatkan keseragaman khususnya dari segi pemilihan kata entri bagi tiap-tiap bidang. Pembatasan entri kepada 1000 perkataan sahaja mungkin perlu ditinjau semula. Panduan itu memang cukup baik untuk mencapai satu keselarasan penyusunan kamus subbidang, dan panduan ini didasarkan pada pedoman ISO-R 704-1969 dan ISO-R 919-1969, berhubung dengan asas-asas penamaan dan penyediaan klasifikasi istilah. Kita tentu bertanya adakah ISO yang berusia 40 tahun itu akan kekal selama-lamanya dari segi panduan yang diberinya? Kajian dari pihak kita mungkin akan menunjukkan perlunya ada pindaan bagi peraturan-peraturan yang sedia wujud.

Dalam *Panduan Penyusunan Kamus Istilah*, kita hanya menganjurkan jumlah entri yang maksimum. Maklum balas yang diperolehi oleh pihak Malaysia menunjukkan bahawa kita perlu juga mencadangkan jumlah entri yang minimum bagi sesuatu kamus subbidang. Dengan adanya pengkhususan yang begitu rapi bagi sesuatu subbidang itu, mungkin ada subbidang yang hanya mempunyai 50 istilah khusus sahaja. Adakah ini memerlukan kamus tersendiri? Dalam bidang sastera, hal yang seperti ini sudah timbul berhubung dengan Filologi, kerana bidang ini sebenarnya gabungan sastera lama, linguistik bandingan historis, dan hal-ehwal arkib. Sesuai dengan keadaan ini, Filologi tidak mendapat taraf subbidang dalam MABBIM, kerana didapati bahawa istilah yang khusus Filologi hanya lima sahaja. Hal ini dimaklumkan dalam Sidang MABBIM yang diadakan di Brunei, ketika ada cadangan membawa masuk Filologi ke dalam kelompok istilah MABBIM.

18. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan satu usaha yang asas dan penting dalam sesuatu pembinaan ilmu. Jawatankuasa/komisi dalam bidang ini perlu merangkakan projek-projek penyelidikan yang boleh dijalankan oleh negara-negara MABBIM secara bersama, atau secara bersendirian tetapi dengan saling berhubung dan bertukar-tukar maklumat. Apa juga projek yang dirangkakan itu hendaklah mengarah kepada pengayaan ilmu pengetahuan dalam bahasa Melayu/Indonesia.

19. Penerbitan

Ketika Malaya mula mencapai kemerdekaan, dan cita-cita menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu masih membara di hati segenap pejuang dan pendukung bahasa kebangsaan, fikiran yang timbul ialah bagaimana kita hendak menerbitkan buku ilmu jika istilah dalam bidang-bidang ilmu tidak ada atau masih kurang? Maka wujudlah perancangan korpus bahasa yang sudah kita saksikan, khususnya dalam pembinaan istilah.

Sekarang ini berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan sudah pun diberi perhatian dari segi peristilahan, sehingga sekarang ini Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur sudah pun mempunyai glosari istilah ilmu bahasa Melayu untuk 221 subbidang, dari seni budaya hingga kepada bidang Aeronautik. Dari glosari-glosari ini, sudah dapat dihasilkan 34 kamus istilah. (Lihat Lampiran). Tetapi buku ilmu dalam bahasa Melayu tidak muncul dalam jumlah yang diharapkan terutama sekali dalam bidang-bidang yang berasaskan sains dan teknologi.

Jadi, apakah masalahnya? Jelas bahawa istilah sahaja bukan satu-satunya syarat menghasilkan sesuatu penerbitan ilmiah. Pakar-pakar ilmu dalam bahasa Melayu memerlukan kemahiran yang lebih daripada sekadar mengenal padanan istilah. Mereka me-

merlukan kecekapan dalam menulis, dan menulis tidak hanya membentuk ayat dan menguntai-untai satu ayat dengan ayat yang lain. Perlu ada pemikiran strategik dalam menghasilkan wacana yang boleh dinamakan wacana ilmu. Dan ini merupakan satu keterampilan tersendiri. Di samping itu diperlukan juga keterampilan-keterampilan dan pengetahuan lain yang berkaitan dengannya. Empat jawatankuasa/komisi yang dipersetujui oleh MABBIM dalam Sidang Ke-46 MABBIM yang diadakan di Kuala Lumpur dalam bulan Mac 2007 menggambarkan peranan keempat-empat jawatankuasa secara bersepadu dalam menghasilkan penerbitan ilmiah.

Penerbitan merupakan kemuncak bagi ketiga-tiga program yang disebut di atas itu. Pengisian pustaka bermakna peningkatan keintelektualan para pembaca, dan dalam hal ini rakyat ketiga-tiga buah negara MABBIM. Selama ini pakar-pakar ilmu alam Melayu sudah banyak menghasilkan penerbitan yang bersifat artikel dalam jurnal. Apa yang ditunggu oleh masyarakat ialah penerbitan yang berbentuk buku dalam berbagai-bagai bidang ilmu.

20. MBIM/MABBIM Sebagai Pembawa Perubahan

Soal status bahasa dan pembinaan korpus bahasa merupakan program penting bagi negara-negara yang mencari identiti yang dikaitkan dengan kedaulatan sesuatu bangsa yang bebas dari penjajahan kuasa asing. Gerakan kemerdekaan yang berlaku di bahagian-bahagian dunia yang terjajah, terutama sekali di Asia, selepas Perang Dunia II, juga tempias ke alam Melayu, khususnya Indonesia, Malaysia, dan akhir sekali Brunei. Pembinaan bahasa bagi negara-negara ini menjadi acara penting di samping pembinaan sosioekonomi masyarakat. Adalah menjadi keyakinan negara-negara ini bahawa bahasa merupakan sistem komunikasi penting, dan memilih satu bahasa dari sejumlah bahasa yang ada dalam masyarakat mereka sebagai lambang kedaulatan dan juga sebagai sistem komunikasi utama antara rakyat dan pemerintah merupa-

kan tindakan yang sewajarnya. Berikutan dengan itu, program-program hendaklah dijalankan untuk sampai kepada matlamat ini, dengan menggunakan kaedah yang efisien.

Apa yang dapat dilihat, khususnya di Malaysia, matlamat seperti yang dinyatakan di atas itu termaktub dalam setiap rancangan pembinaan dan penyusunan semula masyarakat. Keadaan demografi di Malaysia mungkin dipandang lebih rumit daripada di Indonesia dan Brunei. Dengan itu, apa sahaja keputusan yang diambil dalam perancangan bahasa di Malaysia harus mengambil kira sensitiviti masyarakat Malaysia seluruhnya.

Pemilihan dan penentuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaya dengan penulisan Perlembagaan Malaya 1957 yang memberi taraf yang jelas kepada bahasa berkenaan, bukanlah satu proses yang dicapai tanpa perdebatan di berbagai-bagai lapisan masyarakat yang mewakili berbagai-bagai suku kaum. Dalam perdebatan-perdebatan itu, yang menjadi hujah utama dalam memilih bahasa Melayu, bukanlah semata-mata hakikat bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa perantara dalam komunikasi antara kaum, tetapi lebih-lebih lagi adalah hakikat bahawa bahasa Melayu adalah bahasa peribumi dan sudah pun berperanan sebagai bahasa tinggi yang memegang status bahasa pentadbiran di negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Bahkan dalam zaman penjajahan British sekalipun, negeri-negeri Melayu yang berdaulat dengan sistem pemerintahan kesultanan masing-masing, dari mula-mula wujudnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran.

Keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan sudah berakar zaman berzaman. Hanya dalam zaman penjajahan dengan majunya persekolahan moden yang bermodelkan persekolahan ala British, maka bahasa Melayu tidak dimasukkan ke dalam sistem pendidikan yang berkenaan. Dengan demikian, bahasa Melayu ketinggalan jauh di belakang dari segi fungsinya sebagai alat komunikasi dalam bidang ilmu.

Perancangan bahasa di Malaysia, baik perancangan taraf mahupun perancangan korpus, mempunyai salah satu tujuan utama,

iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pembinaan dan penyampaian ilmu. Oleh itu, salah satu acara utama yang dijalankan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada awal penubuhannya ialah membina istilah ilmu. Program penggubalan istilah berjalan dengan lancar dengan panduan-panduan yang ditentukan berdasarkan keadaan sosial dan politik semasa, dan dengan matlamat yang meliputi hanya alam Malaya/Malaysia.

Pewujudan MBIM/MABBIM memberi perspektif baru kepada pembinaan bahasa di Malaysia, iaitu dari pembinaan yang bersifat “setempat” (atau *localised*) kepada pembinaan bahasa bagi seluruh alam Melayu. Perkembangan ini menimbulkan satu orientasi semula dalam pemikiran warga Malaysia: jika dahulu alam bahasanya dibatasi oleh sempadan kenegaraan, maka sekarang batas itu sudah hilang, dan jika ada galang-galang di perbatasan disebabkan perbezaan-perbezaan yang tidak dapat dielakkan, maka ini tidak menghindari aliran masuk keluar bahasa yang dibina bersama itu.

Orientasi semula fikiran seperti yang disebut di atas pasti juga berlaku pada warga-warga di Indonesia dan Brunei Darussalam. Dan orientasi semula dari segi bahasa juga membawa kepada perubahan dalam sikap dan hubungan sosial antara negara, lebih-lebih lagi antara mereka yang bekerjasama memberi khidmat kepada MBIM/MABBIM dalam apa juga cara.

Pakar-pakar sociolinguistik antarabangsa pada amnya mengatakan bahawa perancangan bahasa membawa perubahan kepada bahasa yang berkenaan. Dalam kes MBIM/MABBIM, hakikat ini sudah terbukti. Program-program yang dijalankan oleh majlis ini telah membawa kepada perubahan bahasa dari berbagai-bagai aspek: bahasa sebagai perilaku sosial, bahasa sebagai pewujudan fikiran, dan bahasa sebagai satu sistem filogenetik.

Dari Segi Perilaku Sosial

Sebelum MBIM/MABBIM, warga-warga pengguna bahasa Melayu berpandukan peraturan-peraturan sosial yang ada dalam lingku-

ngan masyarakat dalam sempadan negara masing-masing. Pada tahun-tahun awal sejarah muafakat bahasa, apabila pertemuan bersemuka baru berlaku antara penutur-penutur bahasa Melayu yang mempunyai latar belakang sejarah politik dan sosial yang berbeza antara satu sama lain, terdapat rasa kaku atau kekok antara mereka yang terlibat. Dan perasaan yang seperti ini bukan hanya timbul dari perbezaan penyebutan bunyi bahasa dan juga pemilihan kata dan ungkapan yang tidak biasa didengar sebelum itu, tetapi juga dari segi bahasa jasmani atau paralinguistik. Berhubung erat dengan faktor yang disebut ini adalah juga faktor-faktor sosiopragmatik yang peraturannya tidak seratus peratus sama antara negara-negara anggota MABBIM.

Tahun demi tahun bermesyuarat, maka apa yang dahulunya aneh dari segi perilaku rakan-rakan di seberang selat-selat sempit yang memisahkan negara-negara MABBIM itu, sudah menjadi kebiasaan secara timbal balik. Tidak jarang juga kebiasaan-kebiasaan itu diambil dan diadaptasi di kalangan rakan-rakan senegara. Contoh yang paling jelas ialah dari segi tegur sapa dan pembuka komunikasi (*phatic communion*) yang sudah memperlihatkan adaptasi timbal balik.

Dari Segi Bahasa sebagai Pewujudan Fikiran

Sejak wujudnya MBIM/MABBIM, banyak juga penerbitan yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh pakar-pakar di Malaysia, sunguhpun seperti yang dikatakan di atas yang diperlukan adalah jauh lebih banyak. Dan program pembinaan korpus ilmu diharap akan mengisi kekurangan itu.

Penggubalan istilah dan kemudiannya penyusunan kamus istilah juga merupakan satu latihan dalam pengungkapan fikiran melalui bahasa Melayu/Indonesia. Istilah sebagai lambang bunyi bagi konsep yang abstrak memerlukan pemikiran yang mendalam dari segi pemahaman maknanya, dan juga dari segi pemilihan padanan dalam bahasa Melayu bagi lambang yang terdapat dalam bahasa Inggeris. Proses-proses yang berlaku dalam pemikiran pa-

kar-pakar dalam berbagai-bagai subbidang ilmu sebenarnya merupakan proses memajukan konsep yang abstrak itu dalam sistem bunyi bahasa Melayu/Indonesia.

Dari Segi Bahasa sebagai Sistem Filogenetik

Bahasa boleh dianggap sebagai sistem filogenetik berdasarkan adanya proses evolusi yang berlaku serta pencawangan kepada berbagai-bagai keluarga dan subkeluarga bahasa, dan di bawahnya sekali terdapat variasi-variasi geografis dan sosial bagi sesuatu bahasa tertentu. Aspek-aspek filogenetik bahasa merangkumi fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Perbezaan antara cabang-cabang dari bahasa yang sama menggambarkan gabungan ciri-ciri penyimpangan tiap-tiap aspek filogenetik.

Pengkaji-pengkaji linguistik historis berpegang pada aksioma bahawa bahasa berubah secara beransur-ansur. Pernyataan yang sudah menjadi pegangan bagi pakar-pakar linguistik dalam subbidang ini barangkali sudah tidak sesuai untuk menggambarkan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa Melayu/Indonesia dari segi filogenetiknya. Perubahan bahasa Melayu sejak adanya MABBIM berlaku dengan begitu cepat dan dalam jumlah yang banyak, dilihat dari segi sistem dan struktur aspek-aspek filogenetik tertentu, walaupun tidak semuanya.

Penerimaan konsonan-konsonan dari bahasa Inggeris, khususnya melalui istilah yang kemudian membawa kata-kata bukan istilah, merupakan satu perubahan besar dalam sistem fonologi Melayu. Bahasa Melayu sudah beratus-ratus tahun dahulu mengalami pengaruh dari bahasa asing, pada mulanya bahasa Sanskrit, diikuti oleh bahasa Arab dan Inggeris (sebelum MBIM-/MABBIM), dan banyak unsur leksikal diambil dari bahasa-bahasa berkenaan. Tetapi pengambilan kata-kata asing itu tidak melibatkan banyak perubahan pada sistem dan struktur fonologi Melayu.

Dengan perancangan korpus, iaitu satu tindakan yang dilakukan dengan penuh sedar, kita bukan sahaja menambah fonem baru kepada perbendaharaan fonem yang sedia ada, tetapi juga mewujudkan sistem-sistem bunyi yang baru yang dahulunya tidak ada dalam bahasa Melayu. Misalnya, penerimaan /f/ dan /v/ sebagai fonem membawa masuk sistem konsonan labiodental yang dahulunya tidak ada dalam bahasa Melayu. Pengakuan bahawa <sy> dan <z> mewakili fonem dalam bahasa Melayu sekarang ini menambah subsistem kepada sistem frikatif yang sedia ada yang sebelum ini hanya mempunyai /s/ dan /h/ sebagai eksponennya.

Struktur fonologi juga mengalami perubahan dengan penerimaan struktur baru yang dahulu tidak pernah terfikirkan untuk diterima masuk ke dalam bahasa Melayu. Penyerapan istilah-istilah asing yang memberi keutamaan kepada bentuk visualnya menghendaki supaya diterima juga konsonan-konsonan rangkap yang sangat asing bagi bahasa Melayu, baik di awal, tengah atau akhir kata. Dan berkaitan dengan ini juga adalah penerimaan distribusi konsonan dan vokal dalam lingkungan kata yang dahulunya tidak pernah ditempatinya.

Dari segi morfologi pula, pengambilan awalan dan akhiran asing lebih bebas daripada sebelumnya. Pengaruh bahasa Sanskrit selama sembilan abad hanya dapat memasukkan sejumlah kecil awalan dan akhiran dari bahasa berkenaan. Demikian juga halnya dengan pengaruh dari bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu di Malaysia, banyak sekali kata dari bahasa Arab yang diambil masuk ke dalam leksikon Melayu, tetapi pertimbangan penutur bahasa Melayu selama ini ialah hanya mengambil kata sebagai kata. Jika ada unsur nahu khusus dalam sesuatu kata, maka unsur itu diserap masuk sebagai bahagian dari kata berkenaan tanpa memikirkannya sebagai unsur khusus yang juga membawa makna khusus. Dalam meneliti pembaharuan dari segi fonologi dan morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu, yakni hasil sebelum perancangan melalui MBIM dan MABBIM, kita dapat membuat kesimpulan bahawa

pengguna bahasa Melayu dahulu sangat berhati-hati dalam mengambil unsur-unsur yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi sistem dan struktur bahasanya.

Wujudnya pembaharuan dalam bahasa dimungkinkan oleh zamannya serta juga sikap yang berhati-hati atau lebih terbuka mengenai perkembangan bahasa. Bahasa Melayu Malaysia sekarang ini sudah banyak berubah berbanding dengan bahasa berkenaan sebelum tahun 1972. Ini tidak mungkin berlaku jika tidak ada perancangan seperti yang dilakukan oleh MBIM/MABBIM. Jika kita mengambil sikap yang dikemukakan oleh Edward T. Hall, supaya bahasa dibiarkan tumbuh secara tabii (*Leave Your Language Alone*, katanya), tentu sahaja bahasa kita tidak akan mencapai taraf keupayaannya seperti yang kita lihat sekarang ini.

21. Penutup

MBIM/MABBIM merupakan badan pembina bahasa yang tidak mempunyai keserupaan dengannya di mana-mana pun juga di muka bumi ini. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, banyak pemikiran dan pertimbangan dimanfaatkan oleh ahli-ahli MBIM/MABBIM: dari segi linguistik, pengkategorian bidang ilmu, hubungan antara negara yang memerlukan kemahiran dalam perundingan, hubungan antara individu, pengurusan dan logistik. Sehubungan dengan ini, pengurusannya seringkali menghadapi *trial-and-error*, dan ini juga berlaku dalam hal menentukan pedoman dan panduan. Tidak ada model dari mana pun juga yang boleh dirujuk, dan dari pemikiran dan lakaran kerja sendiri, MABBIM boleh dikatakan sudah menghasilkan model perancangan bahasa bagi satu alam peradaban yang mempunyai satu bahasa bersama.

MABBIM SEMAKIN DEWASA DENGAN RENUNGAN DAN AGENDA MASA DEPAN

Prof. Dr. Amrin Saragih
Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara
Indonesia

1. Pendahuluan

Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) adalah organisasi kebahasaan yang bertugas merancang dan memantau perkembangan bahasa Indonesia/Melayu di ketiga negara itu. Pada 2008 ini organisasi kebahasaan antarbangsa itu berusia 36 tahun. MABBIM telah melakukan kegiatan, menghasilkan karya, dan membuat putusan, kesepakatan, upaya serta ketetapan yang bermanfaat bagi ketiga negara dan penutur bahasa Indonesia/Melayu di kawasan itu. Dampak kegiatan MABBIM berupa wujudnya identitas, marwah, persaudaraan, dan perkauman telah dikecapi oleh penduduk ketiga negara. Namun demikian, masih banyak agenda yang perlu dilakukan organisasi regional itu agar kualitas putusan dan kebijakannya lebih berdampak bagi kemaslahatan rakyat di ketiga negara itu. Putusan MABBIM yang ada perlu diperdayakan, direvitalisasi, atau diubahsuai penerapannya sejalan dengan perkembangan di ketiga negara. Dalam kecenderungan kesegajagan, agenda baru perlu dibuat dan dilaksanakan untuk menjadikan bahasa Indonesia/Melayu lebih perkasa sebagai bahasa pergaulan yang lebih luas pemakaiannya dan lebih berkualitas peng-

gunaannya, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyat di rantau ini.

2. Sejarah, Tujuan, dan Fungsi

Pada awalnya Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) didirikan pada 29 Desember 1972 setelah Pernyataan Bersama pada 23 Mei 1972 ditandatangani di Jakarta oleh Tun Hussein Onn, Menteri Pendidikan Malaysia dan Mashuri Saleh, S.H. Menteri Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian, pada 4 November 1985 Brunei Darussalam menjadi anggota dan nama MBIM diubah menjadi MABBIM. Singapura menjadi negara pemerhati Majelis hingga saat ini. Secara khusus MABBIM beranggotakan institusi kebahasaan dari ketiga negara itu, yakni

- (1) Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam,
- (2) Pusat Bahasa, Indonesia, dan
- (3) Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.

Selanjutnya, pada 11 Juni 1987 Piagam MABBIM ditandatangani dengan tujuan dan fungsi MABBIM sebagai berikut.

- (1) Meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota.
- (2) Meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas.
- (3) Mengusahakan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa modern yang lain.
- (4) Mengusahakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif, pedoman, dan panduan.
- (5) Mengadakan pertemuan kebahasaan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota.

Dalam pengabdianya selama 36 tahun MABBIM telah berkarya dan berhasil membuat sejumlah keputusan, di antaranya

- (1) ejaan, yang dikenal sebagai Ejaan yang Disempurnakan (EYD) di Indonesia,
- (2) kamus, seperti *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang berada daring,
- (3) pembentukan kata dan istilah berupa Glosarium. Istilah yang berada daring,
- (4) pertemuan kesasastraan dengan nama Mastera,
- (5) pertemuan kebahasaan dan kesastraan,
- (6) komunike bersama MABBIM,
- (7) sidang-sidang MABBIM sebanyak 46 kali, dan
- (8) berbagai kebijakan bahasa.

3. Dampak Sosial Kegiatan dan Karya Mabbim

Kegiatan yang dilakukan dan karya yang dihasilkan oleh MABBIM telah berdampak di negara anggotanya. Dampak sosial itu terutama dirasakan di kalangan kaum terpelajar atau kelas menengah ke atas dan lapisan masyarakat yang memiliki mobilitas di antara negara anggota MABBIM, misalnya tenaga kerja Indonesia (TKI) dan mahasiswa. Berikut adalah uraian dampak sosial tersebut.

a. Membangun Identitas dan Marwah Bahasa

MABBIM telah berhasil membangun identitas dan marwah bahasa Indonesia/Melayu bagi penuturnya. Keberhasilan ini terealisasi oleh upaya dan kegiatan MABBIM yang telah menghasilkan pembakuan penulisan bahasa atau ejaan bahasa Indonesia/Melayu, kosakata dalam *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, dan kesepakatan pengembangan bahasa dan kesastraan. Semua upaya, kegiatan, dan karya MABBIM telah menyatukan pandangan tentang identitas bangsa yang berbahasa Indonesia/ Melayu, yang sebelumnya, terutama akibat penjajahan, bercorak ragam. Kesatuan pandangan dalam bahasa membentuk harga diri atau marwah. Bahasa adalah

sistem semiotik sosial yang digunakan untuk membentuk pemahaman atau pengetahuan dan untuk bertindak berdasarkan aturan konteks sosial penutur, yang mencakupi konteks situasi, budaya, dan ideologi (Halliday 2005: 391; Martin 2000: 10–11).

Ejaan pada dasarnya merupakan reduksi bahasa lisan ke sistem tulisan. Dengan ejaan variasi ucapan yang cenderung subjektif diobjektifkan dan bahasa dibuat bertahan lebih lama dan kemas daripada ucapan. Bahasa lisan lenyap bersamaan dengan berjalannya waktu, sementara bahasa tulisan bertahan lama karena dapat dilihat dan dibaca berulang kali. Sebelum adanya EYD terdapat sejumlah variasi ucapan dan tulisan bahasa Indonesia/Melayu di ketiga anggota MABBIM. Misalnya, di Indonesia dituliskan *tjantik*, *djatuh* dan di Malaysia dan Brunei Darussalam dituliskan *chantik*, *jatuh*, yang dengan EYD variasi itu disatukan menjadi *cantik* dan *jatuh*. Penulisan *tj* dan *dj* di Indonesia merupakan warisan penjajah Belanda dan *ch* di Brunei Darussalam Malaysia juga pengaruh kolonial Inggris. Dengan EYD itu ketiga bangsa telah berupaya memunculkan identitasnya. Walaupun masih terdapat variasi ucapan kata *cantik* sebagai [cantik] atau [cantek] variasi itu direduksi dan ditampilkan objektif hanya dalam tulisan *cantik*. Kesatuan penulisan atau ejaan ini bermakna kesatuan pandangan terhadap bahasa Indonesia/Melayu dan itu berarti kesatuan identitas.

Ejaan didasarkan pada pertimbangan teori linguistik, yang mencakupi nilai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik dan konteks sosial. Penulisan morfem terikat *pe* + *pukul* menjadi *pemukul* tertakluk pada kaidah morfofonologis. Demikian juga penulisan huruf kapital untuk nama dan sifat Tuhan, seperti *Tuhan Yang Maha Esa* bermakna kesepakatan konteks sosial bahwa penutur bahasa Indonesia/ Melayu di ketiga negara itu mengutamakan Keagungan dan Kebesaran Allah atau Tuhan. Hal ini bermakna menyatukan pandangan secara ideologis terhadap Sang Maha Pencipta.

Dengan terbentuknya identitas penutur bahasa Indonesia/-Melayu kebanggaan penutur bahasa itu muncul. Satu unsur kebanggaan itu adalah upaya mempertahankan bahasa Indonesia/Melayu sepanjang masa dan untuk itu MABBIM telah berupaya memperkaya atau mengembangkan bahasa Indonesia/Melayu agar bahasa itu mampu memenuhi kebutuhan penuturnya dalam berbagai bidang atau disiplin ilmu dan bertahan sepanjang masa. Dengan kata lain, pemakai dan pemakaian bahasa Indonesia/Melayu perlu diperluas. MABBIM telah menghasilkan ribuan istilah atau glosarium istilah dalam berbagai bidang atau disiplin ilmu. Para pakar dalam disiplin ilmu dari ketiga negara telah bekerja dengan baik dan menghasilkan kata dan istilah baru. Misalnya, frase *on line* dan *off line*, seperti pada *on line service* dan *off line service* dalam bahasa Inggris telah diindonesiakan atau dimelayukan masing-masing menjadi *daring* dan *luring*. Kedua kata ini merupakan bentuk dengan menggabungkan teknik penerjemahan dan singkatan dari *dalam jaringan* dan *luar jaringan*. Upaya dan tekad menghasilkan kata atau istilah baru ini adalah realisasi marwah atau harga diri bangsa Indonesia/Melayu. Kini para TKI di Malaysia dan Brunei Darussalam dan mahasiswa Indonesia di Malaysia, atau mahasiswa Malaysia di Indonesia tidak menghadapi masalah dalam menuliskan atau membaca kata atau menyampaikan sesuatu dalam bahasa tulisan.

b. Meningkatkan Kebersamaan dan Persaudaraan

MABBIM telah meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota, termasuk antarpemutur bahasa itu. Bahasa dengan ejaan sama, kata dan istilah sebagian besar sama, dan karya sastra yang dibahas secara bersama telah meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan antara pemakai bahasa Indonesia/Melayu di tiga negara itu. Halliday (2004) merinci bahasa berfungsi bagi penuturnya untuk memerikan, menghubungkan, memper-

tukarkan, dan merangkai pengalaman. Dengan parameter fungsi bahasa ini MABBIM telah menumbuhkan kesan pemerian, pertukaran, dan pengorganisasian pengalaman dengan cara yang sama, yang akhirnya menghasilkan persaudaraan yang kuat.

Persaudaraan wujud dengan realisasi pemakaian kata atau ekspresi baru yang diperoleh dari sesama negara anggota MABBIM. Sebelum tahun 1980'an di Kuala Lumpur orang menyebut STD atau *long distance call*, *bilik*, *orang gaji*. Kini di hampir semua tempat di Malaysia, orang telah terbiasa dengan kata *wartel*, *kamar* (misalnya *Kamar Canselor* di UPM), *pembantu rumah tangga* atau PRT, yakni kata yang berasal dari bahasa Indonesia. Panggilan *Bapak* dan *Ibu* untuk orang dewasa dalam situasi formal di Malaysia yang dulunya aneh bagi orang Malaysia (karena dalam konteks sosial Malaysia hanya ada *Bapa* dan *Ibu* di rumah tangga dan untuk panggilan itu digunakan *Saudara*, *Saudari*, *Tuan*, *Puan*, *Encik*, *Cik*) telah terbiasa dengan panggilan itu. Misalnya, mahasiswa Indonesia di Malaysia yang berurusan ke Kantor Imigrasi memanggil pejabat kantor itu atau memanggil dosennya dengan sapaan *Bapak* atau *Ibu*. Mahasiswa Malaysia di Indonesia juga terbiasa menggunakan sapaan itu. Di Indonesia pula digunakan kata *borang*, *sempadan*, *setakat*, *seronok*, *cabaran* yang dulunya bukan milik bangsa Indonesia. Mobilitas penduduk dalam wilayah anggota MABBIM dengan bahasa yang semakin sedikit perbedaannya telah membentuk persaudaraan yang kuat sesama penutur bahasa Indonesia/Malaysia.

c. Menjadikan Bahasa Indonesia/Melayu dengan Pemakaian dan Pemakai yang Lebih Luas

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh MABBIM telah menjadikan bahasa Indonesia/Melayu penghubung yang memiliki pemakaian dan pemakai yang lebih luas. Sebelum adanya kebijakan MABBIM, di Malaysia bahasa Melayu berperan sebagai bahasa per-

gaulan sementara bahasa Inggris digunakan dalam ranah pendidikan, administrasi pemerintahan, dan ilmu pengetahuan dengan anggapan bahasa Melayu tidak mampu menampung makna yang luas dan mendalam dalam ranah itu dan hanya bahasa modern seperti bahasa Inggris yang mempunyai kemampuan untuk itu. Oleh karena itu, bahasa Inggris dominan dalam ketiga ranah itu. MABBIM telah memperkaya bahasa Indonesia/Melayu dengan penambahan dan pengembangan kata dan istilah baru yang diperlukan dalam berbagai ranah pemakaian bahasa dalam masyarakat modern. Hal itu menambah keperkasaan bahasa Melayu dan pemakai bahasa menggunakannya dalam ketiga ranah itu. Di Indonesia pemakaian bahasa Indonesia dalam hampir semua ranah pemakaian bahasa didominasi oleh bahasa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada 1945 bahasa Indonesia digunakan dalam sistem pendidikan, administrasi pemerintahan, dan ilmu pengetahuan walaupun dengan anggapan bahwa bahasa Indonesia tidak mampu untuk itu karena keterbatasan kosakata. Kini dengan pemeraksaan bahasa Indonesia dengan ribuan kata dan istilah yang termuat dalam Glosarium Istilah dan yang diluncurkan dalam 2007 pakar dan ilmuwan Indonesia semakin bangga dengan bahasa Indonesia. Kebijakan dan kerja sama yang dilakukan oleh Pusat Bahasa Indonesia dengan perusahaan komputer dan telekom telah memperluas pemakaian bahasa Indonesia ke bidang komputer dan telekomunikasi. Kini di Indonesia orang dapat menggunakan bahasa Indonesia pada perangkat pengoperasian telepon genggam dan komputer.

Bahasa Indonesia/Melayu, yang telah diperkaya dan diperkasakan dengan kebijakan MABBIM, mendapat pemakai yang lebih luas karena dimotivasi oleh faktor luaran. Keteguhan hati menggunakan bahasa Indonesia/Melayu semakin kuat oleh pertentangan atau konflik. Konflik di Thailand Selatan telah memicu orang keturunan Melayu, yang umumnya beragama Islam, untuk lebih menguatkan dan mempertahankan identitas mereka. Demikian juga keadaan di Pilipina Selatan meningkatkan harga diri orang Melayu.

Konflik itu menguatkan keinginan mereka untuk mempertahankan kemelayuan dan pada saat yang sama keislaman sebagai identitas mereka termasuk dalam pemakain bahasa Indonesia/Melayu. Banyak mahasiswa Thailand yang memilih belajar di universitas di Indonesia dan Malaysia. Di Medan mahasiswa Thailand mendirikan perkumpulan dan mereka ingin lebih lama tinggal di Medan karena konflik berkepanjangan. Keadaan ini berarti pemerkuatan tekad mereka ke bahasa Indonesia/Melayu. Jika mereka pulang ke Thailand, dibenak mereka adalah bahasa Indonesia/Melayu yang ditulis dengan EYD. Walaupun konflik di Thailand dan Pilipina Selatan bukan yang diharapkan atau yang diinginkan MABBIM, malapetaka sosial di kedua negara anggota ASEAN itu telah menambah dan mengukuhkan pemakai bahasa Indonesia/Melayu di kawasan itu. Pada waktu yang akan datang diharapkan bukan hanya Singapura, tetapi juga Thailand dan Pilipina menjadi pengamat dalam persidangan MABBIM.

4. Melihat ke Masa Depan

Di samping kejayaan, keberhasilan, dampak sosial yang baik yang telah dicapai dan ditimbulkan MABBIM di satu sisi, di sisi lain keadaan, sikap, dan situasi yang kurang menguntungkan juga terjadi. Hal itu sejalan dengan perubahan dan dinamika masyarakat di negara anggota serta kecenderungan kesejagadan. Pada 2003 Pemerintah Malaysia mengumumkan kebijakan bahwa dalam sistem pendidikannya khususnya untuk pembelajaran matematika dan sains di sekolah digunakan bahasa Inggris sebagai pengantar. Keadaan ini bercanggah dengan kebijakan, tujuan dan fungsi MABBIM, yakni meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota, yakni bahasa Melayu, sebagai alat perhubungan yang lebih luas. Hal ini pertanda bahwa terdapat perbedaan pandangan antara politisi atau pemerintah dengan pakar bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jika perbedaan ini terus berlangsung dikha-

watirkan mengganggu kebijakan MABBIM. Di Indonesia saat ini keinginan masyarakat untuk mendidikkan anak mereka ke sekolah berkualitas dan bertaraf internasional sangat besar. Dianggap bahwa sebagai konsekuensi globalisasi, sekolah harus mampu bersifat global. Sekolah banyak yang menyebut diri sebagai "Sekolah Internasional" dengan bahasa pengantar pembelajaran bahasa Inggris. Keadaan ini jelas bertentangan dengan undang-undang pendidikan di Indonesia yang menetapkan bahwa bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jika keadaan ini berlangsung terus kebijakan MABBIM yang mengutamakan bahasa Indonesia tidak akan mendapat tempat. Sebagian anggota masyarakat di ketiga negara masih menganggap bahasa Indonesia/Melayu kurang bergengsi. Di Brunei Darussalam sarjana bidang bahasa dan sastra Melayu lebih lama menunggu daripada sarjana jurusan bahasa Inggris untuk mendapatkan pekerjaan. Di Malaysia dan Indonesia dianggap merek dagang, hotel, atau kegiatan bisnis dalam bahasa asing khususnya bahasa Inggris akan lebih cepat dan banyak mendatangkan uang daripada merek dagang atau kegiatan bisnis dalam bahasa Indonesia/Melayu walaupun khalayak bisnis yang dituju adalah penduduk setempat. Sikap dan mental anak jajahan yang selalu mengutamakan produk atau bahasa asing masing bertahan di kalangan penduduk.

Pada saat yang sama berlangsung peluang untuk pengembangan dan peningkatan pemakai dan pemakaian bahasa Indonesia/Melayu. Saat ini mahasiswa asing di Malaysia, khususnya dari negara sekitar kawasan Timur Tengah (Pakistan, Afganistan, Irak, Saudi Arabia, Yaman, Palestina) dan Afrika (Mesir, Marokko, Tunisia, Sudan, Ethiopia) meningkat, khususnya mahasiswa pascasarjana. Kebijakan nuklir Iran dan isu negatif terhadap Islam telah menghambat mahasiswa Iran dan negara di kawasan Timur Tengah belajar ke negara barat dan mereka membuat pilihan untuk belajar ke timur ke negara Islam, Malaysia. Mahasiswa asing yang sedang belajar di Malaysia atau Indonesia potensial menjadi pemakai

bahasa Indonesia/Melayu. Jika mereka kembali ke negeri mereka, para sarjana yang pernah belajar di Malaysia atau Indonesia ini potensial menjadi duta bahasa Indonesia/Melayu di negara mereka. Dengan kata lain, kecenderungan kesejagadan telah memberi peluang untuk perluasan pemakai bahasa Indonesia/Melayu di mancanegara. Pada saat ini pula jumlah orang yang ingin belajar bahasa Indonesia/Melayu meningkat. Demikian pula institusi yang mengajarkan bahasa Indonesia/Melayu, seperti jurusan kajian Indonesia/Melayu di universitas di mancanegara meningkat. Ekonomi dua negara anggota MABBIM, yakni Brunei Darussalam dan Malaysia cukup baik dengan investasi yang cukup besar. Ekonomi Indonesia semakin menuju ke arah kemandirian. Dengan ekonomi yang mantap dan komitmen MABBIM yang kuat, keputusan dan kebijakan yang diambil lebih mungkin tercapai. Indonesia sebagai negara terbesar dari ketiga anggota MABBIM memiliki karya seni yang diminati semua kalangan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Film dan lagu pop Indonesia sangat diminati masyarakat di kawasan itu.

Dengan merenung masa lalu dengan keberhasilan atau kejayaan dan kelemahan kebijakan MABBIM serta menimbang berbagai hambatan dan peluang untuk keberhasilan di masa depan, sejumlah langkah atau agenda baru dikemukakan dan diuraikan sebagai berikut.

a. Penyelarasan Visi Elit Politik dan Kebijakan MABBIM

Setiap anggota MABBIM sebaiknya memahami benar visi atau kebijakan elit politik atau pemerintahnya sehingga MABBIM tidak membuat keputusan yang harus diingkari sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa anggota MABBIM tidak dapat melakukan keputusannya atau terpaksa menghadapi keadaan yang berlawanan atau bercanggah dengan kebijakannya. Keadaan di Malaysia dengan kebijakan pemerintah menjadikan bahasa Inggris sebagai ba-

hasa pengantar untuk pembelajaran matematika dan sains di sekolah dan kecenderungan sekolah internasional di Indonesia adalah fakta pahit yang dihadapi oleh MABBIM. Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pusat Bahasa adalah bagian dari negara dan pemerintahnya. Elit politik atau pemerintah adalah mesin atau jentra yang menggerakkan institusi itu. Sebagai institusi yang mengurus bahasa kebijakannya adalah akademik dan ilmiah dan dapat berlawanan dengan kebijakan pemerintahnya. Kenyataan menunjukkan bahwa konflik antarilmuwan jarang terjadi dan walaupun terjadi sifatnya rasional, sementara konflik antarelit politik atau pemerintah sering terjadi dan sifatnya tertumpu pada kekuasaan yang cenderung membolehkan segala cara. Jika satu anggota MABBIM tidak dapat memenuhi komitmennya atau harus melakukan hal yang bertentangan dengan keputusannya, keadaan itu akan menjadi pemicu kesalingtidakpercayaan dan perpecahan bagi MABBIM. Selanjutnya, jika kebijakan MABBIM bercanggah dengan visi atau kebijakan elit politik atau pemerintah, institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pusat Bahasa akan ditentang dan realisasinya adalah pernyataan bahwa institusi itu dianggap institusi pemborosan dana dengan konsekuensi pengurangan atau penghapusan dana. Kebijakan MABBIM yang belum terlaksana perlu diubahsuai pelaksanaannya dengan kondisi terkini dengan mendasarkan strategi atau teknik pelaksanaan dengan situasi politik di negara masing-masing. Walau bagaimanapun kehandalan putusan atau kebijakan MABBIM berdasarkan kriteria ilmiah atau linguistik, kebijakan itu tidak akan terlaksana jika bertentangan atau bercanggah dengan visi elit politik.

b. Pusat Bahasa Indonesia/Melayu di Mancanegara dan Kerja Sama Antarbangsa

MABBIM secara bersama atau anggota MABBIM secara sendiri sebaiknya membuka Pusat Bahasa dan Kebudayaan di mancanega-

ra. Pembukaan Pusat Bahasa dan Kebudayaan akan memberi peluang bagi orang asing untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia/Melayu di negara mereka. Di samping itu, badan itu juga dapat berfungsi diplomatik bagi negara. Kerjasama oleh MABBIM dengan berbagai institusi di dalam negeri dan mancanegara perlu digalakkan dan dikembangkan terus. Khusus untuk institusi pendidikan MABBIM diharapkan menyediakan tenaga pengajar bahasa Indonesia/Melayu.

c. Kebijakan MABBIM Difokuskan kepada Remaja

Sikap menganggap bahasa Indonesia/Melayu lebih rendah dari bahasa asing umumnya terdapat pada generasi tua walaupun harus dipahami juga bahwa sebagian generasi tua sangat mencintai dan bangga dengan bahasa itu. Dengan demikian kebijakan MABBIM pada tahun mendatang lebih terpusat pada kalangan remaja yang saat ini berada di jenjang pendidikan sekolah dan universitas. Penulisan karya ilmiah, baca puisi, debat dan kegiatan bahasa harus digalakkan dan diperlombakan dikalangan remaja. Konsentrasi kegiatan dilakukan di pusat kota untuk menghimpun semua remaja dari berbagai penjuru. Di tingkat nasional di Indonesia kegiatan ini telah dilakukan dengan Pusat Bahasa sebagai penggeraknya dan dilakukan setiap tahun. Yang perlu dilakukan dalam masa depan adalah perlombaan keterampilan kebahasaan dan kesastraan di tingkat internasional atau anatarnegara anggota. Perlombaan kebahasaan dan kesastraan oleh remaja yang duduk di sekolah menengah atau universiats antara Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia dilakukan secara bergilir di Bandar Sribegawan, Jakarta dan Kuala Lumpur. Para remaja memiliki potensi eksplorasi dan kreasi tinggi dan pertemuan sesama remaja dari negara anggota MABBIM akan memotivasi kebersamaan, persaudaraan, dan perkauman yang lebih erat. Kebersaman dan persaudaraan dalam bingkai kebijakan MABBIM dengan bahasa Indonesia/Melayu se-

bagai perekat akan memiliki efek ganda yang lebih besar dan lebih lama pada remaja daripada generasi tua.

d. Pengenalan Kata atau Istilah Baru Secara Kontekstual

Kata dan istilah baru yang dibuat oleh MABBIM cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dan pemakai yang lebih luas. Namun, kenyataan menunjukkan kecenderungan bahwa pemakai bahasa Indonesia/Melayu masih menggunakan kata atau istilah asing, khususnya kata atau istilah bahasa Inggris. Masyarakat beranggapan bahwa bahasa Indonesia/Melayu belum memiliki kata atau istilah tertentu. Walaupun Glosarium Istilah telah diluncurkan di Indonesia oleh Pusat Bahasa dalam 2007 lalu, para pakar dan ilmuwan masih menggunakan bahasa asing. Jika pengetahuan para pemakai bahasa ini memang belum ada, langkah yang terbaik adalah memperkenalkan kata atau istilah secara kontekstual. Dengan kerja sama dan bantuan institusi yang relevan satu kata atau istilah dapat diperkenalkan secara alamiah dan kontekstual. Pengenalan kata secara alamiah dan kontekstual memiliki kesan yang tinggi dan memotivasi penggunanya. Misalnya, ketika meresmikan satu proyek, pejabat dapat menggunakan kata atau istilah baru kepada khlayak pada acara itu yang secara alamiah akan dapat menerima kata baru itu. Konteks sosial perkenalan kata atau istilah itu akan masuk ke benak khlayak dan akan bertahan lama. Di perguruan tinggi konteks sosial untuk memperkenalkan kata atau istilah baru lebih banyak. Para rektor, dekan, ketua jurusan atau pejabat universitas memiliki kuasa semantik dan peluang yang lebih banyak untuk memperkenalkan kata atau istilah baru. Misalnya, pada acara wisuda rektor berpeluang menggunakan kata atau istilah baru dalam pidatonya. Kata atau istilah baru itu akan melekat di benak wisudawan dan akan bertahan lama. Dengan cara perkenalan kontekstual ini MABBIM menjemput masa dan massa atau khlayaknya untuk 'memasarkan' kata atau istilah baru. Glosa-

rium Istilah sebagai produk MABBIM tidak hanya tersimpan di gudang atau di lemari, tetapi langsung dipasarkan kepada khlayak.

e. Penemuan Baru dengan Nama dari MABBIM

Lembaga riset, seperti LIPI di Indonesia atau MARDI di Malaysia, universitas, dan institusi pendidikan adalah institusi yang paling banyak membuat penemuan ilmiah atau teori. Kegemilangan satu penemuan adalah dengan melekatnya nama baru kepada penemuan itu. MABBIM sebaiknya berperan dalam penamaan penemuan baru ini. Penemuan baru ini menjadi kebanggaan bagi negara dan pada saat yang sama menjadi lahan pemerksaan bahasa Indonesia/Melayu.

f. Revitalisasi Kejayaan Sseni di Negara Anggota MABBIM

Pada zamannya seniman Indonesia dan Malaysia berjaya mengangkat seni sastra Indonesia/Melayu. Pengarang seperti Marah Rusli, Amir Hamzah, Hamka, dan yang sekelas dengan itu dikagumi pada zaman mereka. Para seniman film dan penyanyi, seperti P Ramli, Usmar Ismail, Saloma amat diminati pada zaman mereka di Indonesia dan Malaysia. Kejayaan dan kemashuran seni Indonesia dan Malaysia perlu digalakkan kembali dan direvitalisasi agar bidang sastra dan seni ini dapat mengangkat marwah bangsa dan bahasa Indonesia/Melayu. Untuk mengeratkan hubungan antara penutur dalam pemakaian bahasa Indonesia/Melayu film Indonesia yang ditayangkan di (televisi) Malaysia sebaiknya tidak disertai terjemahan tertulis (*subtitle*) lagi karena hanya sedikit sekali perbedaan kedua bahasa itu, seperti lagu-lagu populer Indonesia atau lagu *dangdut* Indonesia yang bebas disiarkan di program radio di Malaysia. Lagu-lagu populer Indonesia sangat digemari di Malay-

sia, demikian juga lagu-lagu rentak asli Melayu yang dinyanyikan Siti Nurhaliza sangat disukai di Indonesia, khususnya di Sumatra.

g. Penerbitan Bersama oleh MABBIM

Karya ilmiah dan sastra para ilmuwan dan seniman Indonesia/Malaysia perlu dimasyarakatkan di kalangan anggota MABBIM dan di mancanegara. Untuk itu diperlukan pengaturan penerbitan bersama dengan pengaturan yang saling menguntungkan sesama anggota.

5. Simpulan

MABBIM telah berkarya untuk memenuhi tugas dan fungsinya selama 36 tahun. Karya dan kegiatannya telah dirasakan di ketiga negara anggota, khususnya oleh kelas menengah ke atas dan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi di antara anggota MABBIM. Renungan ke masa lalu dan antisipasi ke depan merupakan strategi yang baik dan perlu dilakukan oleh MABBIM. Dengan menimbang konteks sosial masa lalu dan saat ini serta antisipasi kesejagadan ke depan, sejumlah agenda baru atau kebijakan perlu dilakukan untuk keberjajaan MABBIM. Dengan merenung masa lalu dan menjemput masa depan, MABBIM menjadi semakin dewasa dan dapat merentas batas untuk mewujudkan visinya.

Rujukan

- Halliday, M. A. K. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*, Edisi 2. London: Edward Arnold.
- _____, M. A. K 2005. On Grammar and Grammatics. Dalam Webster, J. J. (ed.) *On Grammar*. London: Continuum, halaman 384–417.

Martin, J. R. 2000. Analysing Genre: Functional Parametres. Dalam Christies, F. dan J. R. Martin (eds) *Genre and Institution*, London: Continuum, halaman 3—39.

PERANCANGAN STATUS

Prof. Madya Dr. Haji Jaludin bin Haji Chuchu
Universiti Brunei Darussalam

1. Pendahuluan

Perancangan bahasa bukanlah sesuatu perkara yang baru dan ternyata sudah lama dilaksanakan terutama sekali di negara-negara membangun sebaik-baik sahaja negara tersebut mencapai kemerdekaannya. Hal ini berlaku disebabkan sebelum mencapai kemerdekaan kebanyakan negara berkenaan menggunakan bahasa penjajah di dalam urusan berbagai-bagai bidang kehidupan terutama sekali di dalam pentadbiran. Apabila sahaja sesebuah negara itu mencapai kemerdekaan timbullah usaha mengadakan satu bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sebagai lambang identiti dan kedaulatan negara.

Dalam konteks pendaulatan Bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam, negara ini mempunyai pengalaman yang sangat unik dan luar besar sekali. Keunikan dan keluarbiasaannya ini terletak dalam hal penglegalsisian Bahasa Melayu (seterusnya BM) dan memartabatkannya ke satu puncak yang tinggi. Hal ini jelas dapat dibuktikan dalam *Perlembagaan Negari Brunei 1959* (seterusnya *PNB 1959*) seperti yang termaktub dalam Bab 82 (1) yang menyatakan bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Permak-tuban bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dilegalisasikan sebelum Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada 1

Januari 1984. Walhal pelegalisasian bahasa Melayu telah dimak-tubkan 25 tahun sebelumnya iaitu pada 29 September 1959 sebe-lum Negara Brunei Darussalam mencapai statusnya sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat. Kenapa dikatakan Negara Brunei itu unik dan luar biasa? Bagi kebanyakan negara-negara Melayu di rantau ini, pendaulatan dan penglegalisasian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara didaulatkan dan dilegalisa-sikan setelah negara berkenaan mencapai kemerdekaan. Namun tidak bagi Negara Brunei Darussalam kerana pendaulatan bahasa Melayu telah dilegalisasikan sebelum Negara Brunei Darussalam mencapai status pemerintahan penuh. Setelah Negara Brunei Da-russalam mencapai kemerdekaannya pada 1 Januari 1984, status dan martabat Bahasa Melayu sekali lagi diperkuatkan dengan me-letakkannya sebagai salah salah konsep dan entiti dalam falsafah Melayu Islam Beraja. Betapa unik dan luar biasanya Bahasa Melayu dalam konteks Negara Brunei Darussalam.

Menurut Dato Paduka Awang Haji Alidin (2001) *PNB 1959* memainkan peranan yang penting dalam lipatan sejarah bangsa di Negara Brunei Darussalam. *PNB 1959* merupakan asas dan tapak awal perjalanan bangsa untuk mencapai cita-cita untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat dan merdeka. Hal ini jelas dapat digambarkan apabila sesebuah bangsa yang tidak mendaulatkan bahasanya adalah meru-pakan sebuah bangsa yang kehilangan harga diri dan jati dirinya. Dengan sebab itulah atas keperihatinan Al-Marhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Begawan Sultan telah meletakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Berikutan dengan per-letakan dan pendaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, usaha-usaha kerajaan dalam mengekalkan dan menda-ulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi mula diurak langkah. Kertas kerja ini membincangkan usaha-usaha dan perancangan sta-tus bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dimartabatkan dan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sebuah agensi

kerajaan yang diamanatkan dalam merancang, membina, mengembangkan dan mempertahankan bahasa Melayu tetap utuh dan berdaulat seperti maksud *PNB 1959* dan seterusnya mengangkat bahasa Melayu sebagaimana dalam falsafah negara Melayu Islam Beraja. Dua bahagian akan dibincangkan; perancangan status selepas *PNB 1959* dan perancangan status selepas pengisytiharan falsafah Melayu Islam Beraja iaitu pada 1 Januari 1984.

2. Konsep Perancangan

Perubahan dan perkembangan sesuatu bahasa itu (baik apa bahasa sekalipun), dalam konteks ini BM di Negara Brunei Darussalam, dapat dikatakan dirancang secara disengajakan kerana bahasa itu dapat berubah sesuai dengan kehendak dan kemahuan masyarakatnya sebagai penutur bahasa tersebut. Salah satu agenda yang dilakukan oleh pelaksana dan perancang bahasa untuk mengubah dan mengembangkan bahasa itu ialah dengan melakukan pelbagai kegiatan perancangan terhadap bahasa yang hendak dikembangkan dan dibina. Dan kerana itu perubahan dan pengembangan bahasa berhubung erat dengan perancangan bahasa. Dalam membicarakan soal perancangan bahasa, yang harus dilihat ialah konsep, dimensi dan arah atau hala tuju perancangan bahasa. Hal ini adalah kerana kejayaan bahasa sebagai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan sesebuah negara memenuhi keperluan dalam segala bidang kehidupan rakyat adalah dicapai melalui perancangan yang baik.

Berbagai pendapat diutarakan mengenai soal perancangan bahasa oleh pengamat, dan pakar bahasa. Haugen dalam Moeliono (1985) menjelaskan konsep perancangan bahasa sebagai usaha untuk membimbing perkembangan ke arah yang diinginkan oleh para perancang. Konsep perancangan bukan sahaja meliputi peramalan masa depan berdasarkan apa yang diketahui pada masa yang lalu atau silam malah perancangan itu juga meliputi sesuatu usaha yang

terarah untuk menciptakan sesuatu di masa hadapan. Sultan Takdir Alisjahbana juga berpendapat bahawa perancangan bahasa bermaksud bagaimana memimpin pertumbuhan bahasa dalam masyarakat sehingga bahasa itu dapat dipakai sebagai alat yang sebaik-baiknya dalam hubungan masyarakat dan kebudayaan seperti yang dikehendaki.

Garvin (dalam Anshari, 2007) pula membezakan perancangan bahasa kepada dua; pemilihan bahasa untuk tujuan sebagai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan, dan pengembangan bahasa untuk meningkatkan taraf keberaksaraan dan usaha membakukan bahasa. Gorman (dalam Anshari, 2007) pula mengemukakan perancangan bahasa sebagai tindakan koordinatif yang diambil untuk memilih, mengkodifikasikan dan mengembangkan aspek ejaan, tata bahasa, leksikon bahasa dan menyebarkan bentuk-bentuk yang telah dipersetujui oleh masyarakat sebagai pemakai bahasa berkenaan.

Secara kesimpulannya, perancangan bahasa merupakan usaha dan tindakan yang dilakukan secara disengajakan dan disepakati oleh sesebuah negara yang menentukan bahasanya dapat digunakan dengan lancar dalam segala bidang kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, pentadbiran, ekonomi dan politik supaya usaha penyatuan rakyatnya tercapai. Bagi negara yang mempunyai lebih daripada satu bahasa pula perancangan bahasa bermaksud penentuan bahasa yang akan dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

Apakah dimensi perancangan bahasa? Kloos (dalam Anshari, 2007) membezakan dua dimensi perancangan bahasa; perancangan status dan perancangan korpus bahasa. Perancangan status bahasa menyangkut penentuan kedudukan bahasa dan hubungannya dengan bahasa yang lain, sedangkan perancangan korpus antara lain menyangkut pengubalan sistem ejaan dan pembentukan istilah.

Dalam hal perancangan status bahasa meliputi kegiatan pemilihan, penentuan dan penetapan kedudukan dan fungsi bahasa yang digunakan dalam sesebuah negara untuk dijadikan bahasa

rasmi atau bahasa kebangsaan. Perkara ini sangat menyangkut tentang kebijaksanaan sesebuah negara untuk memilih, menentukan dan menetapkan bahasa yang mana yang akan dijadikan sebagai bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan. Setelah dipilih, langkah seterusnya ialah kebijaksanaan sesebuah negara untuk menentukan fungsi bahasa tersebut berdasarkan kedudukan atau martabat yang diberikan. Hal ini melibatkan kebijakan pemerintah dalam menentukan fungsi bahasa yang dijadikan sebagai bahasa rasmi. Perancangan korpus bahasa pula terjadi setelah perancangan status bahasa ditetapkan. Perancangan ini meliputi kegiatan atau usaha pihak yang dipertanggungjawabkan untuk membuat penggubalan, pembentukan, pembakuan korpus sesuatu bahasa. Korpus bahasa itu meliputi hal fonologi (sistem bunyi), morfologi (sistem pembentukan kata), sintaksis (sistem pembentukan tata bahasa) dan semantik (pola pemaknaan). Jadi perancangan korpus bahasa itu sangat berhubung dengan aspek linguistik dan aktiviti perancangan yang melibatkan para ahli bahasa.

Moeliono (1985) berpendapat bahawa pihak perancang bahasa adalah merupakan di kalangan badan atau agensi pemerintah yang secara khusus diberikan mandat untuk memaju dan mengembangkan bahasa dan pemakaiannya, atau di luar dari kuasa pemerintah yang secara berkelompok atau individu, mengambil peranan dalam perancangan pengembangan atau pembinaan bahasa. Menurut beliau lagi, jika arah perancangan bahasa itu dilakukan oleh agensi pemerintah dan masyarakat hanya menerima hasil perancangan itu, maka arah perancangan itu dinamakan sebagai **PERANCANGAN DARI ATAS KE BAWAH (PAKB)** (*top down*). Sebaliknya jika perancangan itu dilakukan atas inisiatif masyarakat, baik secara berkelompok ataupun individu, maka arah perancangan itu dinamai sebagai **PERANCANGAN DARI BAWAH KE ATAS (PBKA)** (*bottom up*) atau perancangan berpartisipasi.

Kedua-dua bentuk perancangan di atas, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan PAKB ialah proses pengambilan keputusan lebih cepat kerana dikoordinasi oleh suatu

badan rasmi, tidak memerlukan waktu yang lama dan jangkauan penyebaran hasil perancangan sangat luas. Kelemahan PAKB pula ialah tiada jaminan bahawa apa yang dirancang atau diputuskan dari atas sesuai dengan keperluan masyarakat dan sering terdapat ketidaksesuaian antara keinginan dari atas dan kemampuan masyarakat untuk menerimanya. Sementara itu dalam PBKA, kekuatannya ialah secara tepat dapat diketahui apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa, pelaksanaan dalam masyarakat dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab kerana selari dengan kehendak masyarakat. Sedangkan kelemahan PBKA pula soal aktiviti perancangan yang memerlukan waktu yang lama, tidak efisien, proses pengambilan keputusan yang lama dan belum tentu mendapat restu dari pemerintah dan penyebaran hasil perancangan sangat terbatas.

Melihat dari dua jenis arah perancangan ini, setentunya pengalaman Negara Brunei Darussalam dalam menangani isu kebahasaan dan sekali gus pemartabatan bahasa Melayu sangat berbeza. Pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara di negara ini adalah merupakan formulasi dari PAKB dan PBKA. Dalam erti kata yang lain, rakyat dan penduduk di negara ini mahukan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi negara dan hasrat ini selari dengan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah di negara ini. Justru itu, apabila sahaja pemerintah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan dilegalisasikan dalam *PNB 1959*, hasrat ini sangat disambut baik oleh rakyat dan penduduknya dan didukung serta disemangati oleh masyarakat Brunei Darussalam. Hal ini dapat dibuktikan dalam bahagian sejarah pemartabatan BM di Negara Brunei Darussalam. Secara umumnya, apabila memperkatakan soal konsep perancangan bahasa, maka konsep, arah dan dimensi perancangan harus difahami agar setiap langkah dalam perancangan bahasa untuk menjadikan sesuatu bahasa itu sebagai bahasa rasmi dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dengan yang demikian, pemerintah atau perancang bahasa dapat melaksanakan dengan licin dan dapat menjadikan sebagai jati diri bangsa.

3. Sejarah Pemartabatan BM di Negara Brunei Darussalam

Pada umumnya setelah sesebuah negara mencapai kemerdekaan maka timbullah usaha memilih dan menentukan bahasa manakah yang sesuai untuk dijadikan bahasa rasmi negara. Hal ini berlaku disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, ialah faktor penjajahan. Dalam era penjajahan, negara yang dijajah tidak terlepas dari faktor bahasa. Selain daripada soal perekonomian, politik yang dijajah, pihak kolonial juga berusaha untuk menanamkan masalah bahasa di setiap negara yang dijajah. Dalam hal ini, bahasa Inggeris mula diperkenalkan agar usaha dan strategi kolonial dapat berjalan dengan lancar melalui sistem komunikasi. Apabila ini terjadi, timbul masalah sama ada hendak mengekalkan bahasa penjajah yang sudah sebatian dengan rakyat atau memilih bahasa sendiri atau bahasa ibunda.

Jika sesebuah negara itu memilih bahasa penjajah untuk dijadikan sebagai bahasa rasmi, maka timbul konflik dalaman iaitu hilangnya sebuah jati diri sesebuah bangsa berkenaan. Jika memilih bahasa ibunda perlu pula membuat penentuan bahasa yang manakah yang seharusnya dipilih, kerana pada umumnya bahasa ibunda bagi sesebuah negara itu kadang-kadang banyak. Masing-masing bangsa atau puak mahu mengaku bahawa bangsa atau puak mereka yang layak dipilih sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Kadang-kadang dalam usaha penentuan bahasa ini boleh menimbulkan persengketaan yang boleh membawa pertumpahan darah. Pada umumnya bahasa yang dipilih adalah bahasa yang dapat diterima oleh sebilangan besar rakyat negara berkenaan.

Perancangan bahasa berkait rapat dengan sistem politik negara berkenaan. Oleh itu usaha memilih dan menentukan bahasa yang akan dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara merupakan sebuah keputusan politik. Kemudian sesebuah negara itu akan mengadakan dasar bahasanya yang tersendiri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sosiopolitik, kemasyarakatan dan komunikasi. Pada umumnya ahli linguistik tidak ter-

libat dalam menentukan dasar bahasa ini. Dasar bahasa sesebuah negara adalah ditentukan oleh tindakan politik negara berkenaan dan status atau taraf bahasa akan ditentukan melalui dasar bahasa. Apabila sesuatu bahasa dipilih untuk dijadikan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi maka timbul pula usaha untuk pembinaan bahasa itu. Oleh itu perancangan bahasa akan menghadapi dua peringkat; peringkat penentuan dan peringkat pembinaan bahasa yang akan dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

Dalam konteks Negara Brunei Darussalam, apabila sahaja negara ini mula menerima sistem pemerintahan Residen British pada tahun 1906, pada dasarnya British Residen hanya melepaskan pentadbiran yang berkaitan dengan agama, adat istiadat manakala sistem politik, keselamatan dan ekonomi ditadbir oleh British Residen. Kedatangan kuasa asing atau penjajah ini bukan sahaja menguasai bahan mentah negara, sistem politik, bagi memperluaskan pengaruh dan kekuasaan mereka, malah bahasa Melayu secara langsung mendapat tekanan akibat kuasa bangsa penjajah yang lebih mengutamakan bahasa mereka sendiri. Mulai dari tahun ini iaitu tahun 1906, atas kebijaksanaan pemerintahan Almarhum Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan restu rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam, maka formulasi untuk memuatkan aspek agama, adat istiadat mula dirancang dengan teliti untuk dijadikan sebuah perlembagaan yang tertulis sebagai persediaan negara ini untuk mendapat status penuh sebagai sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat (rujuk *PNB 1959*).

Dalam konteks penglegalisasian dan pemartabatan BM di Negara Brunei Darussalam, Haji Abd Rahman Taib¹ menegaskan bahawa ada tiga faktor yang menyebabkan BM tercatat dalam Bab 82 (1) *PNB 1959* itu. Pertama berhubung dengan sejarah kegemilangan bahasa ini di negara ini. Kedua, BM sudah menjadi darah da-

¹Sekarang dikenali sebagai Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Pahlawan Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Awang Mohd Taib.

ging bangsa Brunei dan faktor ketiga ialah BM sebagai alat penyatuan bagi rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Dalam menyoroti faktor ketiga ini, sememangnya BM merupakan bahasa yang majoriti dituturkan, difahami dan dijadikan sebagai alat komunikasi berbilang kaum. Justru itu, BM dijadikan sebagai bahasa rasmi bagi negara ini seperti yang tercatat dalam Bab 82 (1) *PNB 1959*. Tercatatnya rentetan kata yang keramat itu adalah didasari daripada suasana yang dihadapi oleh Negara Brunei Darussalam pada ketika itu malah sehingga ke hari ini.

4. Perancangan Status Selepas *PNB 1959*

Perancangan BM selepas sahaja *PNB 1959* dimeterai mempunyai sejarah yang sangat indah bagi negara ini. Mulai 29 September 1959, negara ini ini mencatat satu perubahan baru dalam kedudukan dan susunan pemerintahannya. Sejak dari tarikh tersebut, negara ini telah mencapai taraf pemerintahan sendiri yang penuh seperti yang termaktub dalam *PNB 1959*. Dalam Bab 82 (1) diperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Sehubungan dengan ini sebuah jawatankuasa telah dibentuk bagi memastikan kedaulatan BM dapat dijamin sebagai bahasa rasmi negara. Pembentukan jawatankuasa ini adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Negeri yang bersidang pada 19 April 1960 yang meluluskan sebuah usul;

'Majlis ini meluluskan supaya kerajaan membentuk satu badan yang bebas yang bertanggungjawab kepada kerajaan untuk memeriksa perkara-perkara yang berhubung dengan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi seperti yang dikehendaki dalam perlembagaan'

Ketelitian kerajaan dan keseriusan kerajaan dalam menubuhkan Lembaga Bahasa yang akan bertanggungjawab terhadap perkembangan BM adalah sangat wajar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pelan tindakan sebelum Lembaga Bahasa ditubuhkan. Sebelum kerajaan membuat keputusan mengenai pembentukan satu badan bebas yang berkenaan, kerajaan telah menghantar satu rombongan seramai lima orang ke Kuala Lumpur bagi memerhati dan mempelajari keadaan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk dijadikan panduan (Pengiran Dato Paduka Haji Badaruddin, 2000-). Hasil daripada lawatan kerja ke Malaysia ini, rombongan telah menghadapkan laporan yang seterusnya dibawa ke Majlis Mesyuarat Negeri pada 29 November 1960. Hasil dari sidang Majlis Mesyuarat Negeri tersebut, pada dasarnya sebuah Lembaga Bahasa ditubuhkan di bawah Jabatan Pelajaran diluluskan dan Pegawai Pelajaran Negara diarah untuk melantik seorang Pengarah bagi mengatur dan membuat perancangan yang berhubungan dengan penubuhan Lembaga Bahasa itu.

Hasil laporan Pegawai Pelajaran Negara telah diusulkan untuk dibawa Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada 16 September 1961. Bermula dari tarikh ini, bermulalah pendaulatan dan pemartabatan BM apabila Lembaga Bahasa ditubuhkan di pentadbiran Jabatan Pelajaran dan diketuai oleh seorang ketua bertaraf Pengarah bagi memastikan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi terjamin. Namun tidak lama selepas itu, Lembaga Bahasa ditukar namanya sebagai Bahagian Bahasa dan Pustaka demi kesesuaian nama dan bidang tanggungjawabnya. Perkara ini mendapat restu daripada Majlis Mesyuarat Negeri. Empat tahun selepas itu, Bahagian Bahasa dan Pustaka diasingkan dari kuasa tadbir Jabatan Pelajaran dan diberi kuasa otonomi. Pertukaran Bahagian Bahasa dan Pustaka kepada Dewan Bahasa dan Pustaka bermula pada 1 Januari 1965 dan pada 29 September 1968 Dewan Bahasa dan Pustaka dibuka dengan rasminya. Perletakan batu asas bangunan ini dilakukan oleh Almarhum Duli Yang Maha Mulia Paduka

Seri Begawan Sultan Haji Omar Ali Saifuddien pada 29 September 1965.

Penubuhan daripada Lembaga Bahasa kepada Dewan Bahasa dan Pustaka jelas menunjukkan keseriusan kerajaan dalam mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Setelah BM dijadikan bahasa rasmi negara, diwujudkan sebuah lembaga sebagai tapak untuk merealisasikan BM sebagai bahasa rasmi negara. Lembaga ini diberikan amanah dan tanggungjawab yang besar dalam memikul dan mengembangkan BM sebagai bahasa rasmi. Hal-hal yang berhubung dengan bahasa baik dari pihak agensi kerajaan, swasta atau individu harus melalui Lembaga Bahasa atau Dewan Bahasa dan Pustaka pada waktu itu dan pada masa kini.

Kini Lembaga Bahasa (pada waktu itu) dan Dewan Bahasa dan Pustaka telah diwujudkan. Walaupun nama agensi ini berubah daripada Lembaga Bahasa berubah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, namun yang jelas fungsi dan peranannya tetap sama; iaitu mendaulatkan BM sebagai bahasa rasmi dan membuat perancangan-perancangan yang tidak kendur-kendur dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Perlu diingat bahawa wujudnya *PNB 1959* yang tertulis dan dilegalisasikan adalah untuk menjamin serta menempatkan kedudukan BM dapat berdiri dengan teguh daripada sebarang pencemaran dan persaingan bahasa Inggeris.

Setelah tertubuh Lembaga Bahasa, kedudukan BM diperkuatkan lagi dengan adanya ikrar daripada rakyat Negara Brunei Darussalam yang menyambut baik terhadap kebijaksanaan kerajaan untuk melaksanakan penggunaan BM seperti kehendak *Bab 82 (1) PNB 1959*. Hal ini dapat dilihat dalam ikrar yang berbunyi;

'Bahawa kami rakyat dan penduduk Negeri Brunei mengaku taat setia serta berbakti kepada negara ini dan kami mengaku memuliakan taraf kedudukan bahasa Melayu seperti maksud Perlembagaan Negeri Brunei bab 82 (1),

Dengan ini kami mengaku mengembang dan menggunakan bahasa Melayu dalam segala lapangan serta akan mengembangkan bahasa Melayu dengan apa cara jua untuk menyerahkan kasih dan taat setia kami kepada Sultan dan negara,

Dengan ini kami berikrar akan memberikan sumbangan-sumbangan kami dengan sebenar-benarnya dengan tidak berbelah bagi.²

Daripada ikrar ini ternyata, rakyat dan penduduk Brunei Darussalam menyambut baik terhadap PNB 1959. Terdapat empat intipati yang terkandung dalam ikrar keramat rakyat dan penduduk ini;

1. taat setia dan berbakti kepada negara
2. memuliakan taraf kedudukan BM sebagai bahasa rasmi
3. mengembang dan menggunakan BM dalam semua lapangan
4. memberikan sumbangan yang tidak berbelah bagi terhadap perkembangan BM

Keempat intipati keramat ini sudah cukup meyakinkan kepada kita bahawa betapa semangat dan sokongan rakyat dan penduduk terhadap penglegalisasian BM sebagai bahasa rasmi. Ikrar daripada rakyat dan penduduk Brunei Darussalam ini bukan suatu hal yang dirancang atau dipaksa oleh kerajaan namun lahir daripada semangat yang berkobar-kobar di kalangan rakyat dan penduduk Brunei Darussalam apabila sahaja BM dilegalisasikan dalam PNB 1959.

Sokongan dan sambutan rakyat dan penduduk Brunei Darussalam bukan sahaja dilihat daripada ikrar yang tersebut di atas,

² Lihat Fatimah Haji Mohd Hussain, 1987.

malah ditunjukkan dalam Bulan Bahasa yang diadakan pada tahun 1962. (lihat Bahasa Jiwa Bangsa Jilid 1, 2000). Di akhir kempen Bulan Bahasa tersebut, ternyata usaha Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membuktikan bahawa BM adalah suatu bahasa yang kukuh, hidup dan sentiasa menerima. Melalui kempen Bulan Bahasa ini, kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit seperti mendirikan papan-papan tanda “Utamakan Bahasa Melayu”, “Bahasa Jiwa Bangsa” dan “Gunakanlah Bahasa Melayu”. Usaha kerajaan ini sekali gus menolak kenyataan yang dikeluarkan akhbar tempatan tentang kewibawaan BM.

Sementara itu fungsi dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh kerajaan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai agensi yang bertanggungjawab terhadap perancangan BM tidak kendur-kendur dalam menjalankan tugasnya. Antara tugas dan tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka dalam perancangan bahasa itu ialah;

1. berusaha dan berikhtiar untuk memper kembang dan meninggikan BM.
2. menyesuaikan pemakaian BM yang telah dijadikan Bahasa Rasmi Negeri ini mengikut kehendak dan semangat Perlembagaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bab 82 (1) dari perlembagaan;
3. mengeluarkan atau menentukan pengeluaran buku-buku;
4. menyatupadukan ejaan-ejaan dan sebutan-sebutan dan mengadakan perkataan-perkataan teknikal dalam BM;
5. menggalakkan orang-orang yang berkebolehan dalam mempelajari BM.

Sejak tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka ini, projek-projek bahasa yang diadakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Antaranya;

1. menerangkan kepada rakyat tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negeri. Kempen penggunaan BM diadakan seperti Kempen Bulan Bahasa dan Perkembangan Bahasa dan Budaya di radio.
2. mengadakan kelas-kelas untuk mempelajari BM

3. mengadakan istilah
4. menubuhkan Jawatankuasa Pengawalan Penggunaan BM dalam sektor swasta yang ditubuhkan pada awal tahun 19-70.
5. mula mengusahakan penyusunan Kamus Perbendaharaan Kata Melayu-Brunei.
6. mengadakan penterjemahan
7. menerbitkan buku-buku dan majalah dalam bahasa Melayu.

Perancangan status BM sebagai bahasa rasmi bukan sahaja ditangani oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka saja, malah agensi kerajaan seperti Kementerian Pendidikan, badan-badan sukarela dan sikap masyarakat Brunei juga turut terlibat dalam menanai tugas ini. Keempat-empat agensi yang saya sebutkan ini harus dan telah berganding bahu dalam melaksanakan BM sebagai bahasa rasmi.

Dalam sistem pendidikan negara, kurikulum dalam BM dapat diajarkan kepada anak-anak sekolah di Brunei Darussalam. Melihat daripada sistem pendidikan ini, terdapat dua corak sistem pendidikan di Brunei Darussalam; sistem pendidikan sebelum merdeka dan sistem pendidikan selepas kemerdekaan. Semasa sistem pendidikan sebelum merdeka, disarankan dalam sistem pendidikan negara itu berdasarkan laporan Aminudin Baki dan Paul Chang 19-59 (dalam Bujang Haji Matnoor: 2000) dalam mana mewajibkan dan menggunakan bahasa kebangsaan (BM) sebagai bahasa pengantar utama. Daripada kenyataan ini dapat dilihat bahawa semua sekolah kerajaan kecuali sekolah kerajaan aliran Inggeris menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sungguhpun pada umumnya kanak-kanak sekolah yang berada dalam sekolah kerajaan aliran Melayu merasakan tercabar dengan kedudukan rakan mereka daripada aliran Inggeris, namun Laporan Pelajaran Tahun 1972 dapat menangkis abaran berkenaan. Laporan Pelajaran Tahun 1972 menyebut sebagai

“untuk menjadikan secepat mungkin bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah rendah dan menengah kebangsaan sesuai dengan kehendak perlembagaan.”

Laporan di atas ternyata mengangkat kedudukan BM dan diberi keutamaan dalam merangka dasar pelajaran di Negara Brunei Darussalam dan dengan adanya dasar negara ini BM dapat dikembangkan dan dikuasai dengan baik sekali. Kedudukan BM dalam sistem pendidikan negara selepas kemerdekaan akan dibincangkan dalam perancangan BM selepas kemerdekaan di bawah.

Bagaimana pula sumbangan badan-badan sukarelawan atau NGO? Salah satu badan NGO yang bergiat aktif dalam memperkembangkan BM adalah Persatuan Asterawani. Persatuan ini juga turut terlibat dalam menegak dan menggerakkan BM terus berkembang. Antara tujuan dan matalamat dasar Persatuan Asterawani ini ialah

“Memperluas dan mempertinggi bahasa dan kesusasteraan Melayu yang bersesuaian dengan kepentingan nasional. Menyatupadukan penulis-penulis tanah air dari semua peringkat dan segala aliran pendapat” (dalam Bujang Matnoor: 2000).

Sumbangan persatuan ini dapat dianggap sebagai sumbangan yang besar ertinya dalam mendokong hasrat PNB 1959. Selain turut mengadakan peraduan menulis cerpen, novel, dan puisi, persatuan ini juga turut sama dalam mengetengahkan dan memberigakan BM baik di dalam negeri mahupun luar negara.

Perancangan BM bukan setakat itu sahaja dilaksanakan oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas, malah dalam soal penganugerahan biasiswa untuk melanjutkan pelajaran keluar dan dalam negeri, seseorang itu harus lulus ujian BM dan jawatankuasa penganugerahan biasiswa berpuas hati sebelum penganugerahan

diberikan. Begitu juga syarat kemasukan ke Universiti Brunei Darussalam yang menghendaki semua calonnya lulus dalam BM pada peringkat Sijil Am Pelajaran (*General Certificate of Education O level*). Syarat lulus BM adalah bertujuan memberi kesedaran kepada rakyat bahawa kerajaan tidak mengambil ringan terhadap kepentingan BM. Selain itu dalam aspek pengurniaan kerakyatan bagi penduduknya, seseorang yang memohon untuk menjadi rakyat Negara Brunei Darussalam wajib lulus dalam ujian BM dan ujian lisan BM juga merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi bagi setiap pemohon. Pewajaran meletakkan BM sebagai syarat wajib merupakan sifat yang mutlak dan mendokong PNB 1959. Hal ini membuktikan bahawa martabat BM merupakan martabat yang tinggi dan harus tidak dipandang ringan.

5. Perancangan Status Selepas Pengisytiharan Falasah MIB

Sebelum saya membincangkan perancangan status BM selepas pemashyuran kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, ada baiknya dipetik titah pemashyuran kemerdekaan ini.

“... Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah subhanahu wa taala, akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang Merdeka, Berdaulat, dan Demokratik bersemdikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahli Sunnah Waljamaah ...”³

Kata kunci daripada titah pemshyuran kemerdekaan ini adalah Melayu Islam Beraja sebagai konsep dan falsafah Negara Brunei

³ Pemashyuran Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam, dipetik dari *Pelita Brunei*, 4 Januari 1984, halaman 24.

Darussalam. Konsep dan falsafah ini adalah bersendikan kepada sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan demokratik bersendikan ajaran agama Islam menurut fahaman Ahli Sunnah Waljamaah. Daripada kata kunci ini jelas selain daripada konsep beraja dan konsep Islam, negara ini juga tidak melupakan asal usulnya sebagai sebuah negara Melayu. Apakah yang diertikan sebagai sebuah negara Melayu itu? Setentunya adalah dengan mengambil kira nilai, budaya dan adat yang terkandung dalam bangsa Melayu itu sendiri. Sungguhpun lama di bawah naungan kerajaan British, negara ini tidak terikut-ikut untuk mengadaptasi budaya penjajah malah mengekalkan budaya Melayu yang sejak turun temurun diwarisi dari yang terdahulu daripada kita.

Kenapa Negara Brunei Darussalam meletakkan konsep Melayu dalam falsafah MIB? Sejarah awal sememangnya corak, status dan sistem pemerintahan negara ini adalah sebuah negara Melayu, rakyatnya berbangsa Melayu, berbahasa Melayu dan mengamalkan nilai-nilai Melayu. Kedua, penonjolan Melayu dalam konsep Melayu Islam Beraja adalah penekanan dan penegasan takrif bahawa puak Melayu adalah merupakan bangsa Brunei yang turun temurun mendominasi di Negara Brunei Darussalam. Dan ketiga ialah, penerapan konsep MIB adalah merupakan peningkatan unsur dan cara hidup orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Atas ketiga alasan inilah maka konsep Melayu merupakan salah satu unsur dalam gabungan falsafah MIB.

Dilihat dari segi sejarah, bahasa sememangnya adalah warisan kebudayaan dan sebagai warisan kebudayaan, bahasa dilihat berdiri sama tinggi dengan bentuk sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, falsafah dan kesenian. Malah ketinggian martabat bahasa itu dapat diukur melalui pepatah Melayu "bahasa menunjukkan bangsa, lenyap bahasa hilanglah bangsa". Dalam konteks negara ini, letak dan posisinya adalah dalam ruang lingkup kepulauan Nusantara yang semuanya berbangsa Melayu. Bahasanya pula adalah dari warisan rumpun Melayu-Polinesia. Dengan bahasanya yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa

perhubungan, tidak syak bahawa bahasa Melayu adalah bahasa ilmu, bahasa persuratan dan bahasa pentadbiran. Dari sudut *PNB 1959*, Melayu dalam MIB merupakan kesinambungan dari apa yang tercatat dalam perlembagaan berkenaan.

Secara umumnya elok kita melihat fungsi bahasa dalam falasafah MIB. Fungsi BM merupakan satu unsur dalam konsep MIB iaitu BM adalah salah satu identiti yang penting bagi bangsa Melayu Brunei. BM bukan sahaja meliputi BM baku namun meliputi dialek-dialek puak jati yang terdapat di Negara Brunei Darussalam. Kewujudan dialek penting untuk ditonjolkan bagi tujuan pengayaan perbendaharaan kata BM baku. Oleh kerana BM merupakan bahasa perhubungan antara puak, maka dengan penonjolan perbendaharaan kata ini dapat mengikat tali persaudaraan dan sekali gus membawa perpaduan puak. Apabila ini dapat dicapai, secara tidak langsung usaha memperkaya dan mempertahankan khazanah BM dapat dicapai.

Dalam usaha perancangan dan pembinaan bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka diberikan tanggungjawab yang utama. Walau bagaimanapun jabatan-jabatan kerajaan lain dan sektor awam juga harus terlibat sama. Usaha perancangan dan pembinaan bahasa dalam konteks ini merupakan tanggungjawab nasional dan harus dipikul bersama. Untuk itu banyak usaha telah giat dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan BM di Negara Brunei Darussalam. Kebanyakan usaha ini diungkayahkan melalui badan-badan, institusi-institusi kerajaan dan juga persatuan-persatuan NGOs. Bermula dari penguatkuasaan pemakaian BM melalui surat keliling yang dikeluarkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan mulai 1960 hingga 1983, sebanyak 7 surat keliling telah dikeluarkan (Surat Keliling Pejabat Setia Usaha Kerajaan No. 8/1960, No. 35/1962, No. 43/1963, No. 52/1963, No. 4/1965, No. 22/1982 dan Bil. 5/1983). Bersandarkan kepada pengeluaran surat-surat keliling ini membuktikan kepada kita bahawa kerajaan sangat serius dalam usaha memartabatkan BM sebagai bahasa rasmi. Bukan sahaja pe-

martabatan BM dilakukan di peringkat regional malah pada peringkat antarabangsa, BM dirancang untuk dapat berganding bahu dan bekerjasama sesama negara ASEAN yang meletakkan BM sebagai bahas rasmi dan bahasa kebangsaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan Negara Brunei Darussalam dalam kerjasama dan kesepakatan serantau dalam bidang kebahasaan dengan menyertai keanggotaan secara rasmi dalam MABBIM pada 4 November 1984. Sungguhpun sebelum itu Negara Brunei Darussalam hanya menyertai MABBIM sebagai anggota pemerhati namun atas keyakinan negara, Negara Brunei Darussalam memberanikan diri menyertai MABBIM secara rasmi selepas Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan. Dengan kemasukan Negara Brunei Darussalam dalam MABBIM sekurang-kurangnya membolehkan negara dapat menyumbang dan mengetengahkan kemampuan BM Brunei untuk penyelarasan istilah dalam bidang ilmu tertentu.

Dari segi sistem pendidikan negara, apabila Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1984, sistem pendidikan negara turut mendapat perubahan yang besar. Sistem atau corak pendidikan yang diperkenalkan ialah Sistem Dwibahasa. Dalam erti kata yang lain, anak-anak Brunei diberikan pendidikan dua bahasa (pengantar bahasa Melayu dan Inggeris) secara serentak. Pelajar di tahun lima peringkat pendidikan rendah mula diberikan pendedahan pendidikan dalam pengantar bahasa Melayu dan Inggeris. Tujuannya adalah semata-mata memberikan peluang kepada pelajar berkenaan dapat mengikuti pelajaran dalam pengantar bahasa Inggeris dengan baik dan saksama. Sungguhpun demikian kepentingan pelajaran dalam pengantar bahasa Melayu tetap tidak diabaikan. Walaupun nampak peranan dan kewibawaan BM sebagai bahasa pengantar di sekolah, namun pada segi yang lain peluang anak Brunei untuk menguasai dua bahasa dapat dicapai dalam satu masa dan pemerolehan ilmu pengetahuan demi untuk membangun negara masih mengamalkan nilai-nilai Melayu selaras dengan falsafah negara MIB.

6. Penutup

Di mana-mana negara pun baik yang bahasa rasminya bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, tidak akan terlepas daripada hal perancangan bahasa. Perancangan bahasa bagi setiap negara itu mempunyai tujuan dan matlamatnya yang tersendiri. Apa yang jelas bagi konteks semua negara di Nusantara ini yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, matalamat dan tujuannya adalah semata-mata mengekalkan identiti atau jati diri masyarakat berkenaan. Hal ini jelas kerana hubungan bahasa dan kebudayaan itu sangat erat. Bahasa berfungsi sebagai wahana kebudayaan, baik berperanan sebagai sarana perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan mahupun inventori ciri-ciri kebudayaan. Dalam konteks Negara Brunei Darussalam, fungsi dan matlamat bahasa Melayu dijadikan dan diangkat sebagai bahasa rasmi adalah semata-mata sebagai wahana komunikasi antara puak dan juga sebagai jati diri bangsa Melayu Brunei itu sendiri. Biar pun bahasa Melayu ini menghadapi kekangan dan cabaran dalam era globalisasi ini, namun atas semangat dan kesedaran masyarakatnya, bahasa Melayu di Brunei akan tetap didaulatkan sebagai bahasa rasmi negara. Malah dengan pengukuhan falsafah Melayu Islam Beraja sebagai falsafah dan cara hidup orang Brunei, adalah diharapkan nanti dapat dijadikan perisai dalam menangkis apa jua cabaran dalam mengganggu gugat budaya dan bahasa Melayu.

Rujukan

Abd Rahman bin Dato Seri Setia Haji Mohd. Taib, Pehin Orang Kaya Setia Pahlawan Dato Seri Setia Haji. 2000. Semangat Bab 82 (1) Perlembagaan Negeri Brunei yang mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Dalam *Bahasa Jiwa Bangsa Jilid 2*. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Alidin bin Haji Othman, Dato Paduka Haji. 2000. *Prakata*. Dalam Bahasa Jiwa Bangsa, Jilid I, II, III dan IV. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Anshari. 2007. *Budi Bahasa*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Badaruddin bin Pengiran Ghani, Pengiran Dato Paduka Haji. 2000. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bidang bahasa dan sastra Melayu di Brunei. Dalam *Bahasa Jiwa Bangsa Jilid 2*. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bujang Haji Matnoor. 2000. Satu tinjauan tentang perancangan bahasa Melayu standard di Negara Brunei Darussalam. Dalam *Bahasa Jiwa Bangsa Jilid 2*. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Fatimah Haji Mohd Hussain. 1987. Masa depan bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam. *Beriga. Bil. 13*. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Jaludin Haji Chuchu, Haji. 2000. Bahasa Melayu di Brunei Darussalam dari segi perundangan, kedudukannya dengan bahasa lain, fungsi dan situasi pembelajaran. Dalam *Bahasa Jiwa Bangsa Jilid 2*. Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka.

PERANCANGAN KORPUS BAHASA: REALITI DAN PRAKTISNYA

Dr. Dayang Aini binti Haji Awang Karim
Negara Brunei Darussalam

1. Pendahuluan

Perancangan Korpus Bahasa merupakan cabang daripada Perancangan Bahasa yang juga merupakan cabang tersendiri daripada Ilmu Sosiologi Bahasa. Perancangan bahasa menurut Haugen (1959) adalah evaluasi perubahan linguistik. Merujuk definisi yang diberikan oleh Haugen ini, menggambarkan kepada kita bahawa linguistik sesuatu bahasa itu pasti akan mengalami evaluasi. Evaluasi¹ perubahan linguistik yang dimaksudkan merangkumi dari segi penentuan dan pemilihan ejaan dan pemilihan perkataan bahasa yang akan dijadikan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan sesebuah negara.

Menurut Asmah Haji Omar (1993:10), perancangan bahasa juga bererti perubahan bahasa yang disengajakan. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam sesuatu bahasa, baik bahasa lisan mahupun bahasa tulisan lazimnya dirancang oleh badan-badan tertentu yang khusus dibentuk dan diberi kuasa dalam menangani masalah-masalah dan isu-isu kebahasaan. Salah satu badan di rantau ASEAN yang sudah tidak asing lagi dalam menangani isu-isu keba-

¹ Evaluasi menurut Harimurti Kridalaksana (1983:42) bermaksud teori linguistik, alat untuk membandingkan beberapa gramatika dari satu bahasa dan untuk menentukan mana yang dipilih berdasarkan semesta bahasa yang ada.

hasaan, khususnya bahasa Melayu/Indonesia ialah MABBIM, iaitu singkatan bagi Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia yang dulunya dikenali sebagai MBIM. Singkatan MBIM kemudiannya menjadi MABBIM apabila Negara Brunei Darussalam menganggotai Majlis ini pada 4 November 1985.

Oleh sebab MABBIM berperanan penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu di rantau ASEAN ini, maka kertas kerja ini akan memfokuskan perbincangan terhadap peranan dan pencapaian MABBIM dalam perancangan korpus bahasa di rantau ASEAN, iaitu sejauh mana pencapaian MABBIM di peringkat serantau dan antara-bangsa, peranan agensi-agensi pembinaan bahasa, ahli-ahli bahasa, ahli linguistik dan pengguna bahasa Melayu. Di samping itu, istilah perancangan bahasa dan perancangan korpus bahasa juga akan disentuh.

2. Perancangan Bahasa

Perancangan dalam segala sektor penting dalam kehidupan manusia merupakan salah satu prasyarat dalam pembinaan sesebuah negara, terutama sekali bagi negara yang baru mencapai kemerdekaan. Pernyataan ini dijelaskan oleh Awang Sariyan (2000:4) dalam buku beliau yang bertajuk *Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia*. Perancangan yang dimaksudkan itu termasuklah perancangan sektor perundangan, pertahanan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, politik, keagamaan, dan yang tidak kurang pentingnya ialah perancangan bahasa.

Antara perancangan yang disebutkan di atas, perancangan bahasa merupakan salah satu perancangan yang terpenting. Mengapa perancangan bahasa itu penting, kerana bahasa merupakan penstabil keharmonian masyarakat dan alat komunikasi yang penting. Oleh sebab bahasa adalah alat komunikasi yang penting, maka menurut Asmah Haji Omar (1993:9) “masalah bahasa tidaklah

terhad kepada masalah yang semata-mata meliputi kod bahasa, seperti masalah tatabahasa, ejaan, pertuturan dan sebagainya, tetapi juga menjangkau masalah lain seperti masalah sosio-politik, masalah kemasyarakatan dan komunikasi amnya”.

Perancangan bahasa bukan saja penting dari segi sosiopolitik dan sebagai salah satu komponen dalam pembinaan sesebuah negara, malah perancangan bahasa juga berfungsi sebagai salah satu komponen teras dalaman identiti sesebuah negara. Sebagai komponen teras dalaman identiti sesebuah negara, perancangan bahasa yang dilaksanakan di sesebuah negara itu perlu menitikberatkan pelbagai aspek yang berhubungkait dengan sensitiviti masyarakat negara berkenaan. Antara sensitiviti yang perlu dititikberatkan ialah mengutamakan bahasa tempatan/bahasa kebangsaan berbanding bahasa asing supaya setiap rakyat ada rasa megah bahasa dan cinta akan bahasa ibunda mereka. Kenapa ada bahasa Melayu kerana kewujudan bangsa Melayu. Bahasa itulah jiwa dan milik mutlak sesuatu bangsa di dunia ini.

Bahasa jiwa bangsa adalah ungkapan keramat bagi sesuatu bangsa khususnya dan negara umumnya. Tanpa bahasa tiada bangsa dan tiada negara. Sesuatu bangsa dikenali daripada bahasanya yang memanifestasikan jati diri dan identiti sesebuah negara. Bahasa yang dimaksudkan di sini ialah bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi bagi negara berkenaan. Begitulah pentingnya bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi bagi sesebuah negara.

3. Pentingnya Perancangan Bahasa

Salah satu prasyarat pembinaan sesebuah negara yang baru merdeka ialah perancangan dalam segala sektor penting dalam kehidupan masyarakat di negara tersebut. Antara sektor terpenting adalah perancangan bahasa. Perancangan bahasa bukan sahaja penting sebagai salah satu komponen dalam pembinaan sesebuah negara, bahkan juga berfungsi menjadi salah satu komponen teras un-

sur dalaman jati diri yang melambangkan identiti bagi sesebuah negara.

Kepentingan perancangan bahasa dalam kehidupan sesuatu masyarakat menyerlah dengan terbitnya tulisan Einar Haugen (19-59) dalam makalah beliau yang bertajuk "*Language Planning in Modern Norway*" yang diterbitkan dalam *Journal of Anthropological Linguistics*, 1:3, 1959 (Asmah Haji Omar, 1993:5). Makalah ini diterbitkan lagi dalam *Readings in The Sociology of Language* yang disunting oleh Joshua A. Fishman pada tahun 1968.

Dalam makalah tersebut Einar Haugen mendefinisikan perancangan bahasa sebagai:

"...the activity of preparing a normative orthography, grammar, and dictionary for the guidance of writers and speakers in a nonhomogeneous speech community."

(Haugen, Einar, 1968:673)

Di samping itu, Haugen juga menjelaskan usaha beliau membina dialek Landsmal, sebuah dialek yang hampir pupus, akhirnya menjadi bahasa kebangsaan Norway. Dua individu terawal yang sering dikaitkan dengan perancangan bahasa ialah Einar Haugen (1959) dan Punya Sloka Ray (1963).

Peranan perancangan bahasa dalam negara-negara membangun khususnya negara yang pernah dijajah oleh kuasa asing adalah untuk mendapatkan semula identiti kebangsaan mereka, iaitu dengan memilih atau menentukan bahasa kebangsaan negara berkenaan agar mereka boleh diiktiraf sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Begitulah pentingnya peranan perancangan bahasa. Bagaimanapun, situasi ini tidak berlaku di Negara Brunei Darussalam kerana Negara Brunei Darussalam telah mempunyai bahasa

rasminya sendiri, iaitu bahasa Melayu sebelum negara ini mencapai kemerdekaan lagi.

Perancangan bahasa ini dapat dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu perancangan taraf/status bahasa, perancangan korpus bahasa dan perancangan dalam perancangan bahasa. Bagaimanapun, dalam makalah ini saya tidak akan membincangkan tentang perancangan taraf/status bahasa dan perancangan dalam perancangan bahasa. Fokus perbincangan hanya akan berkisar dalam perancangan korpus.

4. Perancangan Korpus Bahasa

Cabang utama penggubalan atau penentuan dasar serta pelaksanaan perancangan bahasa dikenali sebagai perancangan korpus. Asmah Haji Omar (1993:242), mendefinisikan perancangan korpus sebagai perancangan yang dilakukan terhadap kod-kod bahasa, yakni tatabahasa, sistem bunyi (termasuk ejaan) dan perbendaharaan kata.

Perancangan korpus bahasa, yang juga dikenali sebagai pembinaan bahasa merupakan komponen penting yang menunjangi perancangan taraf bahasa. Menurut Asmah Haji Omar (1993:242), kejayaan dan keberhasilan perancangan taraf bahasa hanya akan terserlah sekiranya aktiviti perancangan korpus bahasa dapat dijalankan seimbang seperti yang digubal dalam perancangan taraf bahasa. Justeru itu, perancangan korpus bahasa itu sangat penting bagi sesebuah negara yang merdeka dalam membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan atau bahasa rasminya sejajar dengan perkembangan pembangunan negara tersebut dari segi infrastruktur, pendidikan, ekonomi, keagamaan, kebudayaan dan sosial.

Oleh sebab sebahagian daripada tujuan perancangan korpus bahasa adalah untuk membangun, membina, memodenkan, dan mengembangkan korpus baharu bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi sesebuah negara itu, Richard B. Noss (1999:6) menekankan

bahawa rumus-rumus untuk fonologi, ortografi, morfologi, sintaksis, leksikon dan kategori-kategori lain bahasa tersebut, mesti juga disesuaikan dan dibangunkan selaras dengan perkembangan semasa.

Menurut Richard B. Noss (1999:5) lagi, istilah perancangan korpus diterapkan kepada perutusan dan teks yang dikodifikasi dan disalurkan melalui pelbagai jenis saluran komunikasi (tulisan, lisan, tayangan pada skrin komputer, gabungan dengan kod-kod angka dan lain-lain) yang selaras dengan definisi linguistik neka bahasa berkenaan, termasuk bagi menjana atau menganalisis teks-teks dan perutusan tersebut.

5. Perancangan Korpus Di Negara Brunei Darussalam

Usaha-usaha pelaksanaan perkembangan bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam bermula beberapa bulan setelah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi negara, iaitu apabila Majlis Mesyuarat Negeri (1959) meluluskan satu usul penubuhan satu badan yang bertanggungjawab dalam perkara-perkara yang berhubung-kait dengan perkembangan bahasa Melayu. Antara lain usul tersebut berbunyi:

“Majlis ini meluluskan supaya kerajaan membentuk satu badan yang bertanggungjawab kepada kerajaan untuk memeriksa perkara-perkara yang berhubung dengan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi seperti yang dikehendaki dalam Perlembagaan.”

(Perlembagaan Negeri Brunei, 1959)

Badan yang dimaksudkan itu ialah Lembaga Bahasa yang diluluskan pada 16 September 1961 yang kemudian diubah namanya

menjadi Bahagian Bahasa dan Pustaka, Jabatan Pelajaran. Pada tahun 1965, bahagian ini telah diasingkan daripada Jabatan Pelajaran dan diubah namanya menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka. Badan ini diberi mandat untuk melaksanakan dasar bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi Negara Brunei Darussalam.

Pada peringkat awal penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei menjalankan kegiatan yang lebih tertumpu kepada usaha memastikan bahasa Melayu digunakan dengan lebih luas secara berperingkat-peringkat sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa rasmi negara pada masa itu. Antara aktiviti kebahasaan dilaksanakan pada masa itu ialah seperti mengadakan Minggu Bahasa. Usaha yang lebih efektif ialah seperti merancang dan melaksanakan program kebahasaan dan menyebarkan maklumat terkini tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul pada semua peringkat pengguna dan dalam semua urusan rasmi seperti penulisan surat-surat rasmi, media massa dan bahan-bahan bercetak. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dalam perancangan korpus bahasa semakin berkembang setelah Negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan pada tahun 1984 dan menyertai MABBIM pada 4 November 1985.

Tugas penting perancangan korpus ialah membina bahasa dari segi mencipta istilah, mengubal sistem ejaan yang standard dan menyusun tatabahasa yang standard. Pengubalan sistem ejaan yang standard telah disempurnakan oleh MBIM pada tahun 1972, dengan tercapainya kata sepakat antara Malaysia dengan Indonesia. Bagaimanapun, penguatkuasaan penggunaan Sistem Ejaan Rumi Baru ini di Negara Brunei Darussalam dilaksanakan pada tahun 1983. Sebelum itu, Brunei Darussalam menggunakan Sistem Ejaan Za'ba seperti di Malaysia. Meskipun sistem ejaan baru ini sudah sudah disempurnakan pada tahun 1972 dan diperkenalkan lebih sesuku abad di Negara Brunei Darussalam, yang menyedihkan kita ialah sehingga hari ini masih ramai pengguna bahasa Melayu yang melakukan kesalahan ejaan. Persoalan yang timbul ialah di

mana silapnya? Apakah perancangan korpus bahasa itu tidak dilaksanakan secara sistematik dan efektif?

6. Peranan dan Sumbangan MABBIM

MABBIM adalah sebuah badan kebahasaan serantau yang dibentuk untuk merancang dan memantau perkembangan bahasa Melayu-/Indonesia di negara-negara yang menganggotainya, iaitu Negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Dalam perancangan korpus bahasa, khususnya bahasa Melayu/Indonesia, MABBIM merupakan agen yang penting dalam pembinaan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Justeru itu, sebagai sebuah badan kebahasaan yang sudah berusia 35 tahun pada tahun ini, MABBIM telah banyak menyumbangkan tenaga dan wang ringgit dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota. Langkah awal yang dilaksanakan oleh badan ini ialah menyelaraskan Sistem Ejaan Rumi, iaitu untuk mengatasi masalah perbezaan yang wujud antara sistem ejaan dalam bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, dan seterusnya melaksanakan penukaran Sistem Ejaan Rumi Lama ke Sistem Ejaan Rumi Baru.

Setelah lebih 35 tahun penubuhannya, ahli-ahli negara anggota MABBIM telah mengadakan pertemuan demi pertemuan dan persidangan demi persidangan setiap tahun, baik Sidang Eksekutif, Sidang Majlis mahupun Sidang Pakar, iaitu secara bergilir-gilir di negara anggota. Hasil dari pertemuan-pertemuan ini, MABBIM telah berjaya menghasilkan pelbagai pedoman dan panduan, misalnya Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992), Pedoman Umum Pembentukan Ejaan Bahasa Melayu (1992), Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rumi (1992), Panduan Penyusunan Kamus Istilah (1992) dan Pedoman Tatanama Kimia. Di samping itu pelbagai daftar istilah dan kamus istilah juga dibentuk untuk tujuan menangani isu-isu kebahasaan. Usaha yang ber-

sistematik juga telah dilakukan dalam menggubal istilah dalam pelbagai bidang terutama dalam bidang sains dan teknologi, pendidikan, perubatan, pelancongan, linguistik, sosiologi, psikologi, seni, herba dan sebagainya. Setakat ini, telah beratus ribu istilah pelbagai bidang dibentuk. Persoalannya mampu atau tidak MABBIM menangani sepenuhnya isu-isu kebahasaan ini? Sekiranya mampu apa buktinya, dan sebaliknya sekiranya tidak mampu mengapa?

Berdasarkan bukti-bukti nyata, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa yang diusahakan selama ini telah berjaya mencapai matlamat, tujuan dan fungsi kelima-lima piagam penubuhan MABBIM, iaitu (1) Meningkatkan semangat kebersamaan dan persaudaraan antara negara anggota. (2) Meningkatkan peranan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota sebagai alat perhubungan yang lebih luas. (3) Mengusahakan pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa moden yang lain. (4) Mengusahakan penyelarasan bahasa melalui penulisan ilmiah dan kreatif, pedoman, dan panduan. (5) Mengadakan pertemuan kebahasaan berkala demi penyelarasan dan pendekatan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota.

Perkara ini jelas dengan terbitnya pelbagai bidang dan sub-bidang istilah yang dibentuk dan dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam, begitu juga di Indonesia dan Malaysia. Ditambah lagi dengan terbitnya *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, *Buku Pedoman*, *Daftar Istilah*, *Kamus Istilah*, *Rampak Serantau*, *Prosiding Kebahasaan* dan sebagainya. Dari segi pembentukan dan pembinaan bahasa Melayu/Indonesia nampaknya MABBIM telah berjaya dengan cemerlang. Malangnya kebanyakan buku-buku istilah dan kamus istilah ini hanya tinggal begitu saja tanpa digunakan oleh mereka yang bergiat/berkecimpung dalam bidang tersebut. Daripada penyelidikan yang saya jalankan di Negara Brunei Darussalam, saya mendapati tidak ramai yang mengetahui akan kewujudannya, baik buku-buku istilah mahupun kamus

istilah, dan mereka yang mengetahui akan kewujudannya pun tidak menggunakan istilah dan kamus tersebut. Kebanyakan daripada mereka (contohnya pakar-pakar perubatan) lebih suka menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggeris yang sudah lazim mereka gunakan. Sejauh ini hanya *Kamus Bahasa Melayu Nusantara* yang jelas banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna bahasa Melayu dan pelajar-pelajar universiti.

Bagaimanapun, dari pengamatan saya dalam pembentukan istilah, kita terlalu banyak mengambil istilah-istilah bahasa asing, meskipun sebahagian istilah itu mempunyai padanan kata dalam bahasa tempatan. Sekiranya kita terlalu banyak mengambil istilah bahasa asing dan mengabaikan istilah bahasa tempatan bagi satu-satu bidang, ini akan merugikan kita sendiri. Bahasa Melayu dalam erti yang sebenarnya sudah tidak tepat. Jika situasi ini berterusan istilah-istilah bahasa asing yang kita ambil itu akhirnya akan menggantikan istilah bahasa Melayu sepenuhnya. Dari segi bentuk dan bunyinya sudah berubah secara menyeluruh dan tidak lagi dapat dikatakan istilah bahasa Melayu kerana Melayunya itu sudah semakin kabur dan akhirnya hilang sama sekali.

Berdasarkan kenyataan ini, nampaknya MABBIM telah berjaya berperanan menurut fungsi dan mencapai tujuan dari segi pembinaan dan pengembangan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang setaraf dengan bahasa moden yang lain, menjadikan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa peradaban tinggi, bahasa ilmu, bahasa sains, bahasa teknologi moden, bahasa perusahaan, dan bahasa ekonomi. Bagaimanapun, secara praktisnya pencapaian ini tidak bermakna apa-apa sekiranya segala hasil usaha dan pengorbanan, baik dari segi tenaga mahupun wang ringgit ini tidak dapat disebar dan dimanfaatkan semaksimum mungkin kepada masyarakat ketiga-tiga negara anggota.

Yang menyedihkan juga ialah dasar pendidikan negara sebahagian anggota MABBIM sendiri yang selalu berubah-ubah, malah

bercanggah dengan dasar perancangan bahasa dan piagam MAB-BIM yang mahu melihat dan menjadikan bahasa kebangsaan/rasmi negara anggota supaya menjadi bahasa yang berkembang, berprestij setaraf dengan bahasa moden yang lain, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Pada masa ini, dasar pendidikan sebahagian negara anggota MABBIM lebih berfokus ke barat, lebih mengutamakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, terutama bagi mata pelajaran Matematik dan Sains, malah sekarang ini mata pelajaran Sejarah yang dulunya diajar dalam bahasa Melayu juga diajar menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Dengan perubahan dasar pendidikan ini mengakibatkan berlakunya pembaziran wang dan masa. Apa tidaknya, selama ini apabila mata-mata pelajaran seperti Matematik, Sains dan Sejarah yang dulunya diajar dalam bahasa Melayu sudah tentu banyak buku berkenaan ditulis dan dicetak. Apabila mata pelajaran tersebut diajar dalam bahasa Inggeris, buku-buku yang sudah tercetak itu akan tinggal begitu sahaja, tanpa ada orang yang memerlukan dan menggunakannya. Perkara ini membuktikan bahawa minda sege-lintir daripada kita orang-orang Melayu masih dijajah. Malah sebahagian daripada kita masih mengagung-agungkan bahasa penjajah. Mereka memberi pelbagai alasan yang mengatakan hanya dengan pengetahuan bahasa Inggeris sahaja seseorang itu boleh pergi jauh, iaitu di peringkat antarabangsa dan kehidupan lebih terjamin, mudah mendapatkan pekerjaan. Impaknya mereka menganaktirikan bahasa ibunda/sendiri, iaitu bahasa Melayu.

Bagi merealisasikan penggunaan istilah yang dicipta, ahli-ahli anggota MABBIM perlu mengambil langkah yang lebih efisien dan terarah. Agensi-agensi yang terlibat langsung seperti Dewan Bahasa dan Pustaka di Negara Brunei Darussalam dan Malaysia, dan Pusat Bahasa di Indonesia perlu bersifat lebih efektif dalam menyebarkan hasil penerbitan. Pihak-pihak yang berwajib perlu mengambil inisiatif bagaimana untuk menarik minat pengguna

bahasa Melayu dalam menggunakan istilah-istilah pelbagai bidang yang telah dibentuk. Ahli-ahli bahasa dan linguistik juga perlu bersikap lebih peka terhadap perkembangan semasa.

Antara langkah-langkah yang perlu diambil ialah menyelaraskan perancangan bahasa dengan dasar pendidikan negara. Untuk tujuan itu, langkah pertama, kementerian-kementerian yang terlibat seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebajikan, Belia dan Sukan di Negara Brunei Darussalam misalnya, perlu bekerjasama dalam menangani isu-isu kebahasaan ini. Kedua, perlunya diadakan Akta Bahasa bagi mengatasi masalah pencemaran dan pengabaian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Ketiga, masyarakat perlu disedarkan tentang pentingnya bahasa ibunda dalam pembentukan dan pengembangan minda.

Dalam konteks Negara Brunei Darussalam, kejayaan perancangan korpus bahasa ini memerlukan kerjasama padu daripada kementerian-kementerian yang berkenaan, iaitu selaras dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam semasa Majlis Perasmian Hari Perkhidmatan Awan pada 10 November 2007 yang menekankan perlunya kerjasama antara kementerian-kementerian dalam menangani pelbagai isu. Pengguna bahasa Melayu dan masyarakat Melayu sendiri merupakan pemangkin semulajadi dalam merealisasikan perancangan korpus bahasa di sekitar mereka.

7. Kesimpulan

Perancangan bahasa dan hubungannya dengan pembinaan dan perkembangan bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi sesebuah negara itu memainkan peranan penting dalam membangun negara, minda dan jati diri bangsa serta kemajuan bangsa dan negara. Bagi mencapai matlamat ini sesuatu perancangan bahasa itu mestilah selaras dengan dasar pendidikan negara berkenaan. Hubungan antara pen-

didikan dengan perancangan bahasa adalah rapat kerana sekolah sebagai agen perubahan bahasa. Dasar pendidikan sesebuah negara memainkan peranan penting dalam merealisasikan wadah yang dihasratkan dalam sesuatu perancangan bahasa. Berjaya atau tidak sesuatu perancangan bahasa itu berhubungkait dengan dasar pendidikan negara tersebut, di samping peranan agensi-agensi yang lain. Sehubungan itu, mereka yang terlibat secara langsung dalam pengubalan dasar bahasa perlu juga dilibatsertakan dalam pengubalan dasar pendidikan.

Di samping itu, dalam pembentukan istilah sekiranya ada istilah dalam bahasa Melayu atau dari bahasa/dialek tempatan sebaik-baiknya carilah dan gunakanlah istilah tempatan terlebih dahulu sebelum mengambil istilah daripada bahasa asing seperti mana yang digariskan dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Secara praktis kita perlu berpijak di bumi nyata dan di dunia realiti. Akhirnya harapan dan garapan MABBIM untuk menjadikan bahasa Melayu/Indonesia sebuah bahasa yang kaya, bahasa tinggi dan bahasa berpristej akan berjaya mengubah persepsi pengguna dan masyarakat Melayu seluruhnya. Teruskan usaha mencari dan menggali pelbagai istilah-istilah daripada bahasa/dialek tempatan sendiri. Saya juga berharap semoga cita-cita dan harapan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi negara-negara ASEAN akan tercapai.

Rujukan

Abdullah Hassan. 1987. *30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan. 1987. *Isu-Isu Perancangan Bahasa: pengintelektualan Bahasa Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah Hassan (Penterjemah). 1999. *Perancangan Bahasa di Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. 1993. *Perancangan Bahasa dengan rujukan Khusus Kepada perancangan Bahasa Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Awang Sariyan. 2000. *Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fishman, Joshua A. (Penyunting). 1968. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers.

Guxman, M.M. 1968. "Some general Regularities in the Formation and Development of National Languages". Dalam Fishman, Joshua A. (Penyunting) *Readings in the Sociology of Language*. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers. Hlm. 766--779.

Haugen, Einar. 1968. "Language Planning in Modern Norway". Dalam Fishman, Joshua (Penyunting) *Readings in the Sociology of Language*. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers. Hln. 673-687.

Kridalaksana, Harimurti. 1983. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia

Ray, Punya Sloka. 1968. "Language Standardisasi". Dalam Fishman, Joshua A. (Penyunting) *Readings in the Sociology of Language*. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers. Hln. 754-765.

PENYELARASAN ISTILAH MABBIM: TERCAPAIKAH IMPIAN

Puan Junaini Kasdan
Malaysia

1. Pendahuluan

Hasrat utama penyeragaman istilah melalui MBIM/MABBIM adalah untuk mewujudkan istilah yang dapat menepati pendekatan “satu acuan untuk semua” bagi semua bidang ilmu agar mudah difahami oleh penutur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sejak tahun 1972 sehingga kini MBIM/MABBIM telah berjaya menyelaraskan lebih daripada 350 ribu istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Namun, perbezaan latar belakang politik dan sosiobudaya telah menyebabkan istilah-istilah yang dicipta masih berbeza dan tidak dapat diseragamkan sepenuhnya. Menurut Anton Moeliono (2001), dari jumlah istilah yang sudah disepakati, hanya 35% sahaja istilah yang benar-benar dipersetujui sama. Manakala 65% lainnya dipersetujui untuk berbeza. Keadaan ini tentunya sangat membimbangkan kerana usaha kebersamaan itu tidak mencapai sasaran. *Harian Kompas* (12 Mac 2002) juga pernah melaporkan bahawa:

Semangat kebersamaan yang digagaskan sejak tahun 1972 dengan cita-cita untuk saling mendekatkan diri, justeru dirasakan kian menjauh. Perbezaan-perbezaan yang muncul bukan lagi terhadap pada istilah yang digunakan di negara masing-masing

tetapi juga meliputi idiom dan penggunaan kata dalam pelbagai bidang kehidupan.

Bertitik tolak daripada kebimbangan-kebimbangan tersebut, maka kajian kecil ini dilaksanakan bertujuan untuk melihat darjah ketelusan atau kefahaman istilah-istilah tersebut menurut perspektif penutur bahasa Melayu di Malaysia dan penutur bahasa Indonesia di Indonesia khususnya, dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan perbezaan tersebut amnya.

2. Batasan Kajian

Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik yang dilakukan terhadap responden di Malaysia dan Indonesia bagi mengesahkan tahap ketelusan atau kefahaman morfosemantik istilah, khususnya dalam bidang Teknologi Maklumat. Seramai 120 orang pelajar ijazah pertama yang mengikuti pengajian Sains Komputer/Teknologi Maklumat di Malaysia dan Indonesia dipilih sebagai responden. Soal selidik yang dijalankan meliputi ujian tahap ketelusan atau kefahaman istilah, pengetahuan tentang MABBIM dan penerimaan istilah bahasa Melayu/Indonesia yang telah disepakati di peringkat MABBIM. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat kemungkinan tahap ketelusan atau kefahaman antara istilah Malaysia dengan istilah Indonesia dipengaruhi oleh sikap dan persekitaran penutur kedua-dua bahasa.

Kajian ini menggunakan kaedah penganalisan data korpus MABBIM bidang Teknologi Maklumat (kategori A). Data istilah dalam bidang Teknologi Maklumat dipilih kerana istilah yang telah diselaraskan dalam bidang tersebut adalah cukup banyak. Walaupun Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu negara anggota MABBIM, kajian ini hanya ditumpukan kepada perbezaan antara istilah Malaysia dengan istilah Indonesia sahaja kerana tidak banyak perbezaan antara istilah Malaysia dengan istilah Negara Brunei.

3. Profil Responden

Setelah ditapis, hanya 120 soal selidik yang dikemukakan kepada 60 orang responden dari Malaysia (20 orang lelaki dan 40 orang perempuan) dan 60 orang responden dari Indonesia (45 orang lelaki dan 15 orang perempuan) digunakan dalam kajian ini. Sebanyak 30 borang soal selidik yang telah diisi oleh responden tidak dapat dimanfaatkan kerana mengandungi maklumat yang tidak lengkap. Responden terdiri daripada pelajar ijazah pertama yang mengikuti pengajian dalam bidang Teknologi Maklumat dari dua buah universiti di Malaysia dan Indonesia. Seorang daripada responden Indonesia ialah warganegara Austria.

4. Dapatan Kajian

(a) Perbezaan Morfosemantik dari Kaca Mata Pragmatik

Teori Relevans yang mementingkan pragmatik telah dipilih bagi menjelaskan bahawa penerimaan sesuatu istilah yang digubal dan diselaraskan di peringkat MABBIM berkaitan rapat dengan kognisi penuturnya. Istilah yang diselaraskan bukan sekadar untuk mencari persamaan bentuk, namun yang paling penting ialah persamaan konsep kerana istilah terbentuk melalui binaan konsep yang lahir dalam kognisi penuturnya. Perbezaan berlaku kerana adanya pandangan dunia (*world view*) yang berbeza antara penutur kedua-dua bahasa. Kajian ini turut membuktikan bahawa perbezaan leksikal (baik dari segi bentuk mahupun morfologi) tidak mempengaruhi tahap ketelusan atau kefahaman istilah, asal sahaja leksikal tersebut memberikan kesan kognisi yang sama. Perbezaan latar belakang sejarah dan sosiobudaya penutur kedua-dua bahasa ada kalanya tidak memungkinkan persamaan tersebut berlaku. Dalam konteks kerjasama MABBIM, hal ini menunjukkan bahawa negara anggota MABBIM hendaklah saling menghormati tradisi yang sudah diamalkan di tiap-tiap negara dan dengan itu tidak memaksa yang satu mengikut yang lain. Kerana menyedari hakikat tersebut,

maka MABBIM membuat ketetapan bahawa dalam kerja penyelarasan istilah, ada kategori “istilah yang dipersetujui sama” dan “istilah yang dipersetujui berbeza”. **Dipersetujui sama** dapat ditakrifkan sebagai berbeza leksikal tetapi mendukung makna yang sama, manakala **berbeza seluruhnya** pula dapat ditakrifkan sebagai berbeza leksikal dan berbeza makna.

(b) Perbezaan Ketelusan Istilah MABBIM Bukan Ilusi

Pembentukan istilah di peringkat MABBIM bukan sahaja mesti mampu difahami oleh pengguna negara masing-masing, istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara maksimum oleh penutur serantau. Penandaan penyelarasan istilah di peringkat MABBIM yang dikategorikan sebagai “mengelirukan” dikenal pasti sebagai faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan ketidakselarasan istilah serantau. Mungkin ada benarnya pendapat Asmah (2004), “apabila kategori A dan B dilihat secara terpisah, maka peratusan perbezaan agak tinggi. Menyedari hakikat ini, maka MABBIM mengambil keputusan untuk menyatukan kedua-dua kategori A dan B untuk tujuan memperlihatkan persamaan. Dengan demikian, jumlah persamaan menjadi agak tinggi”. Hakikatnya, kajian ini membuktikan bahawa jumlah istilah yang dipersetujui sama bukan ukuran sebenar untuk memperlihatkan persamaan.

Melalui ujian tahap ketelusan atau kefahaman istilah, sebanyak 60 istilah telah dipilih secara rawak daripada pelbagai kategori dan bentuk. Bagi tujuan analisis, istilah-istilah tersebut dikelompokkan kepada tiga kategori, iaitu telus, konflik dan legap.

(i) Istilah Telus

Istilah yang dikategorikan sebagai telus ialah istilah yang tidak menimbulkan masalah pemahaman kepada pengguna. Meskipun terdapat perbezaan leksikal, perbezaan yang dimaksudkan boleh

dianggap minimum kerana kesukaran makna yang timbul dapat diramalkan oleh pengguna. Jadual 1 yang berikut menunjukkan taburan hasil ujian tahap ketelusan istilah kategori telus.

Jadual 1: Tahap Ketelusan Istilah Kategori Telus

ISTILAH			Malaysia		Indonesia	
INGGERIS	MALAYSIA	INDONESIA	Telus	Konflik	Telus	Konflik
<i>decrement</i>	susutan	kurangan	58	2	55	5
<i>filtering</i>	penapisan	penyaringan	47	13	24	36
<i>interrupt</i>	sampukan	sela	22	38	15	48
<i>network</i>	rangkaian	jaringan	59	1	43	17
<i>Stack</i>	tindanan	Tumpukan	13	47	32	28
<i>bit pattern</i>	corak bit	pola bit	52	8	49	11
<i>color tool</i>	peralatan warna	perkakas warna	57	3	55	5
<i>data generator</i>	penjana data	pembangkit data	34	26	7	53
<i>binomial coefficient</i>	pekali binomial	Koefisien binomial	35	25	30	30
<i>global roaming</i>	perayauan global	roaming global	27	33	16	44
<i>aggregation</i>	pengagregatan	Agregasi	40	20	50	10
<i>precompiler</i>	prapengkompil	Prakompilator	32	28	35	25
<i>command statement</i>	kenyataan perintah	Pernyataan perintah	47	13	11	49
<i>formatted text</i>	teks berformat	teks terformat	30	30	33	27
<i>concrete model</i>	model konkrit	model kongkret	44	16	60	0

ISTILAH			Malaysia		Indonesia	
INGGERIS	MALAYSIA	INDONESIA	Telus	Konflik	Telus	Konflik
<i>current physical system</i>	sistem fizikal terkini	sistem fisik terkini	45	15	52	8
<i>resonance</i>	resonans	Resonansi	49	11	60	0

Berdasarkan jadual tersebut dapat dilihat bahawa tidak ada satu pun istilah kategori telus yang disenaraikan diterima sebagai istilah yang telus sepenuhnya oleh penutur bahasa Melayu. Sementara itu, bagi penutur bahasa Indonesia, hanya dua (11.8%) daripada 17 istilah kategori telus yang disenaraikan dapat diterima sebagai istilah yang benar-benar telus. Oleh itu, dengan mengambil kira bahawa setiap responden mempunyai tahap pengetahuan bahasa dan latar belakang yang berbeza, maka dalam kajian ini, tahap ketelusan istilah adalah benar apabila jumlah responden yang bersetuju melebihi 40 orang atau 2/3 daripada jumlah responden bagi tiap-tiap negara.

Secara keseluruhannya, hasil kajian mendapati bahawa hanya lapan (47.1%) daripada 17 istilah kategori telus yang diuji tahap ketelusannya kepada responden adalah benar. Yang selebihnya, iaitu dua (52.9%) istilah hanya telus pada penutur salah satu bahasa, tiga (17.6%) istilah diterima sebagai telus oleh sebahagian besar penutur kedua-dua bahasa dan empat (23.6%) istilah telus diterima sebagai konflik oleh penutur kedua-dua bahasa.

(ii) Istilah Konflik

Istilah konflik ialah istilah yang selalunya akan menimbulkan masalah pemahaman. Daripada data-data yang telah dianalisis, istilah konflik akan muncul apabila sistem fonologi dan morfologi se-

suatu istilah jelas berbeza. Kadangkala masalah semantik juga dapat dikesan dalam istilah konflik ini.

Dengan mengambil kira suara majoriti 2/3 daripada responden, soal selidik yang dijalankan mendapati bahawa tujuh (43.8%) daripada 16 istilah kategori konflik yang diuji tahap ketelusannya atau kefahaman yang merupakan istilah yang benar-benar konflik kerana mempunyai makna atau rujukan yang berbeza bagi penutur kedua-dua bahasa. Yang selebihnya, iaitu lima (31.2%) istilah diterima sebagai konflik pada penutur salah satu bahasa sahaja, dan empat (25.0%) istilah diterima sebagai konflik oleh sebahagian besar penutur kedua-dua bahasa. Jadual 2 menunjukkan taburan hasil ujian tahap ketelusan atau kefahaman istilah kategori konflik yang dimaksudkan.

Jadual 2: Tahap Ketelusan Istilah Kategori Konflik

ISTILAH			MALAYSIA		INDONESIA	
INGGE-RIS	MALAYSIA	INDONESIA	Telus	Konflik	Telus	Konflik
<i>Hacker</i>	penggodam	Peretas	16	44	11	49
<i>Intercep-tion</i>	Pintasan	Tangkap	11	49	3	57
<i>Panning</i>	penggerakan	Penolehan	8	52	14	46
<i>Superbug</i>	superpepijat	Superkutu	29	31	9	51
<i>Telecommu-ting</i>	Telekerja	Telekarya	36	24	43	17
<i>bus slave</i>	hamba bas	budak bas	27	33	32	28
<i>file format</i>	format fail	format berkas	5	55	44	16
<i>Template form</i>	borang templat	bentuk templat	20	40	12	48
<i>delete query</i>	pertanyaan hapus	permintaan hapus	20	40	20	40

ISTILAH			MALAYSIA		INDONESIA	
INGGE- RIS	MALAYSIA	INDONESIA	Telus	Konflik	Telus	Konflik
<i>virtual des- ktop</i>	atas meja maya	semeja maya	20	40	12	48
<i>Changeo Ver</i>	pertukaran	Bertukar	41	19	35	25
<i>market data</i>	data pasaran	data pasar	22	38	26	34
<i>Equaliza- tion</i>	penyamaan	Persamaan	51	9	29	31
<i>Conceal- ment system</i>	Sistem persem- bunyan	sistem penyem- bunyan	12	48	30	40
<i>signing key pair</i>	pasangan kunci tandatangan	pasangan kunci penandatanga n	47	13	24	36
<i>ATM cell</i>	sel ATM	sal ATM	20	40	33	27

(iii) Istilah Legap

Selain istilah telus dan konflik, turut ditemukan istilah yang dikategorikan sebagai istilah legap, iaitu istilah yang maknanya tidak dapat difahami sama sekali. Istilah tersebut tidak mampu memberikan klu kepada pengguna istilah akan maksud yang cuba disampaikan. Senarai dalam Jadual 3 yang berikut adalah istilah kategori legap yang dipilih secara rawak dan diujikan kepada responden.

Jadual 3: Tahap Ketelusan Istilah Kategori Legap

INGGERIS	ISTILAH		MALAYSIA		INDONESIA	
	MALAYSIA	INDONESIA	Telus	Legap	Telus	Legap
<i>Scanner</i>	Pengimbas	Pemayar	14	46	10	50
<i>Unpack</i>	Nyahpadat	Awapak	2	58	8	52
<i>Routing</i>	penghalaan	Perutean	5	55	6	54
<i>Caption</i>	Kapsyen	Takarir	1	58	22	38
<i>data diddling</i>	penggodakan data	penyetelan data	11	49	8	52
<i>switching theory</i>	teori pensuisan	teori penya-klaran	5	55	12	48
<i>Crossruff</i>	ropol silang	wiru silang	8	52	17	43
<i>Statistic al soft-ware</i>	perisian statistik	Perangkat lunak statistik	11	49	13	47
<i>topological sorting</i>	pengisihan topologi	penyortiran topologi	7	53	7	53
<i>security performance</i>	prestasi sekuriti	Kinerja sekuritas	6	54	32	27
<i>autoanswer</i>	autojawab	Swajawab	12	48	46	14
<i>analysis phase</i>	fasa analisis	fase analisis	43	17	60	0
<i>archive</i>	Arkib	Arsip	6	54	13	47
<i>bytecode</i>	kod bait	kode bita	17	43	36	24
<i>e-auction</i>	e-lelong	e-lelang	8	52	10	50
<i>error</i>	Ralat	Galat	10	50	27	33
<i>port</i>	Port	Porta	33	27	50	10

Dengan mengambil kira suara majoriti 2/3 responden penutur kedua-dua bahasa, kajian ini mendapati bahawa 10 (58.8%) daripada 17 tahap ketelusan istilah kategori legap yang

diuji, disahkan benar sebagai istilah legap kerana tidak dapat difahami sama sekali oleh penutur kedua-dua bahasa. Yang selebihnya, iaitu lima (29.5%) istilah, legap pada penutur salah satu bahasa sahaja, dan dua (11.7%) istilah diterima sebagai istilah telus.

(c) Dapatan-dapatan Lain

Dalam soal selidik yang dijalankan, beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan MABBIM turut diajukan kepada responden. Maklumat tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana maklumat dan kegiatan MABBIM sampai kepada masyarakat awam, khususnya penyebaran istilah yang telah diselaraskan di peringkat MABBIM. Berikut adalah beberapa maklum balas yang diterima daripada responden, yang dapat dijadikan panduan oleh jentera penggerak MABBIM dalam melaksanakan kegiatan yang dirancang.

(i) Membentuk Istilah MABBIM yang Lebih Berwibawa

MABBIM tidak sekadar menyatukan bahasa, tetapi juga menyatukan bangsa serumpun. Penyelarasan istilah di peringkat MABBIM merupakan satu usaha murni yang perlu diteruskan. Dengan mandat yang diberikan melalui kuasa menteri kedua-dua negara, MABBIM bukan sekadar bertindak sebagai “pengumpul” istilah, tetapi pemiawai istilah bahasa Melayu/Indonesia di peringkat serantau. Justeru, MABBIM perlu peka terhadap istilah-istilah yang diselaraskan, baik dari segi penggubalannya mahupun penyebarannya. Kajian mendapati bahawa istilah-istilah yang diselaraskan oleh MABBIM tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna kerana tidak disebarkan sebagaimana sepatutnya. Kajian ini juga mendapat maklum balas bahawa ada istilah MABBIM yang sukar diterima kerana istilah yang digubal tidak sesuai dengan istilah yang digunakan dalam kalangan pengguna. Dalam hal ini, sebagai

pemiiawai ada baiknya MABBIM menerima dan membakukan istilah yang sudah digunakan oleh pengguna (selagi istilah-istilah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip pembentukan istilah yang ditetapkan) dan bukan mencipta sesuatu yang baharu. Pada umumnya, istilah hanya akan diselaraskan setelah bidang yang berkenaan berkembang dalam masyarakat pengguna. Jarang-jarang sekali berlaku istilah dibentuk lebih dahulu sebelum sesuatu bidang ilmu itu dikembangkan.

Kajian ini turut mendapati bahawa penyerapan istilah bahasa Inggeris merupakan satu kaedah untuk menyelaraskan istilah Malaysia dengan istilah Indonesia yang boleh diterima oleh penutur kedua-dua bahasa. Namun, pada masa yang sama, MABBIM juga bertanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu/Indonesia, khususnya dalam penggunaan istilah, kerana bahasa Melayu/Indonesia masih dianggap sebagai lambang jati diri bangsa. Satu hal yang perlu diberikan perhatian oleh MABBIM ketika menggubal dan menyelaraskan istilah serantau ialah memastikan istilah yang dipersetujui sama (kategori A) benar-benar telus dari segi maknanya. Dengan kata lain, kedua-dua istilah yang digunakan dapat memberikan kesan kognitif yang sama kepada penutur kedua-dua bahasa. Kajian mendapati bahawa perbezaan leksikal bukan penghalang untuk penutur kedua-dua bahasa saling memahami istilah yang digunakan. Syaratnya, istilah tersebut mestilah bersinonim atau sekurang-kurangnya dapat diramalkan maksudnya oleh penutur kedua-dua bahasa agar istilah yang dihasilkan mudah difahami dan tidak menimbulkan salah faham. Hal ini sesuai dengan *principles of term formation* (ISO 704: 2000 dalam Schmitz 2003) yang menekankan bahawa antara ciri sesuatu istilah itu mestilah tidak kabur, tidak taksa, mudah difahami dan berkonotasi baik. Hal yang sama juga ditekankan dalam PUPIMB (2004) yang menjadikan ciri tersebut sebagai syarat dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. Istilah yang telus dan mudah difahami tentunya

akan membantu penyebaran maklumat dan teknologi dari negara anggota MABBIM dengan lebih berkesan.

i. Perkaitan Amalan/Kebiasaan dengan Perbezaan Ketelusan atau Kefahaman Istilah

Kajian ini turut menyenaraikan empat faktor yang paling mungkin dapat mempengaruhi tahap ketelusan atau kefahaman istilah dalam kalangan penutur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Empat faktor tersebut adalah seperti yang berikut:

- (1) penggunaan bahasa pertuturan sehari-hari;
- (2) komunikasi langsung dengan sahabat atau kenalan dari Malaysia atau Indonesia;
- (3) kebiasaan menonton filem dalam bahasa Melayu atau Indonesia; dan
- (4) kebiasaan membaca/merujuk kepada buku dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia.

Hasilnya, kajian mendapati bahawa hanya dua daripada empat faktor tersebut yang dapat mempengaruhi tahap ketelusan atau kefahaman sesuatu istilah. Faktor yang paling mempengaruhi tahap ketelusan atau kefahaman istilah ialah penggunaan bahasa pertuturan sehari-hari. Ini kerana bahasa pertuturan sehari-hari amat berkait rapat dengan pandangan dunia (*world view*) penuturnya. Pada umumnya, bahasa basahan atau bahasa yang digunakan sehari-hari itu merupakan ensiklopedia paling hampir dengan penuturnya. Dalam keadaan tertentu, ensiklopedia inilah yang akan menjadi rujukan pertama penutur sebelum kognisi yang lain dijumpai.

Kajian yang dijalankan juga mendapati bahawa faktor komunikasi langsung dengan sahabat atau kenalan dari Malaysia atau Indonesia menepati hipotesis kajian ini. Bagi penutur bahasa Indonesia, sahabat atau kenalan dari Malaysia banyak membantu meningkatkan tahap ketelusan atau kefahaman istilah Malaysia. Na-

mun, tidak demikian halnya bagi penutur bahasa Melayu. Penggunaan kata umum bahasa Melayu yang mudah dan penyerapan istilah daripada bahasa Inggeris dijangka menjadi sebab istilah bahasa Melayu mudah difahami (telus) oleh penutur bahasa Indonesia. Ketika berkomunikasi dengan sahabat atau kenalan dari Indonesia, baik secara formal mahupun tidak formal ujaran-ujaran inilah juga yang digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Jadi, wajarlah jika istilah bahasa Melayu lebih mudah untuk difahami kerana mereka juga memahami bahasa Melayu (yang merupakan asas kepada bahasa Indonesia) dan bahasa Inggeris. Istilah bahasa Indonesia banyak menyerap istilah daripada bahasa Belanda dan ada kalanya menggunakan bahasa daerah (khususnya bahasa Jawa dan dialek Jakarta), sedangkan ketika berkomunikasi mereka jarang-jarang menggunakan istilah tersebut. Komunikasi mungkin berlangsung dalam bahasa Inggeris atau menggunakan istilah yang lebih mudah difahami. Hal ini menyebabkan penutur bahasa Melayu kurang memahami istilah bahasa Indonesia. Jadual 5 menunjukkan perbezaan tahap ketelusan atau kefahaman istilah kategori telus berbanding dengan hubungan persahabatan.

Jadual 5: Hubungan Persahabatan

ISTILAH		Malaysia								Indonesia							
MALAYSIA	INDONESIA	Ada Kenalan				Tiada Kenalan				Ada Kenalan				Tiada Kenalan			
		T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%
Susutan	Kurangan	24	92.3	2	7.7	34	100	0	0	13	92.8	1	7.2	42	91.3	4	8.7
penapisan	penyaringan	21	80.7	5	18.3	26	76.5	8	23.5	6	42.9	8	57.1	18	39.1	28	60.9
sampukan	sela	11	42.3	15	57.7	11	32.4	23	67.6	3	21.4	11	78.6	9	19.6	37	80.4
rangkaian	jaringan	26	100	0	0	33	97	1	3	14	100	0	0	29	63	17	37
Penindanan	Penumpukan	4	15.4	22	84.6	9	26.5	25	73.5	8	57.1	6	42.9	24	52.2	22	47.8
corak bit	pola bit	23	88.5	3	11.5	29	85.3	5	14.7	13	93	1	7	36	78.3	10	21.7
peralatan warna	perkakas warna	24	92.3	2	7.7	33	97	1	3	13	93	1	7	42	91.3	4	8.7

ISTILAH		Malaysia								Indonesia							
MALAYSIA	INDONESIA	Ada Kenalan				Tiada Kenalan				Ada Kenalan				Tiada Kenalan			
		T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%
penjana data	pembangkit data	12	46.2	14	53.8	22	64.7	12	35.3	3	21.4	11	78.6	4	8.7	42	91.3
pekali binomial	Koefisien binomial	15	57.7	11	42.3	20	59	14	41	9	64.3	5	35.7	21	45.7	25	54.3
perayauan global	roaming global	10	38.5	16	61.5	17	50	17	50	6	42.9	8	57.1	10	21.7	36	78.3
Pengagregatan	Agregasi	18	69.2	8	30.8	20	59	14	41	14	100	0	0	36	78.3	10	21.7
Prapengkompil	Prakompilator	16	61.5	10	38.5	16	47	18	53	9	64.3	5	35.7	26	56.5	20	43.5
kenyataan perintah	pernyataan perintah	21	80.7	5	18.3	26	76.5	8	23.5	4	28.6	10	71.4	7	15.2	39	84.8
teks berformat	teks terformat	15	57.7	11	42.3	15	44	19	56	10	71.4	4	28.6	23	50	23	50
model konkrit	model kongkret	18	69.2	8	30.8	26	76.5	8	23.5	14	100	0	0	46	100	0	0
sistem fizikal terkini	sistem fisik terkini	22	84.6	4	14.4	23	67.7	11	32.3	14	100	0	0	38	82.6	8	17.4
Resonans	Resonansi	23	88.5	3	11.5	26	76.5	8	23.5	14	100	0	0	46	100	0	0

Kebiasaan menonton filem dalam bahasa Melayu atau Indonesia sama sekali tidak menepati hipotesis kajian ini. Ini kerana penonton tidak terlalu menghayati dialog dalam filem yang ditontonnya, apatah lagi memahami istilah-istilah yang terdapat dalam filem tersebut (jika ada). Bagi mereka, dialog dan istilah yang digunakan bukanlah sesuatu yang penting untuk difahami. Yang penting ialah mereka dapat menghayati cerita yang ditonton. Tambahan pula, kesukaran mereka memahami dialog dibantu oleh sari kata dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu/ Indonesia. Jadual 6 menunjukkan bahawa tujuh (ditunjukkan melalui petak-petak yang digelapkan) daripada 17 istilah yang diujikan kepada responden Malaysia mempunyai peratusan istilah telus yang lebih rendah walaupun mereka menonton filem Indonesia berbanding dengan peratus istilah telus dalam kalangan mereka yang tidak menonton filem Indonesia.

Jadual 6: Tahap Ketelusan Istilah Kategori Telus Berbanding dengan Kegiatan Menonton Filem Malaysia atau Indonesia.

Istilah		Malaysia								Indonesia							
Malaysia	Indonesia	Tonton				Tidak tonton				Tonton				Tidak tonton			
		T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%
susutan	kurangan	57	95.6	1	3.4	1	100	0	0	32	91.4	3	8.7	23	62.2	2	8
penapisan	penyaringan	46	78	13	22	1	100	0	0	14	40	21	60	10	40	15	60
sampukan	Sela	21	35.6	38	64.4	1	100	0	0	7	20	28	80	5	20	20	80
rangkaian	Jaringan	58	98.3	1	1.7	1	100	0	0	27	77.1	8	22.9	16	64	9	36
Penindanan	Penumpukan	13	22	46	88	0	0	1	100	22	62.9	13	37.1	10	40	15	60
corak bit	Pola bit	51	86.4	8	13.6	1	100	0	0	28	80	7	20	21	64	4	16
Peralatan warna	perkakas warna	56	94.9	3	5.1	1	100	0	0	32	91.4	3	8.6	23	62.2	2	8
Penjana data	pembangkit data	34	57.6	25	42.4	0	0	1	100	2	5.7	33	94.3	5	20	20	80
Pekali binomial	koefisien binomial	35	59.3	24	40.7	0	0	1	100	20	57.1	16	42.9	10	40	15	60
perayauan global	Roaming lobal	26	44	33	66	1	100	0	0	8	22.9	27	77.1	8	32	17	68
Pengagregatan	Agregasi	38	64.4	21	35.6	0	0	1	100	33	94.3	2	5.7	17	68	8	32
Prapengkompil	Prakompilator	32	54.2	27	45.8	0	0	1	100	22	62.9	13	37.1	13	52	12	48
kenyataan perintah	Pernyataan perintah	47	79.6	12	20.4	0	0	1	100	6	17.4	29	82.6	5	20	20	80
Teks berformat	teks terformat	30	50.8	29	49.2	0	0	1	100	23	65.7	12	34.3	10	40	15	60
Model konkrit	model kongkret	44	74.6	15	25.4	0	0	1	100	35	100	0	0	25	100	0	0
Sistem fizikal terkini	sistem fisik terkini	45	76.3	14	23.7	0	0	1	100	30	85.7	5	14.3	22	88	3	12
resonans	Resonansi	49	83	10	17	0	0	1	100	35	100	0	0	25	100	0	0

Andaian bahawa kebiasaan membaca buku-buku rujukan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dapat mempengaruhi tahap ketelusan atau kefahaman istilah juga didapati tidak menepati hipotesis kajian ini. Secara kognitif, ramai yang berfikir bahawa buku ilmiah tentulah akan memuatkan pelbagai istilah dalam bidang berkenaan. Melalui pembacaan, istilah yang pada awalnya dianggap asing dan menimbulkan kesukaran pemahaman akan bertukar menjadi biasa dan mudah difahami. Namun, situasi yang berlaku adalah berbeza. Kebiasaannya penulis lebih selesa untuk menggunakan istilah bahasa Inggeris yang ditulis dalam huruf condong atau istilah yang digunakan dalam masyarakat. Hal ini menjelaskan bahawa sekalipun pengguna bahasa sering merujuk kepada buku-buku dalam bahasa Melayu atau Indonesia, tidak menjamin mereka dapat memahami istilah bahasa Melayu atau istilah Indonesia. Walhal, sepatutnya buku merupakan wahana penyebaran istilah, khususnya istilah yang telah dibakukan. Hasil dapatan adalah seperti dalam jadual 8.

Jadual 7: Tahap Ketelusan Istilah Kategori Telus Berbanding dengan Kebiasaan Membaca Buku dalam bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia

ISTILAH		Malaysia								Indonesia							
MALAYSI A	INDONESIA A	Rujuk buku				Tidak rujuk				Rujuk buku				Tidak rujuk			
		T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%
susutan	kurangan	25	92.6	2	7.4	33	100	0	0	10	30.3	1	9.1	45	71.3	4	8.2
penapisan	penyaringan	24	88.9	3	11.1	23	69.7	10	30.3	5	45.5	6	54.5	19	38.8	30	61.2
sampukan	sela	11	46.7	16	52.3	11	33.4	22	66.6	3	27.3	8	72.7	9	75.0	40	81.6
rangkaian	jaringan	27	100	0	0	32	97	1	3	9	81.8	2	18.2	34	69.4	15	30.6
Penindanan	Penumpukan	4	24.4	23	85.1	9	27.3	24	72.7	8	72.7	3	27.3	24	49	25	51
corak bit	pola bit	22	81.3	5	18.5	30	90	3	9.1	8	72.7	3	27.3	41	83.3	8	26.3

ISTILAH		Malaysia								Indonesia							
MALAYSI A	INDONESIA A	Rujuk buku				Tidak rujuk				Rujuk buku				Tidak rujuk			
		T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%	T	%	K	%
peralatan warna	perkakas warna	26	96.3	1	3.7	31	93.9	2	6.1	11	100	0	0	44	89.8	5	10.2
penjana data	pembangkit data	16	59.3	11	40.7	18	54.5	15	45.6	0	0	11	100	7	14.3	42	85.7
pekali binomial	koefisien binomial	15	55.5	12	44.5	20	69.6	13	39.4	5	45.5	6	54.5	25	51	24	49
Perayauan global	roaming global	12	44.5	15	55.5	15	46.4	18	54.5	4	36.4	7	63.6	12	24.5	37	75.5
Pengagregatan	Agregasi	15	55.5	12	44.5	23	69.7	10	30.3	11	100	0	0	39	79.6	10	20.4
Prapengkompile	Prakompilator	12	44.5	15	55.5	20	60.6	13	39.4	5	45.5	6	54.5	30	61.2	19	38.8
Kenyataan perintah	pernyataan perintah	18	56.6	9	35.4	29	87.9	4	12.1	2	18.2	9	81.8	9	28.4	40	81.6
teks berformat	teks terformat	11	40.7	16	59.3	19	57.6	14	42.4	9	81.8	2	18.2	24	49	25	51
model konkrit	model kongkret	19	70.4	8	29.6	25	75.8	8	24.2	11	100	0	0	49	100	0	0
sistem fizikal terkini	sistem fisik terkini	19	70.4	8	29.6	26	78.8	7	21.2	8	27.3	3	72.7	44	89.8	5	10.2
Resonans	Resonansi	18	66.6	9	35.4	31	93.9	2	6.1	11	100	0	0	49	100	0	0

Jadual 7, menunjukkan bahawa hanya enam daripada 17 istilah telus mempunyai peratus yang lebih tinggi apabila responden merujuk kepada buku dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berbanding dengan mereka yang tidak merujuk kepada buku. Keputusan ini kurang menepati hipotesis kajian yang sepatutnya menunjukkan peratus istilah telus yang lebih tinggi apabila responden merujuk kepada buku dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia berbanding dengan peratus istilah telus yang lebih kecil apabila mereka tidak merujuk kepada buku. Hal ini menjelaskan bahawa pembacaan buku-buku dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang berkenaan tidak mempengaruhi tahap ketelusan atau kefahaman istilah Malaysia dan istilah Indonesia.

(iii) Punca Perbezaan Istilah dan Perbezaan Tahap Ketelusan Istilah antara Malaysia dengan Indonesia

Pada umumnya, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan istilah, dan perbezaan tahap ketelusan atau kefahaman antara istilah Malaysia dengan istilah Indonesia adalah seperti yang berikut:

- (a)** Pengaruh yang kuat daripada bahasa penjajah yang pernah menjajah kedua-dua negara—bahasa Inggeris mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bahasa Melayu, manakala bahasa Belanda mempunyai pengaruh yang kuat terhadap bahasa Indonesia. Oleh yang demikian, terdapat banyak istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang tidak terdapat dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu atau sebaliknya, sehingga istilah-istilah tersebut tidak dapat difahami maksudnya.
- (b)** Pengaruh kaedah pembentukan istilah, khususnya kaedah menterjemah istilah sumber ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada umumnya, kecenderungan istilah bahasa Melayu dibentuk melalui kaedah penerangan konsep, manakala di Indonesia kaedah terjemahan secara harfiah lebih diutamakan.
- (d)** Pemahaman penutur bahasa Melayu atau bahasa Indonesia terhadap sesuatu istilah yang diberikan berbeza dengan makna yang sebenarnya, terutama bagi istilah daripada bahasa Melayu serumpun.
- (e)** Sikap Responden Terhadap Pemilihan Istilah Bahasa Melayu Atau Bahasa Indonesia

Penyediaan istilah secara terancang dalam bahasa Melayu telah membawa perubahan dalam leksikon bahasa Melayu. Ada istilah yang diterjemahkan dan ada istilah yang dipinjam. Walaupun penerimaan penggunaan bahasa Melayu/Indonesia dalam kalangan penutur bahasa Melayu/ Indonesia sendiri sudah semakin kurang mendapat tempat, hasil kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa penutur bahasa Melayu/Indonesia tetap berasakan

bahawa bahasa Melayu/Indonesia masih perlu dijadikan istilah kerana ia dapat memperkukuh jati diri bangsa. Penggunaan bahasa sukuan dan dialek pula kurang diterima penggunaannya dalam kalangan penutur bahasa Melayu atau bahasa Indonesia kerana dianggap akan menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia semakin sukar untuk difahami. Penerimaan kosa kata bahasa serumpun juga sukar diterima, khususnya bagi penutur bahasa Indonesia, kerana ia bukan sahaja akan menyukarkan pemahaman penutur bahasa Melayu, tetapi juga penutur bahasa-bahasa lain di Indonesia sendiri.

Bagi penutur bahasa Melayu, menggunakan istilah bahasa Indonesia bukanlah satu halangan yang besar, asal sahaja istilah tersebut dapat difahami dengan mudah. Hal ini dapat dilihat daripada banyaknya istilah Indonesia yang sudah mula digunakan secara meluas di media massa walaupun istilah-istilah tersebut bukan istilah yang dibakukan oleh DBP. Oleh itu, mungkin tidak keterlaluan jika dicadangkan, dalam proses penggubalan istilah bahasa Melayu, khususnya bidang yang baru ditangani, istilah bahasa Indonesia yang sudah lebih dahulu digubal, digunakan. Berdasarkan pedoman pembentukan istilah bahasa Melayu yang ada, hal sedemikian dibolehkan. Penggunaan istilah Indonesia bukan bertujuan untuk mengindonesiakan bahasa Melayu, tetapi mungkin dapat membantu mengurangkan ketidakselarasan yang berlaku.

(iv) Sikap Responden Terhadap Pemilihan Istilah Bahasa Inggeris

Penggunaan kata pinjaman bahasa Inggeris secara transkripsi dengan penyesuaian ejaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai padanan bahasa sasaran merupakan salah satu kaedah yang selalu diamalkan dalam kerja peristilahan MABBIM. Berdasarkan kajian yang di-

jalankan terhadap penerimaan istilah bahasa Inggeris, dapat disimpulkan bahawa:

- (a) Penutur bahasa Indonesia mula cenderung untuk menyerap istilah daripada bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Belanda. Ini mungkin disebabkan oleh pengaruh para ilmuwan yang kebanyakannya mendapat pendidikan Inggeris berbanding dengan para ilmuwan dahulu yang mendapat pendidikan Belanda.
- (b) Penutur bahasa Indonesia cenderung untuk menerapkan istilah Inggeris berbanding dengan penggunaan bahasa daerah atau dialek. Penyerapan bahasa Inggeris ke dalam bahasa Indonesia lebih mudah diterima dan cepat tersebar.
- (c) Walaupun sebahagian besar penutur bahasa Melayu masih mengharapkan agar istilah bahasa Melayu terus digunakan, mereka bersetuju bahawa penyerapan istilah Inggeris merupakan alternatif terbaik untuk menyeragamkan istilah Malaysia dan Indonesia dengan syarat istilah yang diserapkan itu mestilah lebih mudah difahami.

(v) Pengetahuan Masyarakat Tentang MABBIM

Setelah MABBIM berusia lebih dari tiga dekad dan pelbagai kejayaan telah dicapai, ternyata bahawa ramai yang masih tidak menyedari kewujudannya, jauh sekali daripada mengenali sejarah penubuhan dan peranannya. Hasil kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa hanya satu daripada 120 orang responden, yang mengetahui tentang majlis kebahasaan ini. Responden berkenaan secara tidak sengaja menemukan maklumat tentang MABBIM ketika mencari maklumat berkaitan dengan Majlis Agama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia yang secara kebetulan menggunakan singkatan yang hampir sama, iaitu MABIM, di internet. Sehubungan dengan itu, ramai yang mencadangkan agar kegiatan MABBIM didokumentarikan dan ditayangkan kepada umum. Biarlah ma-

syarakat turut merasai, menghayati dan menilai sendiri peri pentingnya majlis kebahasaan ini. Selama ini, klip video MABBIM yang dihasilkan hanya ditayangkan pada majlis-majlis tertentu MABBIM (contohnya, sambutan ulang tahun MABBIM). Oleh itu, maklumat tentang MABBIM hanya tersebar dalam kalangan penggiat MABBIM itu sendiri, yang jumlahnya amat terhad.

Responden juga mencadangkan supaya kegiatan MABBIM yang eksklusif sifatnya patut dikurangkan dan tiba masanya untuk MABBIM lebih “merakyatkan” kegiatannya dengan mengadakan seminar bahasa dan sastera, di institusi-institusi pengajian tinggi atau agensi-agensi lain yang berminat. Jalinan kerjasama ini bertujuan untuk membentuk generasi pelapis yang akan sama-sama menghayati kebersamaan yang diperjuangkan.

(vii) Penggubalan dan Penyelarasan Istilah di Peringkat MABBIM

Berdasarkan wawancara beberapa orang responden, baik di Malaysia mahupun di Indonesia, kajian ini mendapati bahawa kegiatan penggubalan istilah di peringkat MABBIM perlu diteruskan. Seajar dengan pelbagai bidang baru yang berkembang dari semasa ke semasa. Dari segi bentuk pengkategorian istilah pula, didapati bahawa bentuk pengkategorian penyelarasan istilah MABBIM agak mengelirukan. Dapatan menunjukkan bahawa pengguna istilah lebih selesa sekiranya hanya istilah yang sama seluruhnya (bentuk dan makna) dikelompokkan sebagai istilah yang dipersetujui sama (kategori A). Walau apa pun keadaannya, istilah-istilah ini tentunya tidak akan menimbulkan gangguan komunikasi, kecuali istilah yang diselaraskan itu tidak sama dengan istilah yang digunakan. Pengguna juga didapati cenderung untuk memisahkan istilah yang berbeza bentuk tetapi mempunyai makna yang sama daripada istilah yang berbeza bentuk dan berbeza makna. Dengan kata lain, bentuk

pengkategorian yang dicadangkan oleh pengguna ialah kategori B untuk istilah yang berbeza bentuk tetapi mendukung makna yang sama, dan kategori C pula untuk istilah yang disetujui berbeza bentuk dan berbeza makna. Setelah diamati, format pengkategorian tersebut sama dengan format pengkategorian yang pernah digunakan sebelum ini.

Hal tersebut menjelaskan bahawa pengguna istilah mengharapkan agar MABBIM benar-benar telus dalam penandaan kategori istilah yang diselarasannya. Mungkin sudah tiba masanya untuk MABBIM menyemak semula format pengkategorian penyelarasan istilah yang digunakan sekarang ini. Sekurang-kurangnya penandaan kategori yang akan dicadangkan nanti, dapat dengan jelas memisahkan istilah kategori B (beza bentuk sama makna) daripada kategori C (beza bentuk beza makna) supaya pengguna istilah dan mereka yang terlibat dengan kerja-kerja penyelarasan istilah di peringkat MABBIM, tidak keliru dengan istilah yang berbeza itu. Situasi yang berlaku sekarang ialah sebahagian besar kategori C telah dimasukkan ke dalam kategori A dan B hanya kerana mereka yang terlibat kurang jelas dengan format yang diguna pakai.

Sehubungan dengan itu, kajian ini mencadangkan agar bentuk penandaan kategori adalah seperti yang berikut:

- (i) Kategori A: Istilah yang disetujui sama (bentuk dan makna).
- (ii) Kategori B: Istilah yang disetujui sama (makna) tetapi berbeza bentuk.
- (iii) Kategori C: Istilah yang disetujui berbeza.
- (iv) Kategori D: Istilah yang disetujui untuk ditangguhkan.
- (v) Kategori E: Istilah yang disetujui untuk digugurkan.

Jika dengan format yang akan dicadangkan itu nanti menyebabkan jumlah istilah kategori A menjadi lebih kecil daripada kategori B, maka mereka yang terlibat perlu akur bahawa itulah situasi sebenar yang berlaku. Biarlah B lebih banyak asal sahaja dapat difahami dan tidak menimbulkan konflik daripada A yang lebih banyak tetapi banyak menimbulkan kerancuan makna.

4. Cadangan Masa Hadapan

(i) Kajian Penerimaan dan Pemasyarakatan Istilah MABBIM

Sejak penubuhannya, MABBIM telah menyelaraskan lebih daripada 250 ribu istilah dalam pelbagai bidang. Namun, belum ada satu pun kajian penerimaan dan pemasyarakatan istilah MABBIM dijalankan secara terperinci dengan menggunakan kaedah teoritis dan sistematik. Usaha menyelaraskan istilah di negara anggota MABBIM bukanlah satu pelaburan yang kecil. Oleh itu, sudah sewajarnya istilah-istilah yang telah disepakati itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh penutur bahasa di tiap-tiap negara anggota. Berdasarkan pemerhatian daripada kajian yang telah dilakukan oleh penulis, didapati bahawa istilah yang telah digubal dan diselaraskan oleh MABBIM tidak sampai kepada pengguna. Sehubungan dengan itu, kajian perlu dilakukan untuk memastikan punca yang menyebabkan istilah-istilah tersebut tidak tersebar. Walhal, pada umumnya kajian mendapati bahawa pengguna tidak bermasalah untuk menerima dan menggunakan istilah-istilah tersebut sekiranya mereka tahu mengenainya. Kajian perlu dijalankan dalam skala yang lebih luas, meliputi pelbagai bidang ilmu dan aspek. Kajian yang dijalankan tentunya akan dapat membantu mereka yang terlibat sekali gus bertanggungjawab terhadap kegiatan MABBIM untuk merancang dan menentukan hala tuju kegiatan peristilahan ini. Bagi menarik lebih ramai pengkaji menjalankan kajian berkaitan dengan kegiatan kebahasaan ini, khususnya bidang peristilahan, mungkin ada baiknya jika MABBIM mempertimbangkan geran atau dana kecil sebagai insentif kepada pengkaji. Hal ini telah dilakukan oleh badan penyelarasan istilah antarabangsa Infoterm yang berpusat di Vienna.

5. Kesimpulan

Perbezaan antara istilah Malaysia dengan istilah Indonesia khususnya dalam rangka kerja peristilahan MABBIM sememangnya telah lama wujud. Suatu kajian, khusus bagi membuktikan kewujudan perbezaan tersebut secara teoritis dan sistematik telah dijalankan. Hasilnya didapati bahawa perbezaan bentuk istilah sama sekali tidak mengganggu komunikasi dua hala Malaysia–Indonesia, asal sahaja dapat difahami. Tambahan pula ketidakselarasan ini sememangnya tidak dapat dihindari kerana istilah-istilah tersebut sebahagiannya sudah mempunyai tradisi hayat yang lama di negara masing-masing. Selain itu, istilah yang dibentuk juga mewakili pandangan dunia (*world view*) penutur itu sendiri. Oleh itu, setiap perbezaan perlu dihormati kerana ia merupakan satu keunikan bahasa masing-masing. Penerimaan istilah daripada bahasa sumber, khususnya bahasa Inggeris merupakan alternatif untuk merapatkan jurang ketidakseragaman yang berlaku. Namun, pada masa yang sama, MABBIM juga harus bertanggungjawab untuk memastikan agar penggunaan kata asli bahasa Melayu/Indonesia tidak terus terpinggir. Walau bagaimanapun bahasa Melayu/Indonesia masih dianggap sebagai lambang jati diri bangsa Melayu/Indonesia. Sebarang keputusan dan tindakan yang akan diambil oleh mereka yang terlibat dengan MABBIM, semangat dan kerjasama serantau harus diutamakan demi kepentingan bahasa Melayu/Indonesia.

EVALUASI DAN HARAPAN: SEMALAM, HARI INI DAN ESOK

Dr. Mataim bin Bakar

Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
Brunei Darussalam

1. Pengenalan

Sejarah penglibatan Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam (DBPB) tanpa mengukur berdasarkan parameter lama dan baru, dalam memartabatkan bahasa perlu diabadikan dalam bentuk yang dapat dilihat dan dibaca. Dari satu sisi, pengabadian sejarah tersebut bertujuan sebagai satu imbauan dan ristaan yang harus dikongsikan bersama untuk tatapan pembaca. Bak kata bijak pandai “biarlah sejarah menjadi saksi dan bercerita kepada sesiapa sahaja kerana melalui sejarahlah generasi kemudian mengetahui perjuangan dan pencapaian masa lalu sebagai teladan berguna buat kita hari ini”. Dari sisi lain, imbauan sejarah membolehkan institusi atau badan tertentu menilai dan meninjau kembali sejauh mana mekanisme yang dilaksanakan selama ini dinilai sama ada berjaya ataupun sebaliknya. Dan, dalam konteks memartabatkan bahasa, istilah berjaya membawa maksud berhasil dalam usaha membina sosok bahasa yang murni dan betul kemudian dibakukan dalam bentuk sebaran am yang dapat dilihat melalui buku seperti pedoman ejaan, kamus dan istilah. Manakala istilah sebaliknya membawa maksud sesuatu yang kontradiksi daripada makna pertama i-

aitu berjayakah pembinaan dan perancangan korpus itu tadi dimanfaatkan oleh kelompok sasaran sepenuhnya. Sejalan dengan ini, maka mauduk penulisan makalah ini ialah memerihalkan semula pencapaian Brunei Darussalam dalam wadah kebahasaan serantau yakni MABBIM dari sisi evaluasi dan harapan, baik dalam konteks perancangan bahasa di negara ini mahupun kerjasama kebahasaan di peringkat serantau.

2. Tekad Memperkasa Pembinaan Negara Bangsa Melalui Bahasa

Dalam konteks memartabatkan bahasa apatah lagi berkongsi dengan satu nilai yang sama dengan negara serumpun seperti Malaysia dan Indonesia, tentunya dalam beberapa segi, senario pemer-kasaan bahasa di kedua-dua negara berkenaan secara tidak langsung memberi tuangan idea kepada Brunei Darussalam. Pada tahun awal penubuhannya, perlu diakui bahawa DBPB berhadapan dengan kekurangan kepakaran dalam bidang kebahasaan tambahan pula belum ada institusi pengajian tinggi ketika itu yang boleh disandarkan atau saling bahu-membahu dalam memperkasakan bahasa Melayu. Pendek kata, DBP merupakan satu-satunya wadah dan harapan negara dalam menginstitusikan bahasa Melayu sejak bahasa Melayu diiktiraf dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 (PNB1959) lebih lima dekad yang lalu. Berbanding Malaysia dan Indonesia, perjuangan memartabatkan bukan sahaja bersandarkan kepada institusi yang terarah seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia (DBPM) dan Pusat Bahasa, malahan juga di peringkat universiti-universiti. Senario tersebut nyata berbeza dengan Brunei Darussalam. Ini bermakna DBPB perlu kukuh dari segi sumber kemahiran dan perlu proaktif bagi memastikan fungsi dan matlamat penubuhannya tercapai.

3. Cabaran Pertama: Pemantapan Ejaan Rumi Baru

Pembakuan Sistem Ejaan Rumi bahasa Melayu (SERBM) merupakan sasaran kerja utama DBP pada dekad awal penubuhannya. Bagi memastikan upaya pembakuan SERBM berjalan secara sistematik dan teratur, maka SERBM yang digubal oleh DBP Malaysia (DBPM) dijadikan rujukan oleh DBPB. Faktor yang mendorong SERBM yang digubal oleh DBPM diserap masuk oleh DBPB ialah penakatan perancangan bahasa yang dipraktikkan oleh DBPM lebih banyak memperlihatkan persamaan dengan sistem ejaan di negara ini. Kedua, tentunya hubungan strategik yang sudah sedia terjalin sejak sekian lama dalam tiga sektor yang dominan iaitu geopolitik, geoeкономи and geososial. Dari satu sisi lain, proses perkembangan SERBM bukan sahaja dibantu melalui pegawai pendidikan dari Semenanjung Malaysia yang diambil berkhidmat secara kontrak malah juga perkembangan SERBM turut dibantu oleh anak-anak tempatan yang mendapat pendidikan daripada Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI). Namun perkembangan SERBM mula memperlihatkan proses transisi apabila Malaysia dan Indonesia memperakukan sistem/pedoman ejaan Rumi yang disempurnakan atau Sistem Ejaan Rumi Baharu (SERB) pada tahun 1972 Perkembangan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada Brunei Darussalam yang selama ini sudah terbiasa dengan Sistem Ejaan Rumi Za'aba (SERZ).

Sebagai langkah memastikan penyeragaman ejaan dan mengambil kira perubahan yang dilakukan oleh Malaysia, pada tahun 1983, Brunei Darussalam memperakukan penggunaan Sistem Ejaan Rumi Baharu (SERB) dengan penggunaan secara berperingkat-peringkat melalui arahan Surat Keliling Pejabat Setiusaha Kerajaan Bil. 5/1983 yang bertajuk *Penggunaan Ejaan Baru*. Namun begitu, upaya pemasyarakatan SERB memperlihatkan perkembangan yang agak lamban pada peringkat awalnya, kerana penggunaan SERZ

sudah mendarah daging. Faktor ini juga didorong oleh ketidakseragaman penggunaan SERB dalam kalangan ahli perancang bahasa dan tenaga akademik universiti yang juga merupakan pakar bahasa dan penggubal nahu. Perkembangan SERB yang agak bolak-balik ini memberi tempias pada Brunei Darussalam. Sebagai pengimport ilmu, apabila berlaku perubahan dalam SERB yang sudah disempurnakan khususnya dalam penggunaan kata gabungan sama ada ditulis secara terpisah atau disatukan, ianya turut tidak terkecuali mempengaruhi penggunaan bahasa di Brunei Darussalam. Situasi yang tidak menentu ini, mendorong DBPB mengambil sikap tunggu dan lihat. Apabila sebahagian pengguna bahasa yang peka dengan ketidaktentuan ejaan, mereka meminta penjelasan dan pendirian DBPB. Oleh kerana kekurangan kepakaran, warga kerja DBP tidak dapat membuat keputusan secara objektif dan tepat. Pendirian yang diambil kemudiannya, ialah Brunei Darussalam menerima pakai keputusan yang dibuat oleh agen perancang bahasa yang diiktiraf oleh Malaysia iaitu DBPM walaupun terdapat tengkarah dalam kalangan warga akademik yang pakar dalam pembinaan korpus bahasa. Konflik berpanjangan SERB telah menarik minat kalangan akademik menguasai bidang perancangan bahasa berbanding cabang ilmu linguistik yang lain. Banyak tulisan, pandangan dan komentar dizahirkan dalam jurnal, berkaitan bidang perancangan bahasa khususnya ejaan yang tidak selaras dan seragam. Boleh dikatakan sistem ejaan yang dibentuk pada tahun-tahun awal semacam satu eksperimen, contohnya dalam penggunaan kata gabungan sama ada disatukan atau dipisahkan dan juga sistem ejaan berasaskan pendekatan Za'aba.

Namun harus diakui bahawa perubahan SERB yang agak bolak-balik suatu ketika dahulu bukanlah satu kendala bagi Brunei Darussalam. Kita juga memahami bahawa pada peringkat awal, prototaip yang dimajukan kepada pengguna biasanya akan menerima maklum balas dan pengubahsuaian sebelum benar-benar menjadi satu model terbaik kepada pengguna. Ini tidak terkecuali

dengan pelaksanaan SERB. Bagi merealisasikan penggunaan SERB di Brunei Darussalam, DBPB telah mengundang pemudah cara DBPM iaitu Encik Ismail Dahaman, sebagai pembimbing bagi menerangkan pelaksanaan SERB. Pada masa yang sama, DBP menyiaran kaedah penggunaan SERB termasuk segmen soal jawab bahasa dalam akhbar rasmi Pelita Brunei. Langkah proaktif DBP ini sejajar dengan arahan Surat Keliling bil. 5/1983 berhubung dengan penggunaan SERB.

4. MABBIM dan Sumbangannya dalam Perancangan Bahasa di Brunei Darussalam

Upaya memartabatkan bahasa Melayu tidak terhad dalam memenuhi kehendak setempat malah Brunei Darussalam turut memberi perhatian kepada gerakan kebahasaan serantau. Dengan kata lain, perkembangan menggalakkan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu di Indonesia dan Malaysia, turut memberi kesan pada perkembangan bahasa Melayu di Brunei Darussalam. Mulai Sidang Ke-18 MBIM, Brunei Darussalam buat pertama kalinya bertindak sebagai pemerhati. Penyertaan Brunei Darussalam sebagai pemerhati bertujuan untuk meraih pengetahuan dan kepakaran dalam bidang kebahasaan merangkumi aspek pembentukan istilah, ejaan, perkamusan dan tata-bahasa. Bagi Brunei Darussalam pula, MBIM merupakan satu platform positif bukan sahaja membolehkan Brunei Darussalam berpeluang meraih kepakaran daripada dua negara serumpun malah mengukuhkan institusi ini sebagai satu-satunya penggerak dalam memartabatkan bahasa Melayu. Melalui MBIM, sudah tentu wahana memartabatkan bahasa Melayu dalam konteks serantau akan lebih meyakinkan dan terbentang luas melalui kerjasama, bersepakat bersama-sama, menghasilkan keputusan bersama-sama dan bersama-sama juga untuk melihat bahasa Melayu gagah berdiri dan layak disejajarkan dengan bahasa dunia lainnya. Banyak manfaat yang diperoleh hasil daripada jalinan

kerjasama yang dibentuk melalui MBIM. Sebagai negara yang masih baru dengan pengalaman khususnya yang berkaitan dengan kepakaran kebahasaan, pertemuan antara pakar dan kerjasama yang dijalinan sejak tahun-tahun awal bersama MBIM membantu memperkembangkan penakatan Brunei Darussalam dalam upaya pembinaan kebudayaan kebangsaan melalui bahasa di negara ini.

Dengan berbekal keyakinan dan pengalaman yang ada, Brunei Darussalam telah mengambil langkah permulaan dengan menubuhkan Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam (JKTBMBD) yang dirasmikan pada 29 Oktober 1985. JKTBMBD dianggotai oleh 10 orang ahli yang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan dalam jabatan yang berkaitan dalam mengukuhkan kebudayaan kebangsaan seperti Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perkembangan Kurikulum, Pusat Dakwah Islamiah, Universiti Brunei Darussalam dan Brunei Shell Petroleum. Mereka dilantik oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan terubuhnya JKTBMBD, maka pada tahun yang sama rasmilah Brunei Darussalam menjadi anggota penuh MBIM yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Bahasa Brunei Darussalam– Indonesia dan Malaysia (MABBIM) pada 4 November 1985. Negara Brunei Darussalam diketuai oleh Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Dato Paduka Awang Haji Ahmad bin Kadi, selaku Pengerusi JKTBMBD. Sejarar dengan kemasukan Brunei Darussalam, tuntutan kerja semakin bertambah sesuai dengan cabaran perubahan zaman. Pada 31 Disember 1986, Jawatankuasa Istilah (JKI) di bawah payung JKTBMBD ditubuhkan. JKI JKTBMBD bertanggungjawab membantu DBPB dalam urusan merancang dan melaksanakan pembentukan dan penyelarasan istilah. Sebanyak tujuh buah JKI ditubuhkan, iaitu JKI Matematik, Fizik, Biologi, Kimia, Pendidikan, Perpustakaan dan Perakaunan. Setiap lima tahun, kedudukan JKI ini akan disesuaikan dengan keperluan dan tuntutan ilmu semasa. Rentetan daripada tiga peristiwa besar iaitu penubuhan JKTBMBD,

keanggotaan penuh dalam MABBIM dan penubuhan JKI JKTB-MBD, pada 7 Mac 1988, buat julung-julung kalinya Brunei Darussalam diberi kepercayaan sebagai tuan rumah Sidang Ke-27 MABBIM. Tentunya, pengalaman yang diraih sebagai pemerhati mulai Sidang Ke-18 di Palembang, memberi kesan yang amat besar kepada JKTBMBD khususnya, Brunei Darussalam umumnya untuk menyelenggarakan sidang berkenaan.

Dalam tempoh 35 tahun, MABBIM telah membina korpus istilah dan mempertemukan kumpulan “pakar” silih berganti dalam latar bidang ilmu yang berbeza. Pada peringkat awal pembentukan istilah, MABBIM berdepan dengan hambatan bagi mengujudkan persamaan. Perbezaan yang paling ketara ialah konsep yang didukung sesuatu istilah sumber, dan penggunaan makna yang dianggap tabu. Dalam keadaan tertentu, padanan istilah yang dibentuk melalui lesikal setempat atau peribumi juga dianggap sebagai satu perbezaan yang ketara. Pembakuan padanan bahasa Melayu atau penyesuaian ejaan kata pinjaman bagi istilah sumber yang sama dianggap berbeza dan berkategori B, walhal konsep yang dibawa sama ada bahasa Melayu mahupun istilah serapan nyata tidak bertentangan sebaliknya memperlihatkan kemiripan makna seperti yang dipaparkan melalui pengkategorian subbidang Sosiologi Perkotaan dalam Sidang Ke-11 Pakar MABBIM .

SOSIOLOGI PERKOTAAN				
Istilah Sumber	Brunei Darussalam	Indonesia	Malaysia	Kategori
urban conflict	keadaan bandar	kondisi bandar	Keadaan bandar	B
urban crime	jenayah bandar	kejahatan kota	Jenayah bandar	B
urban settlement	penempatan bandar	Permukiman bandar	penempatan bandar	B
town expansion	pengembangan bandar	ekspansi bandar	Pengembangan bandar	B

shopping malls	pusat beli-beah	mal perbe- lanjaan	Pusat beli- belah	B
-------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	---

Jika situasi ini berterusan, maka akan lebih banyak perbezaan yakni kategori B berbanding kategori A yang memperlihatkan persamaan. Pada saat itu, pakar dan pendamping bahasa sepakat bahawa sebarang ketidakmiripan padanan walaupun sifatnya kecil dianggap sebagai satu perbezaan tanpa menanggapi konsep atau idea yang didukung oleh sesuatu istilah. Aspek permukaan istilah nampaknya diberi perhatian utama. Pendek kata, jika wujud perbezaan dalam visualisasi fonem maka kategorinya adalah B. Sebenarnya yang nyata berbeza dan nampak lebih jelas ialah konsep padanan istilah *bayi* dan *anak damit* bagi istilah sumber *infant*. Istilah *bayi* yang dibakukan membawa rujukan berbeza di Brunei Darussalam. Sesungguhnya, dalam banyak perkara memang sukar untuk menyatukan semua perkara dalam satu titik yang sama, namun dari sisi yang lain pembakuan istilah yang berbeza menunjukkan kepada kita bahawa inilah bentuk-bentuk istilah yang harus digunakan di negara masing-masing. Walaupun wujud variasi Brunei Darussalam, variasi Indonesia dan variasi Malaysia, namun para penggubal dan pendukung MABBIM tidak pernah duduk diam. Bagi memastikan lebih banyak kebersamaan, setiap rencana kerja diteliti dari setahun ke setahun sementelah pula ramai kalangan pakar bahasa yang berlatarbelakang tenaga akademik universiti dilibatkan sama dalam aktiviti penggubalan dan pembentukan istilah. Para ahli bahasa mula menyedari bahawa konsep duduk bersama, dan berbincang bersama bertujuan untuk merapatkan jurang dengan menzahirkan lebih banyak persamaan daripada perbezaan. Jika wujud perbezaan, perbezaan hendaklah bukan soal permukaan tetapi perbezaan terbit dari segi pemerihalannya makna. Sejak kian ramai ahli bahasa muncul dan sama bahu-membahu dalam pembentukan istilah, masalah berkenaan telah berjaya diatasi dengan baik melalui penggubalan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa

Melayu/Indonesia (PUPIBM). PUIBM menjadi asas bagi pembentukan dan penyeragaman istilah demi memastikan kedinamikan bahasa Melayu untuk terus berupaya mengungkapkan istilah teknikal dan ilmu dalam bahasa lain. Istilah-istilah ilmu tersebut guna untuk disalurkan kepada masyarakat pengguna bahasa yang kian berkembang dan terdedah dengan kesan perubahan intelektualisasi sezaman.

Setelah sekian banyak sidang yang dilalui baik Sidang Eksekutif MABBIM mahupun Sidang Pakar MABBIM, Brunei Darussalam telah menerbitkan buku istilah pelbagai bidang ilmu. Sebanyak 29 bidang utama yang merangkumi jurusan sains asas, sains gunaan dan sains sosial digubal. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 176 buah buku istilah pelbagai bidang diterbitkan dan merakamkan jumlah keseluruhan entri sekitar 141, 627 istilah sejak Brunei Darussalam menyertai MABBIM secara rasmi pada tahun 1985¹. Penerbitan buku istilah ini merupakan satu pemberdayaan Brunei Darussalam dalam membina dan mengembangkan istilah teknikal dalam bahasa Melayu. Dari sisi lain, dokumentasi dalam bentuk bertulis tetap mempunyai kesan kepada sejarah peradaban manusia. Tanpa memikirkan besar dan kecil sumbangan dokumentasi tersebut, penerbitan buku umpama sebuah bibliografi nasional yang mempunyai karakteristik dalam pengembangan khazanah masing-masing. Pada zahirnya, sebuah buku bukan sekadar himpunan kata dan bahasa malah berfungsi jauh lebih besar iaitu sebagai sebuah informasi baik untuk kepentingan internal mahupun eksternal. Dalam usaha memastikan MABBIM relevan dengan perkembangan zaman, maka aktiviti MABBIM diberi nilai tambah seperti penganjuran seminar bahasa dan penerbitan jurnal *Rampak Serantau* yang memperkatakan bidang ilmu sains sosial dan sains tulen. Kesemua hasil penerbitan ini menggambarkan kerjasama padu semua pihak yang terlibat sejak Brunei Darussalam menyertai MABBIM pada 4 November 1985.

¹ Senarai kemas kini penerbitan buku istilah, sila lihat Lampiran 1.

Bagi memastikan nilai perwajahan bahasa Melayu tidak cenderung berorientasikan istilah asing khusus bahasa Inggeris, maka MABBIM telah menggalakkan negara anggotanya agar lebih proaktif dalam menyelongkar dan membakukan istilah peribumi. Penggumpulan istilah peribumi giat direncanakan pada tahun 19-90. Pada dasarnya, kalangan ahli bahasa mafhum bahawa dalam perkembangan ilmu yang lebih dahulu dipelopori dalam bahasa kedua, maka peminjaman atau pengimportan istilah tidak dapat dielakkan. Apapun alasannya, pembakuan istilah peribumi tetap diperkasakan dari semasa ke semasa bertujuan menyediakan satu bentuk prasarana bahasa sekiranya beberapa istilah peribumi tersebut suatu ketika nanti boleh mendukung konsep-konsep istilah ilmu, tidak bertentangan dengan alam dan budaya Melayu sehingga membolehkan istilah-istilah tersebut dimanfaatkan dalam pembentukan konsep-konsep baru. Kalangan ahli bahasa percaya bahasa mudah lentur dan berkembang secara dinamik. Situasi ini memungkinkan istilah peribumi mengalami peluasan makna bagi mendukung istilah ilmu tertentu dalam bahasa asing. Sejalan dengan upaya ini, Brunei Darussalam telah mengambil langkah proaktif membakukan istilah tempatan dalam penggubalan istilah Obstetrik dan Ginekologi. Pembakuan kata tempatan dalam peristilahan khususnya istilah Obstetrik dan Ginekologi di Brunei Darussalam nyata mendapat sambutan baik bukan sahaja dalam kalangan pakar perubatan sakit puan di hospital dan klinik perbidanan di negara ini, bahkan kalangan masyarakat penutur bahasa umumnya. Situasi ini didorong oleh penggunaan kata tempatan dalam bidang berkenaan yang memang sudah terlazim berbanding istilah teknikal yang dipinjam. Benarlah, alam dan budaya Melayu membenarkan sesuatu perkara itu mendapat tempat yang baik dalam masyarakat khususnya berkaitan istilah dan bahasa. Maka atas dasar itu juga, Brunei Darussalam menyambut langkah mempelbagaikan aktiviti MABBIM khususnya yang berkaitan dengan penggumpulan istilah peribumi dengan memberi perhatian utama kepada bidang sasaran

yang boleh dimanfaatkan iaitu istilah Keris, Tenunan, Buah-buahan dan Ikan. Penyelidikan istilah peribumi dijalankan dengan jayanya melalui kerjasama dengan beberapa informan dan jabatan yang berkaitan sehingga sebahagian bidang peribumi ini berjaya diterbitkan dalam bentuk glosari bergambar.

Platform MABBIM sebenarnya banyak memberi sumbangan secara tidak langsung dalam upaya memartabatkan bahasa Melayu di negara ini. Pertemuan dan permuafakatan yang diikat melalui satu wadah yang kukuh seperti MABBIM telah mendorong lonjakan 'industri hiliran' yang sangat penting iaitu projek penyusunan Kamus 3 Negara. Dalam pembinaan tamadun negara, sumbangan kamus tidak dapat diukurkan dengan parameter banyaknya kosa kata, saiz dan ketebalan, tetapi lebih dari itu kamus merupakan rujukan penting dan mesti ada bagi membantu pengguna bahasa sendiri membuat rujukan, membantu penutur lain mempelajari bahasa, makna dan konteks penggunaan. Penerbitan kamus juga secara tidak langsung membantu institusi luar yang berminat menerbitkan kamus kepelbagaian bahasa dan makna. Jika kita menoleh ke belakang dalam sejarah panjang perkembangan bahasa di rantau Melayu, ternyata pengumpulan kosa kata bahasa Melayu dalam bentuk kamus menjadi rujukan penting dalam membina hubungan perdagangan dan komunikasi antara berbilang negara dalam sejarah kegemilangan beberapa buah empayar kerajaan Melayu. Menyedari kepentingan tersebut, maka projek kamus berentrikan kosa kata daripada tiga negara anggota MABBIM bukan sahaja bertujuan membutirkan kosa kata bahkan juga membantu memahami para pengguna bahasa secara jelas berhubung konteks dan rujukan dalam lapangan yang betul, tepat dan mengelakkan penggunaan yang dianggap tabu kepada kalangan pengguna bahasa negara anggota MABBIM. Semasa ucapan perasmian Tetamu Kehormat pada Sidang Ke-33 MABBIM, 21-26 Mac 1994 di Brunei Darussalam, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada ketika itu telah menzahirkan bahawa projek kamus

yang dibiayai sepenuhnya Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan suatu yang unik kerana kebanyakan kamus yang diterbitkan oleh negara-negara yang terlibat lebih memperlihatkan cita rasa negara. Projek ini menemukan warga leksikografi tiga negara anggota MABBIM di bawah satu bumbung. Alhamdulillah, kamus tiga negara yang kemudiannya dikenali sebagai *Kamus Bahasa Melayu Nusantara* (KBMN) dilancarkan secara rasmi pada tahun 2003.

Selain KBMN, terdapat satu kamus sisipan yakni *Kamus Kata dan Ungkapan Am* diterbitkan lebih awal iaitu pada tahun 1994 dan edisi perbaikan 2003. Edisi perbaikan memperlihatkan pertambahan kosa kata sejajar dengan perkembangan semasa. Penerbitan kamus dan glosari istilah peribumi membuktikan bahawa upaya pemberdayaan MABBIM tidak terhad pada aspek teknikal bahasa Melayu seperti ejaan dan istilah, malah turut diimbangi dengan aktiviti pengayaan lain demi memastikan keutuhan dan dalam kepustakaan bahasa Melayu. Sejalan dengan ini, pengayaan bahasa Melayu melalui MABBIM diperkasakan lagi melalui aktiviti penerbitan lain seperti jurnal *Rampak Serantau*, seminar bahasa, bengkel penataran bagi meningkatkan kemahiran seperti Penataran Leksikografi di Indonesia tahun 2003, dan Bengkel Penulisan Buku Umum di Malaysia tahun 2007. Kedua-dua bengkel ini turut diikuti oleh beberapa orang pegawai DBPB. Selain itu, mekanisme yang terjalin melalui MABBIM juga dimanfaatkan dalam siri projek Jejak Bahasa khususnya di Sarawak. Projek ini dipelopori oleh DB-PM.

Sejak tertubuhnya Universiti Brunei Darussalam (UBD), upaya pemberdayaan bahasa DBPB melalui satu dimensi baru. Kalaupun tenaga akademik Jabatan Bahasa dan Linguistik, UBD turut sama berganding bahu bersama DBPB dalam menyumbang khidmat kepakaran penggubalan istilah, pedoman ejaan dan penelitian kembali Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (PUPI-

BM). Tenaga akademik ini juga dijemput sebagai pemakalah dalam siri-siri Seminar Bahasa dan Sastra (SBS) di bawah payung MABBIM, dan MASTERA. Perkembangan sumber manusia yang berlatarbelakangkan disiplin ilmu linguistik nyata memberi refleks kepada perjuangan DBPB dalam memartabatkan bahasa Melayu. Menyedari realiti dunia pengurusan dan pentadbiran mulai mengarah kepada sumber manusia yang berteraskan minda dan kepakaran, dan bagi memastikan kerjasama yang berterusan, DBPB telah menjalin pakatan strategik dengan UBD melalui penandatanganan memorandum persefahaman (MOU). Pakatan strategik antara DBP dan UBD tersebut membuka ruang seluas-luasnya bagi kedua-dua institusi untuk bersama-sama dengan negara anggota MABBIM baik dalam sidang pakar, sidang eksekutif mahupun SBS. Sejak diselenggarakan bersama MABBIM dan MASTERA, SBS telah mengangkat pelbagai tema seminar bagi membolehkan para pemakalah, pimpinan, ilmuwan dan khalayak umumnya, mengutarakan pandangan, tujahan dan saran dengan matlamat meningkatkan kedudukan bahasa Melayu/Indonesia. Semua tujahan tersebut dibakukan dalam bentuk resolusi seminar. Antara cadangan ke hadapan yang menarik perhatian pimpinan MABBIM ialah saran untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Upaya untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN dan sebagai salah satu bahasa dunia bukan kerana didorong oleh semangat ketatanegaraan setempat tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi dunia yang mula melihat pasaran ASEAN sebagai lapangan yang menguntungkan. Pecinta bahasa percaya manfaat pertumbuhan ekonomi ASEAN boleh menjadi platform untuk meningkatkan kedudukan bahasa Melayu. Oleh sebab adanya desakan dan sokongan padu, MABBIM telah memberi perhatian sepenuhnya cadangan berkenaan. Kertas cadangan tersebut telah dihadapkan untuk perhatian MABBIM sehingga mendorong pada pembentukan mekanisme bagi merealisasikan saran berkenaan melalui penandatangan Komunique Bersama peringkat

menteri pada 31 Julai 2006. MABBIM percaya bahawa penglibatan pimpinan ketiga-tiga negara merupakan satu tujahan *politik will* kerana sesungguhnya bahasa pada dasarnya akan mendapat kedudukan baik dengan sokongan yang tidak berbelah bagi daripada kerajaan ketiga-tiga negara anggota MABBIM. Di samping itu, antara lain matlamat Komunike Bersama ialah merealisasikan konsep pasaran buku bersama dengan menghapuskan halangan lalu lintas ilmu, perlindungan birokrat dan hak eksklusif setempat yang tidak mewajarkan buku-buku luar dibawa masuk atas alasan yang remeh dan sukar diterima.

5. Masalah dan Cabaran

Kita sering mendengar rungutan dan keluhan bahawa apa yang kita sasarkan tidak semua tercapai 100%. Pendek kata tiada yang sempurna selagi yang bernama kehidupan. Begitulah juga aspek pembinaan dan pengembangan bahasa. Dalam upaya membina dan mengembangkan bahasa, tentunya DBPB berhadapan tantangan dan hambatan. Hambatan datang secara tidak langsung sama ada dapat dilihat dalam bentuk polisi mahupun berdasarkan perkembangan sezaman iaitu kepentingan penguasaan bahasa kedua hasil daripada integrasi teknologi maklumat dalam semua lapangan kehidupan. Faktor ini merupakan beberapa cabaran yang perlu dilalui oleh DBPB. Kedua, pembentukan istilah berdasarkan kehendak dan keputusan negara anggota MABBIM, didorong oleh keperluan penggunaan istilah di institusi pengajian tinggi awam. Dalam konteks Brunei Darussalam, kebanyakan istilah yang digubal tidak dapat dimanfaatkan dan dikembangkan penggunaannya di negara ini kerana beberapa subbidang tersebut merupakan satu tujahan baru, asing dan sangat tinggi. Dengan ketiadaan universiti tempatan yang berkaitan dalam bidang strategik dan teknikal, maka penggunaan istilah yang digubal dalam bidang tertentu memperlihatkan peng-

gunaan yang sangat minimal, sektor yang terhad, dan tidak berkembang jika dibandingkan dengan dua negara anggota MABBIM yang lain. Dek kerana permintaan istilah berkenaan tidak begitu mendesak, maka penghasilan dan penerbitan beberapa bidang ilmu dilihat semacam satu proses inkubator untuk suatu tempoh yang tidak dapat dipastikan. Ketiga, faktor yang memungkinkan senario ini berlaku disebabkan bidang strategik dan kritikal dipelajari dalam bahasa kedua. Watan Brunei Darussalam yang berjaya, dihantar melanjutkan pengajian dalam bidang strategik dan kritikal di seberang laut. Kalangan mereka telah terdidik dengan bahasa kedua, maka apabila mereka pulang ke tanahair dan seterusnya diambil berkhidmat dalam perkhidmatan awam, mereka lebih selesa menggunakan bahasa kedua sebagai rujukan berbanding bahasa ibunda. Rentetan daripada beberapa situasi ini, mendorong kita membuat justifikasi bahawa kejayaan penggubalan dan pembinaan istilah sebenarnya tidak diukur berdasarkan parameter beberapa banyak entri istilah tersebut dibakukan, sebaliknya dinilai sejauh mana istilah tersebut berupaya memberi kesan sertamerta dan merakyat kepada masyarakat khususnya aspek kepenggunaannya. Dengan kata lain, parameter sebenar yang menjadi sukat-sukat kejayaan perancangan bahasa ialah berdasarkan perkiraan mudah, iaitu kejayaan pemasyarakatan istilah dalam erti kata istilah yang digubal dimanfaatkan sepenuhnya.

6. Harapan dan Kesimpulan

Sepanjang bekerjasama melibatkan pertukaran pakar dan perencanaan bidang, sejauh ini DBPB telah menerbitkan sebanyak 176 buah buku istilah, kamus bahasa, glosari istilah peribumi dan jurnal *Rampak Serantau*. Meskipun sebahagian bidang ini kurang berjaya dimasyarakatkan kerana kurangnya penggunaan, namun kita harus berfikir secara positif sesuai dengan perumpamaan yang berbunyi “sediakan payung sebelum hujan”. Jika suatu hari nanti,

takdir menyebelahi DBP, maka DBP pada dasarnya telah bersedia dari semua segi khususnya yang berkaitan dengan pengayaan istilah ilmu. Dari sisi lain, pembentukan istilah strategik dan kritikal membantu ahli leksikografi dan terjemahan bagi mendapat istilah yang tepat dalam pengembangan kerjaya mereka. Melalui MABBIM juga, DBPB mendapat inspirasi untuk membangunkan pangkalan data maklumat sendiri di bawah projek Gerbang Bahasa. Semua data manual, insya-Allah akan didigitasikan sejajar dengan konsep kerajaan maklumat atau *e-government*.

Selain itu, Brunei Darussalam bersama-sama dengan negara anggota MABBIM akan berganding bahu bagi memperjuangkan gagasan iaitu menjadikan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa ASEAN sebagaimana diperakukan dalam Keputusan Umum Sidang Eksekutif Ke-43 MABBIM di Kuala Lumpur pada 9–11 Mac 2004. MABBIM sebenarnya membawa semangat jauh lebih besar dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu/Indonesia. Melalui MABBIM, pengemblengan kepakaran ketiga-tiga pihak membolehkan upaya pengayaan bahan dan korpus bahasa tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam penakatan dunia hari ini, kesepakatan dan kebersamaan adalah jauh lebih baik daripada bergerak sendiri-sendiri apatah lagi dalam konteks memperkasakan bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu. Kita dapat lihat bagaimana ruang geografi itu diikat dengan satu bahasa yang menyatukan ketiga-tiga negara serumpun.

Lampiran:

ISTILAH SAINS SOSIAL

Bil	Tajuk Buku	Subbidang	Jumlah Entri
1	Kewangan	Kewangan: Insurans	1364
		Kewangan: Perbankan	1233
		Kewangan: Umum	821
		Kewangan: Pasar Modal dan Sekuriti	1095
2	Linguistik	Linguistik: Semantik	463
		Linguistik: Sociolinguistik	449
		Linguistik: Semiotik/Leksikografi/ Neurolinguistik dan Linguistik Teks	110
		Linguistik: Tatabahasa	1314
		Linguistik: Sejarah dan Terapan	274
		Linguistik: Fonologi	1131
3	Kesusasteraan	Kesusasteraan: Drama	485
		Kesusasteraan: Filologi	564
		Kesusasteraan: Puisi	1074
		Kesusasteraan: Kritikan dan Teori	1023
		Kesusasteraan: Prosa	1169
4	Kejuruteraan	Kejuruteraan: Awam	2297
		Kejuruteraan: Elektrik	3638
		Kejuruteraan: Mekanik	3578
		Kejuruteraan: Kimia	2292

		Kejuruteraan: Perlombongan	3410
		Kejuruteraan Kapal Terbang: Avionik dan Peralatan	980
5	Ekonomi	Ekonomi: Pengangkutan	311
		Ekonomi: Analisis	1400
		Ekonomi: Awam	1324
		Ekonomi: Antarabangsa	904
		Ekonomi: Industri	333
		Ekonomi Kewangan	1414
		Ekonomi: Pembangunan dan Perancangan	962
6	Sosiologi	Sosiologi: Perkotaan	162
		Sosiologi: Politik	80
		Jumlah Kecil	35654
		Sosiologi: Pendidikan	365
		Sosiologi: Keluarga	323
		Sosiologi: Ekonomi	88
		Sosiologi: Penyelewangan Agama	70
7	Pertanian	Pertanian: Agronomi	2571
		Pertanian: Perlindungan Tanaman	1877
		Pertanian: Sains Tanah	3867
8	Antropologi	Antropologi: Perbandaran dan Pembangunan/Gerakan	228
		Antropologi: Ekonomi dan Pendidikan	290
		Antropologi: Politik, Ekologi, dan Kependudukan	175
		Antropologi: Perdesaan, Perubatan dan Seni Budaya/Etnomuzikologi	106
		Antropologi: Etnologi/Etnografi/Etnistik/	1314

		Minoriti	
		Antropologi: Agama	387
9	Veterinar	Veterinar: Sains Paraklinikal	1999
		Veterinar: Perubatan Veterinar	1946
10	Penternakan	Penternakan: Makanan dan Pemakanan	1123
		Penternakan: Genetik dan Pembiakbakaan	1092
		Penternakan: Teknologi Hasil Ternakan	1099
		Penternakan: Pengeluaran Ternakan	
11	Perhutanan	Perhutanan: Konservasi Sumber Daya Hutan	1241
		Perhutanan: Sosial Ekonomi Hutan	273
		Perhutanan: Hasil dan Penggunaan Hutan	783
12	Komunikasi Massa	Komunikasi Massa: Media Siaran	1545
13	Perikanan	Perikanan: Pengurusan Sumber Daya dan Sosial Ekonomi Perikanan	1241
		Perikanan: Penangkapan Ikan dan Teknologi Hasil Ikan	1559
		Perikanan: Akuakultur	1025
		Perikanan: Rekreasi	353
14	Teknologi Maklumat	Teknologi Maklumat: Organisasi Sistem Maklumat, Rangkaian Komunikasi Komputer, Perkakasan, dan Perisian	5307
		Jumlah Kecil	32247
		Teknologi Maklumat: Dalam Masyarakat, Pengurusan dan Aplikasi	1147

		Teknologi Maklumat: Sistem Maklumat Matematik Teknologi Maklumat Teori Metodologi	2914
15	Automotif	Automotif: Kerangka Badan dan Rangkaian Kuasa	655
		Automotif: Elektrik, Aksesori, dan Enjin	1670
16	Golf	Golf	400
17	Perfileman	Perfileman	1274
18	Fotografi	Fotografi	2750
19	Aeroangkasa	Aeroangkasa Satelit dan Roket	1985
20	Arkeologi	Arkeologi: Kaedah, Analisis dan Hasil Analisis	901
21	Sains Politik	Sains Politik Sains Perbandingan	1401
		Sains Politik Pentadbiran Awam	1111
		Sains Politik Dasar Awam	1277
		Sains Politik Hubungan Antarabangsa	1120
		Sains Politik Islam	530
22	Pelancongan	Pelancongan: Sarana & Prasarana	955
		Pelancongan: Pengembangan & Pembangunan	1529
23	Undang-Undang	Undang-Undang: Antarabangsa	626
		Undang-Undang: Maritim Antarabangsa Perdagangan Antarabangsa	1190
		Jumlah Kecil	23435
		Jumlah Keseluruhan Entri Istilah	141,627 Entri

MELESTARIKAN KESEPAKATAN SERUMPUN

Dato' Dr. Firdaus Abdullah

Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
Malaysia

MABBIM dan MASTERA ialah dua wadah kembar yang memberi ruang dan peluang kepada tiga negara Malaysia, Indonesia dan Negara Brunei Darussalam dalam memperkasakan bahasa dan perseruan Melayu/ Indonesia.

Walaupun pada zahirnya yang menjadi patokan utama MABBIM dan MASTERA ialah bahasa dan sastera, akan tetapi dalam konteks yang lebih luas, kedua-dua wadah itu sebenarnya adalah sebagai wahana diplomasi budaya yang menyumbang terhadap kerukunan hidup antara tetangga dalam kalangan bangsa-bangsa serumpun di Asia Tenggara.

Ertinya, di samping pencapaian yang nyata dan terserlah dalam bidang bahasa dan sastera, secara tersirat dan meresap pencapaian MABBIM dalam penyelarasan dan penyeragaman sistem ejaan rumi Melayu-Indonesia sejak tahun 1972 memang sudah termaklum. Ini diikuti pula dengan pencapaian cemerlang dalam penciptaan dan penyelarasan sekitar 350 ribu istilah dalam pelbagai bidang ilmu.

Pencapaian tersirat MABBIM sepanjang 35 tahun yang lalu pula adalah dalam mewujudkan semangat persahabatan dan rasa kesetiakawanan dalam kalangan negara-negara berkenaan. Semangat persahabatan dan rasa kesetiakawanan ini pula telah memberi

sumbangan yang cukup signifikan kepada hubungan politik, ekonomi dan budaya antara Malaysia, Indonesia dan Negara Brunei Darussalam.

Di tengah-tengah interaksi politik dan ekonomi ketiga-tiga negara berkenaan yang dari semasa ke semasa ditandai oleh sentimen politik yang sensasi dan kerakusan ekonomi yang tidak kenal batas, MABBIM dan MASTERA menjadi wadah untuk interaksi antarbudaya yang menyumbangkan dan menyuburkan kemajuan ilmu dan tamadun, sekali gus itu merupakan kejayaan melestarikan warisan budaya serumpun yang diubahsuai mengikut peredaran zaman.

MABBIM yang didirikan selama 35 tahun ini sesungguhnya mempunyai tujuan dan matlamat yang murni, iaitu menjalinkan kerja-sama yang erat dalam bidang kebahasaan dan persuratan. Tetapi sebagai manfaat sampingan, sama ada disedari ataupun tidak kegiatan-kegiatan kebahasaan dan persuratan tersebut juga telah menyemarakkan diplomasi budaya dalam kalangan negara-negara ASEAN.

Kita boleh berhujah bahawa MABBIM diwujudkan untuk menunaikan aspirasi dan mencapai tiga matlamat bersama, yakni matlamat tersurat, matlamat tersirat dan matlamat sejagat. Dan, untuk mencapai ketiga-tiga matlamat tersebut, kerjasama dan komitmen bersama yang jitu dalam kalangan negara-negara pendiri serta pemerhati MABBIM amat perlu dilestarikan.

Matlamat tersurat MABBIM adalah untuk memperkasakan bahasa dan persuratan Melayu/Indonesia. Manakala, matlamat tersirat MABBIM adalah untuk membina dan memperkuat jati diri dan rasa kebersamaan sesama bangsa serumpun sebagai pewaris bersama suatu kebudayaan yang berakar umbi serta berkembang luas di alam Nusantara.

Matlamat sejagat MABBIM pula adalah untuk memberikan pengisian serta menentukan arah tuju tamadun dunia. Bahasa dan persuratan Melayu/Indonesia sudah sejak lama menjadi etos serta

elemen dominan yang menandai perkembangan tamadun di Alam Melayu, tentulah tidak mustahil mampu menjadi ikon dalam arus perdana perkembangan tamadun dunia.

Lantaran itulah, kerjasama MABBIM tidak semestinya terbatas kepada pembinaan istilah pelbagai bidang dan subbidang ilmu mahupun terhad kepada usaha-usaha penyeragaman ejaan sahaja. Ertinya, kita juga harus memikirkan pendekatan dan strategi baharu untuk menjadi penggerak utama diplomasi budaya, sekali gus diplomasi antarbudaya dalam kalangan negara-negara ASEAN dan seterusnya ke peringkat antara-bangsa.

Kita sebenarnya boleh berbangga dengan pencapaian 35 tahun MABBIM dan 11 tahun MASTERA. Namun, di samping kita berbangga, kita juga patut bertanya: Adakah pencapaian kita itu se-timpal dan berbaloi dengan pelbagai sumber masa, tenaga dan wang yang kita sumbangkan selama ini? Adakah segala potensi dan kelebihan yang ada pada bahasa, persuratan dan kebudayaan kita telah kita manfaatkan demi mencapai tiga matlamat MABBIM yang telah saya nyatakan di atas?

Sesungguhnya, kita perlu bertanya dan bermuhasabah. Kita juga perlu melakukan introspeksi, sekaligus menggugah hati nurani dan akal budi kita masing-masing tentang bagaimana kita hendak mengoptimumkan serta melestarikan kerjasama dan kesepakatan MABBIM dan MASTERA ini.

Kita haruslah bertanya dan bermuhasabah, dan tidak terperangkap oleh tabiat “sindrom meneruskan” atau “*carry on syndrome*”. Tentu sahaja, mana-mana kaedah kerja, projek dan program yang berdaya maju serta memberi manfaat dan impak besar kepada pencapaian tiga matlamat MABBIM itu patut kita teruskan.

Kita juga perlu bertanya dan mengingatkan diri kita peri perlunya kerjasama dan kesepakatan kita selama ini. Justeru, tidak salah kita mempersoalkan kejituan matlamat kerjasama kita, kandungan kerjasama kita, cara kita bekerjasama dan juga keberkesanan kerjasama kita selama ini, jika semua tanda tanya kita itu a-

adalah bersifat “kawal tangkis” (*damage control*) dan “pembinaan dan pembangunan” (*developing*).

Ertinya, di samping kita berbangga dengan pencapaian yang tersirat, tersurat dan sejagat dalam bidang bahasa dan persuratan yang telah MABBIM kecapai sepanjang kewujudannya, kita harus senantiasia bermuhasabah diri dan bermuhasabah organisasi tentang apa-apa yang telah kita capai, apa-apa yang belum kita capai dan apa-apa yang lebih pragmatik untuk kita lakukan demi melestarikan kesepakatan bahasa dan budaya yang menjadi teras kewujudan MABBIM.

Pada hemat saya, tidak salah kita beralih tegak, asal di tanah nan sebidang. Tidak salah kita beralih duduk, asal di tikar nan sehelai. Ertinya, tidak salah kita merangka strategi dan mengambil pendekatan baharu, asalkan semua itu demi menjamin kelestarian dan kewibawaan MABBIM.

Saya percaya berkat kerjasama dan kesepakatan yang jitu antara negara-negara anggota dan pemerhati MABBIM yang kita jalinkan sepanjang 35 tahun ini, MABBIM akan terus ikonik sebagai badan pembinaan bahasa, sekali gus penggerak diplomasi budaya dan antarbudaya serantau dan pada peringkat antarabangsa.

Peranan MABBIM sebagai badan pembinaan bahasa memanglah cukup dominan, bagaimanapun, saya juga mengharapkan MABBIM memainkan peranan sebagai duta diplomasi budaya atau *cultural diplomacy ambassador* yang akan memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap persefahaman, kerukunan dan kesepaduan serantau yang dengan sendirinya turut memberikan sumbangan kepada kelestarian kesepakatan, keamanan dan kerukunan yang menjadi asas kepada pembangunan sosio-ekonomi dan kehidupan sosiopolitik yang sihat dalam kalangan negara-negara tetangga.

Pendekatan diplomasi budaya, bahkan, diplomasi antarbudaya pastinya akan membuahkan hasil dan kejayaan yang lebih produktif dan positif dalam konteks globalisasi semasa, dan pada masa

mendatang. Walaupun, peluasan dan peningkatan pengaruh bahasabahasa utama dunia seperti bahasa Inggeris akan lebih dominan melalui pembangunan pesat teknologi informasi dan komunikasi, namun dengan adanya kesepakatan yang jitu dalam kalangan negara-negara pendiri dan pemerhati MABBIM, nescaya kita akan berjaya menampilkan etos bahasa serta persuratan Melayu/Indonesia di mata dunia.

Pernyataan Bersama atau Komunique Bersama yang dipertanggungjawabkan kepada MABBIM untuk menggarap dan memberikan pengisiannya, cukup wajar kita terjemahkan, sekali gus kita jadikan landasan bukan sahaja untuk tujuan penilaian semula, bagaimanapun, untuk menyusun dan merangka semula pendekatan serta strategi pelaksanaan program kerjasama bahasa dan persuratan Melayu/Indonesia yang lebih pragmatik.

Bagi Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, kami menaruh harapan yang tinggi agar MABBIM akan lebih signifikan dan relevan. Justeru, jika perlu, kita hendaklah senantiasa melakukan penilaian berterusan terhadap hasil-hasil kerja MABBIM selama ini, sekali gus meneliti kembali keefisienan serta keberkesanan tatacara dan tatakerja yang diamalkan oleh MABBIM sejak sekian lama.

Perubahan-perubahan yang hendak dilakukan itu tentunya atas dasar penambahbaikan, pemurnian dan pemantapan fungsi serta peranan yang dimainkan oleh MABBIM. Pada hemat saya, di samping MABBIM memberi tumpuan utama kepada pembinaan istilah-istilah ilmu pelbagai bidang dan subbidang, MABBIM juga harus menjadi sarana untuk mengembangkan dan merealisasikan kesepakatan diplomasi budaya dan antarbudaya pada peringkat serantau dan antarabangsa.

Pada peringkat serantau, di samping memainkan peranan sebagai organisasi yang ikonik dan berwibawa dalam pemodenan serta pengilmuan bahasa Melayu/Indonesia melalui empat Jawatankuasa/Komisi iaitu Jawatankuasa/Komisi Istilah, Penyelidikan/Penelitian, Kegiatan dan Penerbitan, MABBIM bolehlah juga

menerokai strategi dan pendekatan baharu bagi merealisasikan diplomasi serantau agar kehadiran MABBIM sebagai badan pembinaan bahasa, sekali gus sebagai organisasi budaya akan lebih dirasai dalam ASEAN, dan seterusnya pada peringkat antara-bangsa.

Setelah wujud selama 35 tahun, cukup wajar untuk MABBIM memperluas cakupan pembinaan dan pengembangan bahasa yang menjadi matlamat dominannya. MABBIM perlu memperluas perspektif dan dimensi pemikirannya, sekali gus menerokai dan menjangkau cakerawala perancangan bahasa yang sejagat agar berupaya mendepani tuntutan, situasi semasa serta mendatang dengan kompetitif dan efisien.

Saya percaya usaha pengembangan dan pemasyarakatan bahasa dan persuratan Melayu/Indonesia ke peringkat serantau dan antarabangsa amat menuntut keupayaan, kemahiran serta kecekapan dalam perancangannya dengan memanfaatkan segala teori dan amali yang berhubung kait dengan perancangan bahasa, promosi dan pengembangan serta pemasyarakatan persuratan Melayu secara terancang dan mendalam. Lebih daripada itu, gerak kerja ini memerlukan amalan bijaksana dalam pelbagai perancangan strategik yang pada saya memerlukan kebijaksanaan dalam diplomasi budaya dan antarbudaya.

Dalam konteks kerjasama dan sinergi dalam MABBIM, saya berharap usaha memperkasakan bahasa Melayu/Indonesia dan persuratan serumpun diperluas ke persada antarabangsa agar lebih dikenali, dan dipelajari secara meluas. Dalam pada itu, kita juga terlebih dahulu perlulah mempertingkatkan kemahiran dan kebijaksanaan untuk saling menghormati bahasa dan persuratan serta budaya yang merentasi sempadan geo-politik dan budaya sejagat.

Maka, dalam upaya untuk permuafakatan, dalam ruang lingkup Nusantara itu sendiri, saya percaya kemampuan bertahan yang hampir sedekad ini tentu dihadapkan dengan keperluan untuk memperoleh pengiktirafan mutlak serta pemahaman terhadap ke-

dinamikan budaya, rakan serantau serta tumpuan kepada pegangan sejagat atau “*universal tenets*”.

Apa pun, segala-segalanya boleh sahaja diatasi melalui strategi diplomasi budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu sarana yang dapat mewujudkan persefahaman dan rasa saling menghormati budaya yang akhirnya akan menjayakan usaha untuk saling bekerjasama, sekali gus merealisasikan kesepakatan dan kesetiakawanan dalam mencapai matlamat-matlamat bersama MABBIM.

Maka, saya cukup berkeyakinan bahawa, sekiranya kita berani untuk melakukan perubahan demi kesinambungan (*change for continuity*) baik dalam tatacara kerja mahupun dari aspek orientasi kita, nescaya MABBIM akan menjadi badan pembina bahasa dan pemuka gerakan diplomasi budaya akan dapat kita lestarikan.

PERSEBARAN ISTILAH DALAM BERKALA ILMIAH

Ir. Agustin Wydia Gunawan
Departemen Biologi, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam-FMIPA
Institut Pertanian Bogor

1. Pengantar

Berkala ilmiah diterbitkan untuk menyebarluaskan hasil penelitian para peneliti dalam bentuk artikel ilmiah. Bahasa merupakan salah satu modal untuk berkomunikasi dalam persebaran informasi tersebut dan penggunaan bahasa yang benar dan efektif harus diupayakan supaya apa yang ingin disampaikan mencapai sasaran yang dituju. Dalam berkomunikasi, penulis menuangkan hasil penelitiannya dalam paragraf yang harus disajikan secara sinambung sehingga tatanan itu mudah diikuti dan dimengerti oleh pembaca. Kalimat yang menyusunnya, kata yang dipilih, dan istilah yang tepat akan menunjukkan kecendekiaan penulis.

Dalam pengelolaan berkala ilmiah, adanya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Bahasa, Pedoman Ejaan Baru yang Disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah oleh Pusat Bahasa, dan beberapa glosarium pelbagai bidang ilmu oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sangat membantu. Saya beruntung ketika penyunting Glosarium Biologi memberikan contoh buku tersebut kepada saya pada tahun 1994-an. Glosarium tersebut bermanfaat dalam pekerjaan saya sebagai dosen dan pengelola berkala ilmiah. Adanya cakram kompak (*compact*

disk, CD) tentang Glosarium Istilah Asing-Indonesia baru saya ketahui ketika sekretaris panitia Kerja Sama Kebahasaan, Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia (Mabbim) mengirimkannya kepada saya. Cakram kompak ini tentu akan membantu jika berada di dalam komputer setiap pengelola berkala ilmiah.

Artikel hasil penelitian, catatan penelitian, ulasan balik, dan ulasan yang dikirimkan untuk diterbitkan pada berkala ilmiah 'Hayati' dan 'Jurnal Mikrobiologi Indonesia' sangat beragam dalam kebahasaannya. Dalam tulisan ini akan dipaparkan sekilas sejarah kedua berkala ilmiah, masalah penyuntingan istilah Indonesia, dan hasil pencermatan Glosarium Istilah.

2. Sekilas Sejarah Pengelolaan Berkala Ilmiah

Bagaimana awal mula mengelola berkala ilmiah? Jawaban secara jujur ialah ingin membantu menyebarkan hasil penelitian kawan-kawan yang perlu diketahui oleh banyak ilmuwan. Oleh karena itu, ketika pada tahun 1993/1994 diketahui bahwa jurnal terbitan Indonesia dalam bidang biologi tidak ada yang terbit maka kami membeberanikan diri untuk mengelola berkala ilmiah 'Hayati' dan terbitlah nomor perdana pada bulan Juni 1994 dengan penerbit Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Pada tahun 1999 kami diminta untuk membangunkan berkala ilmiah yang mati suri sejak tahun 1995. Pada tahun 1995 itu 'Jurnal Mikrobiologi Indonesia' yang diterbitkan oleh Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia yang seyogianya terbit tiga kali setahun hanya terbit satu kali.

Kedua jurnal tersebut terbit sinambung dan mendapat akreditasi peringkat A oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 'Hayati' sebanyak 3 kali berturut-turut dan 'Jurnal Mikrobiologi Indonesia' sebanyak 2 kali berturut-turut. Masa akreditasi berkala ilmi-

ah ialah selama tiga tahun. Keduanya kini membenahi diri untuk menjadi berkala dengan kaliber internasional. Saya masih bertanya-tanya mengapa berkala ilmiah dalam bahasa Indonesia yang bermutu tidak tetap dipertahankan? Apakah benar berkala ilmiah dalam bahasa Indonesia bermutu tidak/kurang diminati oleh dunia?

3. Beberapa Catatan Penyuntingan

Bidang biologi dan mikrobiologi yang berkembang pesat meunangkan pelbagai istilah yang baru dalam tulis-menulis. Biasanya penulis langsung menerapkan istilah dalam bahasa Inggris dengan huruf italik. Penulis mungkin memang tidak tahu istilah dalam bahasa Indonesia untuk kata tersebut, atau mungkin banyak pula yang tidak peduli akan istilah bahasa ibu, atau paling celaka kalau penulis merasa 'keren' jika tulisannya menggunakan bahasa asing meskipun kadang kala salah eja ketika menuliskannya. Tampilan yang banyak menggunakan bahasa asing dalam suatu publikasi memang tampak tidak rapi, terutama karena banyak kata tercetak dalam huruf italik.

Penggunaan istilah Indonesia sudah banyak digunakan, namun beberapa sering ditulis salah. Kadang hanya salah ejaan, tetapi kadang kala juga tidak tepat penggunaannya karena maknanya lain. Di bawah ini dipaparkan lima contoh istilah yang ditulis salah.

haemoglobin	seharusnya	hemoglobin <i>hemoglobin</i>)
ensim	seharusnya	enzim (<i>enzyme</i>)
otoklaf	seharusnya	autoklaf (<i>autoclave</i>)
termofil	seharusnya	termofili (<i>thermophilic</i>)
ragi	seharusnya	khamir (<i>yeast</i>)

Lima istilah Indonesia di atas hanya sekadar contoh saja. Dalam 'Hayati' dan 'Jurnal Mikrobiologi Indonesia', tiga istilah pertama mendapat perhatian dalam penyuntingan. Istilah termofil diguna-

kan sebagai adjektiva, misal 'bakteri termofil' (*thermophile*, *thermophilic*). Glosarium Biologi memadankan kedua istilah Inggris tersebut sebagai termofili. Demikian juga, istilah khamir digunakan untuk *yeast*—merupakan organisme bersel satu—yang dibedakan dari produk berisi khamir yang berbentuk lempeng bundar berwarna putih atau butiran berwarna kecokelatan. Produk berbentuk lempeng atau butiran untuk membuat tapai, arak, dan adonan roti tersebut yang dinamakan ragi. Jadi, di dalam ragi terdapat massa sel khamir.

Dalam pengelolaan berkala ilmiah, penggunaan istilah yang sudah digunakan sejak puluhan tahun yang lalu—meskipun tidak sesuai dengan istilah dalam Glosarium Biologi—digunakan dengan taat asas dalam berkala ilmiah 'Hayati' dan 'Jurnal Mikrobiologi Indonesia'. Keempat istilah tersebut ialah 'cendawan' untuk *fungus/fungi*, 'kapang' untuk *mold*, 'jamur' untuk *mushroom*, dan 'khamir' untuk *yeast*. Cendawan merupakan istilah umum untuk organisme yang tubuhnya berupa struktur seperti filamen/benang tergolong dalam dunia Fungi, cendawan yang bentuk morfologinya renik dinamakan kapang, cendawan yang berukuran makro dan dapat dipegang, dipetik dengan tangan dinamakan jamur, dan cendawan yang bersel tunggal dinamakan khamir.

Prefiks di- yang diikuti nama alat—seperti dipipet, divorteks, dan diautoklaf—sering digunakan dalam tulis-menulis. Divorteks mulai sering muncul ketika dalam penelitian diperlukan alat 'vorteks' untuk mengocok suatu bahan, sedangkan diautoklaf benar pula ketika 'autoklaf' digunakan untuk mensterilkan bahan. Kedua kata tersebut dapat diganti menggunakan 'dikocok/diaduk menggunakan vorteks' dan 'disterilkan menggunakan autoklaf', yang meskipun lebih panjang, tetapi maknanya lebih jelas.

Dalam mikrobiologi, organisme yang dibiakkan pada medium tumbuh dinamakan biakan (*culture*) dan verbanya ialah membiakkan. Bahan atau nutrisi untuk membiakkannya dinamakan medium. Istilah asing dalam bahasa Inggrisnya memiliki dua bentuk kata: *medium* untuk bentuk tunggal dan *media* untuk bentuk jamak. Da-

lam pengelolaan berkala, istilah yang digunakan ialah biakan, membiakkan, dan medium. Istilah medium dipilih karena bahasa Indonesia tidak memiliki bentuk jamak. Oleh karenanya istilah diserap utuh dari bentuk tunggalnya.

Kini telah diketahui bahwa mikroba yang hidup di suatu habitat tidak selalu dapat ditumbuhkan (*unculturable*) pada medium biakan. Dalam artikel paling mudah memang menuliskannya sebagai huruf italik. Kita dapat membentuk istilah tersebut sebagai 'tak-terbiakkan' atau 'tidak dapat dibiakkan'.

Dalam pengelolaan berkala ilmiah, kami selalu berusaha menggunakan istilah yang 'benar' dan taat asas. Istilah 'benar' belum tentu sesuai dengan istilah yang dikumpulkan oleh para pakar di dalam glosarium istilah. Mengapa? Prof Dr Anton M Moeliono⁴, seorang pakar bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa istilah yang digunakan oleh masyarakatlah yang akan menjadi istilah yang baku. Sampai saat ini istilah berbeda tersebut masih digunakan.

Artikel yang substansinya bermutu akan menjadi prima jika dituliskan menggunakan bahasa yang baik dan benar, termasuk penggunaan istilah yang tepat dan taat asas.

4. Glosarium Istilah

Usaha penerbitan Glosarium Biologi dimulai pada tahun 1974 dan pada tahun 1993 telah terkumpul sebanyak hampir 20 000 istilah. Glosarium dalam bentuk CD yang terbit pada tahun 2006 berisi 182 415 istilah dari 32 bidang ilmu: 4 bidang ilmu dasar, 15 bidang ilmu terapan, dan 13 bidang humaniora. Glosarium dalam bentuk CD tersebut akan mempermudah dan menolong penyunting berkala ilmiah dalam pencarian padanan istilah.

Dari hasil perambanan (*browsing*) istilah *genetics* dari Glosarium untuk semua bidang dengan kriteria 'sama' diperoleh 3 istilah Indonesia 'genetika', sedangkan dari *cytogenetics* diperoleh 3

⁴ komunikasi pribadi

istilah 'sitogenetika' dan 1 istilah 'sitogenetik' (Tabel 1). Jika kita mengikuti Pedoman Umum Pembentukan Istilah maka istilah dengan sufiks *-ics* (Inggris) diubah menjadi *-ika*. Oleh karena itu, hasil perambanan yang benar ialah 'sitogenetika' sehingga perolehan dalam bidang Pertanian tidak benar. Apabila kriterium 'memuat' yang digunakan untuk meramban istilah *genetics* maka diperoleh 36 istilah yang juga berbeda, yaitu 33 istilah 'genetika' dan 3 istilah 'genetik'. Kita dapat mengamati bahwa Bidang Ilmu Pertanian, Farmasi, dan Peternakan belum mengikuti Pedoman Umum Pembentukan Istilah.

Tabel 1: Hasil perambanan dari Glosarium untuk istilah *genetics* dan *cytogenetics* dengan kriterium 'sama' dan 'memuat'

Bidang Ilmu	'Sama' <i>Genetics— genetika</i>	'Sama' <i>Cytogenetics— sitogenetika</i>	'Memuat' <i>Genetics— genetika</i>
Kimia	0	1	3
Biologi	1	1	18
Pertanian	0	1*	1**
Farmasi	0	0	1**
Perhutanan	1	1	3
Peternakan	1	0	8 + 1**
Perikanan	0	0	1

*Sitogenetik, **genetik

Dalam bahasa Inggris kata *genetic* yang mengawali suatu istilah merupakan adjektiva, misal *genetic marker*. Dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah ditentukan bahwa sufiks *-ic*, *-ical* (Inggris) diubah menjadi sufiks *-is*. Dengan demikian, semua bidang ilmu dalam Glosarium tidak mengacu pada pola pembentukan istilah. Bidang Ilmu Kimia, Pertanian, Farmasi, dan Perhutanan menggunakan istilah 'penanda genetik', sedangkan Biologi meng-

gunakan 'penanda genetika' (Tabel 2). Dalam bahasa Indonesia tidak ada adjektiva yang dibentuk dari nomina dengan sufiks tertentu. Satu bentuk kata dalam bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai nomina, adjektiva, atau adverbial. Misal nomina (botani-*botany*), adjektiva (botani-*botanic*), adverbial (botani-*botanical*, *botanically*). Oleh karena itu, istilah genetika dapat dipertimbangkan penggunaannya untuk *genetic*: penanda genetika, bukan penanda genetik atau genetis.

Bidang Ilmu Biologi kembali tidak menggunakan Pedoman Umum Pembentukan Istilah untuk istilah dengan sufiks -ic (Tabel 3). *Genotypic distance* dan *Genotypic variant* dituliskan sebagai jarak genotipe dan varian genotipe.

Tabel 2: Hasil perambanan dari Glosarium untuk istilah *genetic* dengan kriteriam 'diawali'

Bidang ilmu	Diawali		
	Genetic—genetic	Genetic—genetika	Genetic—genesis
Kimia	3	0	0
Biologi	0	41	0
Pertanian	8	0	0
Farmasi	6	0	0
Perhutanan	15	0	0

Tabel 3: Hasil perambanan dari Glosarium untuk istilah *genotype* dengan kriterium 'sama' dan 'diawali'

Bidang ilmu	Sama	Diawali
	<i>Genotype-genotype</i>	<i>Genotypic-genotipik</i>
Biologi	1	2**
Pertanian	0	4
Farmasi	1*	0
Perhutanan	1	1
Peternakan	1	2
Perikanan	1	0
Antropologi	1	0

*genotipik, **genotipe

Hasil perambanan dengan kriterium ‘memuat’ untuk istilah *physics* menunjukkan bahwa hampir semua bidang ilmu menggunakan istilah fisika, kecuali bidang pendidikan menggunakan fisik (Tabel 4). Perambanan dengan kriterium ‘diawali’ untuk istilah *physic* atau *physical* menghasilkan istilah Indonesia berbeda untuk bidang ilmu tertentu. Bidang Ilmu Fisika menggunakan padanan fisis untuk tujuh rambanan *physical* dan fisika hanya untuk *physical optics*—optika fisika. Bidang Ilmu Kimia menggunakan istilah fisika, sedangkan bidang lainnya menggunakan fisik atau fisikal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat tiga istilah –fisika, fisik, dan fisis– sebagai lema, sedangkan Pedoman Umum Pembentukan Istilah mengatur sufiks –ic dan –ical diubah menjadi –is.

Tabel 4: Hasil perambanan dari Glosarium untuk istilah *physics* dengan kriterium ‘memuat’ dan *physic* dengan kriterium ‘diawali’

Bidang Ilmu	Memuat		Diawali	
	<i>Physics</i> –fisika	<i>Physic</i> , <i>physical</i> –fisis	<i>Physic</i> , <i>physical</i> – fisika	<i>Physic</i> , <i>physical</i> –fisik
Kimia	2	0	9	0
Fisika	18	7	1	0
Matematika	0	1	0	0
Biologi	1	0	0	4
Pertanian	1	0	0	10
Perhutanan	1	0	0	1
Teknik Mesin	1	0	0	1
Antropologi	2	0	0	2 + 1** + 1***
Pendidikan	1*	0	0	7
Sastra	1	0	0	0

*fisik, **fisikal, ****physically deformed*–cacat badan

Hasil kerja Mabbim dalam penerbitan Glosarium Istilah bentuk CD merupakan produk yang luar biasa untuk memperkaya komu-

nikasi ilmiah Indonesia, namun masih perlu direvisi untuk menjadikannya sebagai pegangan yang tidak membingungkan penggunaanya.

5. Penutup

Paparan beberapa contoh istilah dari *Glosarium Istilah* yang diramban melalui kriterium 'sama', 'diawal', dan 'memuat' mempermudah penggunaanya. Penyunting berkala ilmiah tentu akan merasakan kemudahannya mencari padanan istilah dengan adanya CD tersebut karena tidak perlu membuka halaman demi halaman untuk mencari istilah, cukup dengan klik dan langsung istilah yang diinginkan tampil pada layar.

Istilah yang dicari dari CD dengan mudah ditelusur sehingga dengan mudah pula kita dapat mencermati bentukan istilah yang ditawarkan oleh para pakar untuk suatu istilah bahasa Inggris. Penelusuran istilah pada Tabel 1-4 menggambarkan bahwa istilah belum dibentuk mengikuti Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Para pakar dalam bidang ilmu dan para pakar bahasa dapat melihat kembali istilah yang telah dibentuk dan seyogianya mereka segera merevisinya supaya kesalahan yang ada dapat diminimumkan dan glosarium ini dapat dipercaya sebagai sumber acuan utama untuk istilah ilmiah.

Jika para penyunting percaya akan keakuratan istilah yang disajikan oleh *Glosarium Istilah Asing-Indonesia* maka strategi persebaran istilah ilmiah Indonesia dapat dilakukan melalui berkala ilmiah. Istilah yang tepat dalam pengungkapan apa yang ingin disampaikan dalam artikel ilmiah dan ketaatan penggunaannya akan mempermudah pembaca untuk mengikuti ungkapan jalan pikiran penulisnya dan memantapkan persebarannya. Demikian juga, supaya para peneliti dapat berkomunikasi secara maksimum dalam peristilahan yang baru glosarium perlu direvisi terus-menerus. Istilah yang terus bertumbuh di dunia perlu diserap pada edisi beri-

kutnya. Istilah yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seyogianya juga diselaraskan dengan istilah yang ada di dalam Glosarium Istilah yang mengikuti Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Pusat Bahasa perlu mensosialisasikan produk terbitannya supaya segera dikenali dan dimanfaatkan oleh masyarakat ilmiah.

Rujukan

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Glosarium Istilah Asing-Indonesia*. [cakram kompak]. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Ed ke-3. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Gunawan AW, Achmadi SS, Arianti L. 2007. *Pedoman Penyajian Karya Ilmiah*. Bogor: IPB Pr.
- Gunawan AW, Dharmaputra OS, Rahayu G, Sudirman LI, Sukarno N, Listiyowati S. 2006. *Cendawan dalam Praktik Laboratorium*. Ed ke-2. Bogor: IPB Pr.



MABBIM sebenarnya membawa semangat jauh lebih besar dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu/Indonesia. Melalui MABBIM, pengemblengan kepakaran ketiga pihak membolehkan upaya pengayaan bahan dan korpus bahasa tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam penakatan dunia hari ini, kesepakatan dan kebersamaan adalah jauh lebih baik daripada bergerak sendiri-sendiri apatah lagi dalam konteks memperkasakan bahasa yang sama iaitu bahasa Melayu. Kita dapat lihat bagaimana ruang geografi itu diikat dengan satu bahasa yang menyatukan ketiga negara serumpun. (Mataim bin Bakar - Brunei Darussalam)

Silang persabaran ilmiah ilmiah Indonesia dapat dilakukan melalui berkala ilmiah ilmiah yang tepat dalam pengungkapan apa yang ingin disampaikan dalam artikel ilmiah dan ketaatannya akan mempermudah pembaca untuk mengikuti langkah jalan pikiran penulisnya dan memantapkan persebarannya. (Agustin Widya Gunawan - Indonesia)

MBIM/MABBIM merupakan badan pembina bahasa yang tidak mempunyai keserupaan dengannya di mana-mana pun juga di muka bumi ini. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, banyak pemikiran dan pertimbangan dimanfaatkan oleh ahli-ahli MBIM/MABBIM dari segi linguistik, pengkategorian bidang ilmu, hubungan antara negara yang memerlukan kemahiran dalam perundingan, hubungan antara individu, pengurusan dan logistik. Tidak ada model dari mana pun juga yang boleh dirujuk, dan dari pemikiran dan lakaran kerja sendiri, MABBIM boleh dikatakan sudah menghasilkan model perancangan bahasa bagi satu alam perdata yang mempunyai satu bahasa bersama. (Asmah Hj. Omar - Malaysia)

Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional
Jalan Dikemasari Barat IV, Jakelangan
Jakarta Timur 13220

Telepon: +6221 4706287 Faksimile: +6221 4750407

Laman: www.pusatbahasa.diknas.go.id

E-mail: pb@diknas.go.id